



Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2013

Organisasi Industri dan
Pembentukan Harga di Tingkat Produsen

Juli 2008



BANK INDONESIA

Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter
Biro Riset Ekonomi

Outlook Ekonomi Indonesia

2008 - 2013

**Organisasi Industri
dan Pembentukan Harga di Tingkat Produsen**

Juli 2008



BANK INDONESIA

**Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter
Biro Riset Ekonomi**

Penanggung Jawab:

Made Sukada

Wijoyo Santoso

Tim Penyusun:

Endy Dwi Tjahjono

Harmanta

Hidayah Dhini Ari

Haris Munandar

Jati Waluyo

Oki Hermansyah

Myrnawati Savitri

Ferry Kurniawan

Tim penyusun mengucapkan terima kasih atas partisipasi, sumbang saran dan informasi dari beberapa pihak dalam Knowledge Sharing Session dan Focus Group Discussion, yaitu: BAPPENAS, BPS, GAPMMI, IPB, KPPU, LIPI, LPEM-UI, UGM, Univ. Trisakti.

Asesmen ini merupakan hasil analisis dan penelitian dari tim peneliti ekonomi di lingkungan Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (DKM). Asesmen ini sepenuhnya merupakan pendapat dari tim dan tidak harus menjadi atau mencerminkan pendapat resmi Bank Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR DIAGRAM	ix
BAB 1: TINJAUAN UMUM	1
BAB 2: KONSTELASI PEREKONOMIAN GLOBAL DAN DOMESTIK	7
2.1 Konstelasi Perekonomian Global	7
2.2 Konstelasi Perekonomian Domestik	9
2.2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Nasional	10
2.2.2 Perkembangan Kebijakan Sektor Riil dan Ekonomi Makro	17
BOKS: Sektor Listrik: Dampak Sektor Kelistrikan terhadap Perekonomian	21
BAB 3: ORGANISASI INDUSTRI DAN PERILAKU PEMBENTUKAN HARGA PRODUSEN DI INDUSTRI MANUFAKTUR INDONESIA	33
3.1 Gambaran Umum Industri Manufaktur di Indonesia	34
3.2 Paradigma <i>Structure-Conduct-Performance</i> (SCP)	36
3.3 Analisis Struktur Beberapa Kelompok Industri Utama	38
3.3.1 Industri Makanan dan Minuman	40
3.3.2 Industri Tekstil	43
3.3.3 Industri Kimia dan Barang-barang Kimia	46
3.3.4 Industri Karet dan Barang-barang dari Plastik	48
3.3.5 Industri Logam Dasar	49
3.3.6 Industri Mesin Listrik	51
3.3.7 Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi	54
3.3.8 Industri Kendaraan Bermotor	55
3.4 Pengujian Model dan Hasil Analisis Estimasi	57
3.4.1 Hasil Analisis Pengujian Ekonometrik	58
3.5 Kesimpulan	60
BAB 4: PROSPEK EKONOMI JANGKA MENENGAH	61
4.1 Asumsi Perekonomian Global 2008-2013	61
a. Pertumbuhan Ekonomi Dunia	61
b. Harga Komoditas Dunia	61
c. Suku Bunga Internasional	62
d. Aliran FDI Global	62
4.2 Asumsi Perekonomian Indonesia 2008-2013	63
a. Kondisi Keuangan Pemerintah	63
b. Suku Bunga Domestik	65
c. Aliran Masuk FDI	65

d. Reformasi Struktural dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Guna Perbaikan Iklim Investasi	66
4.3 Proyeksi Perekonomian Indonesia 2008-2013	67
4.4 Implikasi Kebijakan	69
4.4.1 Kebijakan Moneter dan Fiskal	69
4.4.2 Kebijakan Struktural	70
4.4.3 Peran KBI dalam Mendorong Sektor Riil dan Menekan Inflasi Daerah	70
BAB 5: TOPIKAL ISU	73
5.1 Perilaku Produsen Terhadap Pembentukan Harga di Tingkat Konsumen pada Industri Manufaktur Indonesia: Pendekatan dengan Analisis <i>Structure-Conduct-Performance</i>	73
5.1.1 Pendahuluan	73
5.1.2 Pengujian Model dan Analisis Hasil Estimasi	73
5.1.3 Perolehan Data	74
5.1.4 Struktur Model	74
5.1.5 Pengujian Ekonometrik	76
5.1.6 Hasil Analisis Pengujian Ekonometrik	76
5.2 Peran Distribusi dalam Pembentukan Harga Komoditas Pangan	80
5.2.1 Latar Belakang	80
5.2.2 Pembentukan Harga Komoditas	82
5.2.2.1 Persamaan dan Hasil Estimasi	82
5.2.2.2 Faktor Distribusi dan Harga Komoditas	85
5.2.3 Hasil Survei Komoditas	85
5.2.3.1 Jalur Distribusi	86
5.2.3.2 Pembentukan Harga dan Marjin Keuntungan	86
5.2.3.3 Biaya dan Hambatan Distribusi	87
5.2.4 Kesimpulan	88
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Proyeksi Ekonomi Indonesia 2008-2013	5
Tabel 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Dunia	7
Tabel 2.2	Perbandingan Kondisi Infrastruktur Regional	14
Tabel 2.3	Survei <i>Doing Business</i> 2008	16
Tabel 2.4	Peringkat Daya Saing oleh IMD	17
Tabel 2.5	Inpres No. 5 Tahun 2008	17
Tabel 2.6	Ringkasan APBN Tahun 2005-2007	19
Tabel 2.7	Ringkasan APBN Tahun 2008	20
Tabel 2.8	Indeks Persepsi Korupsi 2007	20
Tabel 3.1	Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor	35
Tabel 3.2	Ringkasan Matriks Industri	37
Tabel 3.3	Rasio Konsentrasi Tertinggi Beberapa Industri Tahun 2006 (KKI 5 Digit)	39
Tabel 3.4	Nilai <i>Minimum Efficiency Scale</i> Industri Manufaktur 2006 (KKI 3 Digit)	39
Tabel 3.5	Rasio Konsentrasi Industri Makanan dan Minuman (KKI 5 Digit)	41
Tabel 3.6	Rasio Konsentrasi Industri Tekstil (KKI 5 Digit)	44
Tabel 3.7	Rasio Konsentrasi Industri Kimia dan Barang Kimia (KKI 5 Digit)	46
Tabel 3.8	Rasio Konsentrasi Industri Karet dan Barang dari Plastik (KKI 5 Digit)	48
Tabel 3.9	Rasio Konsentrasi Industri Logam Dasar (KKI 5 Digit)	50
Tabel 3.10	Rasio Konsentrasi Industri Mesin Listrik (KKI 5 Digit)	52
Tabel 3.11	Rasio Konsentrasi Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Telekomunikasi (KKI 5 Digit)	54
Tabel 3.12	Rasio Konsentrasi Industri Kendaraan Bermotor (KKI 5 Digit)	56
Tabel 3.13	Hasil Estimasi	59
Tabel 4.1	Proyeksi FDI	63
Tabel 4.2	Kerangka Asumsi Makro Jangka Menengah	64
Tabel 4.3	Kerangka APBN Jangka Menengah (persen terhadap PDB)	64
Tabel 4.4	Asumsi Dasar Eksternal dan Domestik	67
Tabel 4.5	Proyeksi Ekonomi Indonesia 2008-2013	69
Tabel 5.1	Hasil Estimasi	77
Tabel 5.2	Nilai <i>Minimum Efficiency Scale</i> (MES) Industri Manufaktur Indonesia	78
Tabel 5.3	Sumbangan Inflasi dari Kelompok <i>Volatile Foods</i>	81
Tabel 5.4	Elastisitas Harga Komoditas Terhadap Faktor Distribusi	85
Tabel 5.5	Rata-rata Margin Keuntungan Pedagang (dalam Rupiah)	87
Tabel 5.6	Biaya Pengangkutan dan Dampak Kenaikan Harga BBM	87

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Dunia	8
Grafik 2.2	Perkembangan FDI Global	9
Grafik 2.3	Tingkat Pengangguran di Indonesia	9
Grafik 2.4	Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia	9
Grafik 2.5	Perkembangan Rasio FDI terhadap GDP Beberapa Negara ASEAN	10
Grafik 2.6	Perkembangan FDI Indonesia	10
Grafik 2.7	Pertumbuhan Komponen PDB Pra- dan Pascakrisis	10
Grafik 2.8	Pangsa Komponen PDB terhadap Pertumbuhan PDB	11
Grafik 2.9	Kontribusi Komponen PDB terhadap Pertumbuhan PDB	11
Grafik 2.10	Pertumbuhan Kredit Konsumsi	11
Grafik 2.11	<i>Revealed Comparative Advantage Index</i> Beberapa Komoditas Andalan Ekspor	12
Grafik 2.12	Pertumbuhan PDB dan Pertumbuhan Sektoral	12
Grafik 2.13	Pertumbuhan PDB dan Pangsa Sektoral	12
Grafik 2.14	Pertumbuhan PDB dan Kontribusi Sektoral	12
Grafik 2.15	Akumulasi Kapital	13
Grafik 2.16	Alokasi Akumulasi Kapital Sektoral	13
Grafik 2.17	Perkembangan Inflasi 1998-2007	14
Grafik 2.18	Indeks Risiko Komposit	15
Grafik 2.19	BI rate dan Inflasi	18
Grafik 3.1	Jumlah dan Pertumbuhan Perusahaan Industri Manufaktur Sedang dan Besar	35
Grafik 3.2	Perkembangan Output dan Nilai Tambah Industri Manufaktur	36
Grafik 3.3	Inflasi Manufaktur dan Inflasi Total	40
Grafik 3.4	Inflasi Manufaktur dan Perubahan PCM	40
Grafik 3.5	Tingkat <i>Openness</i> Industri Makanan dan Minuman (KKI 3 Digit)	42
Grafik 3.6	Rasio Penetrasi Impor Industri Makanan dan Minuman (KKI 3 Digit)	42
Grafik 3.7	Biaya Material per Output Industri Makanan dan Minuman (KKI 3 Digit)	42
Grafik 3.8	Persentase Penggunaan Bahan Baku Impor Industri Makanan dan Minuman (KKI 3 Digit)	42
Grafik 3.9	Biaya Tenaga Kerja per Output di Industri Makanan dan Minuman (KKI 3 Digit)	43
Grafik 3.10	Produktivitas Tenaga Kerja Industri Makanan dan Minuman (KKI 3 Digit)	43
Grafik 3.11	Price-Cost Margin Industri Makanan dan Minuman (KKI 3 Digit)	43
Grafik 3.12	Tingkat <i>Openness</i> Industri Tekstil (KKI 3 Digit)	44
Grafik 3.13	Biaya Material per Output Industri Tekstil (KKI 3 Digit)	44
Grafik 3.14	Persentase Penggunaan Bahan Baku Impor Industri Tekstil (KKI 3 Digit)	45
Grafik 3.15	Biaya Tenaga Kerja per Output di Industri Tekstil (KKI 3 Digit)	45

Grafik 3.16 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Tekstil (KKI 3 Digit)	45
Grafik 3.17 Price-Cost Margin Industri Tekstil (KKI 3 Digit)	45
Grafik 3.18 Tingkat <i>Openness</i> Industri Kimia dan Barang Kimia (KKI 3 Digit)	46
Grafik 3.19 Rasio Penetrasi Impor Industri Kimia dan Barang Kimia (KKI 3 Digit)	46
Grafik 3.20 Biaya Material per Output Industri Kimia dan Barang Kimia (KKI 3 Digit)	47
Grafik 3.21 Persentase Penggunaan Bahan Baku Impor Industri Kimia dan Barang Kimia (KKI 3 Digit)	47
Grafik 3.22 Biaya Tenaga Kerja per Output di Industri Kimia dan Barang Kimia (KKI 3 Digit)	47
Grafik 3.23 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Kimia dan Barang Kimia (KKI 3 Digit)	47
Grafik 3.24 Price-Cost Margin Industri Kimia dan Barang Kimia (KKI 3 Digit)	48
Grafik 3.25 Tingkat <i>Openness</i> Industri Karet dan Barang dari Plastik (KKI 3 Digit)	48
Grafik 3.26 Rasio Penetrasi Impor Industri Karet dan Barang dari Plastik (KKI 3 Digit)	48
Grafik 3.27 Biaya Material per Output Industri Karet dan Barang dari Plastik (KKI 3 Digit)	49
Grafik 3.28 Persentase Penggunaan Bahan Baku Impor Industri Karet dan Barang dari Plastik (KKI 3 Digit)	49
Grafik 3.29 Biaya Tenaga Kerja per Output di Industri Karet dan Barang Plastik (KKI 3 Digit)	49
Grafik 3.30 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Karet dan Barang-barang dari Plastik (KKI 3 Digit)	49
Grafik 3.31 Price-Cost Margin Industri Karet dan Barang-barang dari Plastik (KKI 3 Digit)	50
Grafik 3.32 Tingkat <i>Openness</i> Industri Logam Dasar (KKI 3 Digit)	50
Grafik 3.33 Biaya Material per Output Industri Logam Dasar (KKI 3 Digit)	50
Grafik 3.34 Persentase Penggunaan Bahan Baku Impor Industri Logam (KKI 3 Digit)	51
Grafik 3.35 Biaya Tenaga Kerja per Output di Industri Logam Dasar (KKI 3 Digit)	51
Grafik 3.36 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Logam Dasar (KKI 3 Digit)	51
Grafik 3.37 Price-Cost Margin Industri Logam Dasar (KKI 3 Digit)	51
Grafik 3.38 Tingkat <i>Openness</i> Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya (KKI 3 digit) .	52
Grafik 3.39 Biaya Material per Output Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya (KKI 3 digit)	52
Grafik 3.40 Persentase Penggunaan Bahan Baku Impor Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya (KKI 3 digit)	52
Grafik 3.41 Biaya Tenaga Kerja per Output di Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya (KKI 3 Digit)	53
Grafik 3.42 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya (KKI 3 digit)	53
Grafik 3.43 Price-Cost Margin Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya	53
Grafik 3.44 Tingkat <i>Openness</i> Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Telekomunikasi	54
Grafik 3.45 Biaya Material per Output Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Telekomunikasi (KKI 3 Digit)	54

Grafik 3.46 Persentase Penggunaan Bahan Baku Impor Industri Radio, Televisi, dan Peralatan ... Telekomunikasi	55
Grafik 3.47 Biaya Tenaga Kerja per Output di Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Telekomunikasi (KKI 3 Digit)	55
Grafik 3.48 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Telekomunikasi (KKI 3 Digit)	55
Grafik 3.49 Price-Cost Margin Industri Radio, Televisi, dan Alat Komunikasi	55
Grafik 3.50 Tingkat <i>Openness</i> Industri Kendaraan Bermotor (KKI 3 Digit)	56
Grafik 3.51 Biaya Material per Output Industri Kendaraan Bermotor (KKI 3 Digit)	56
Grafik 3.52 Persentase Penggunaan Bahan Baku Impor Industri Kendaraan Bermotor	56
Grafik 3.53 Biaya Tenaga Kerja per Output di Industri Kendaraan Bermotor (KKI 3 Digit)	56
Grafik 3.54 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Kendaraan Bermotor (KKI 3 Digit)	57
Grafik 3.55 Price-Cost Margin Industri Kendaraan Bermotor	57
Grafik 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Volume Perdagangan Dunia.....	61
Grafik 4.2 Perkembangan dan Proyeksi Harga Minyak Dunia	62
Grafik 4.3 Perkembangan Fed fund rate	62
Grafik 4.4 Perkembangan Kebijakan Fiskal	64
Grafik 5.1 Perkembangan Inflasi dan Sumbangan Volatile Foods	80
Grafik 5.2 Perkembangan Inflasi Keseluruhan dan Volatile Foods (mtm)	80
Grafik 5.3 Metode Pembentukan Harga di Tingkat Pedagang	86
Grafik 5.4 Hambatan Distribusi yang Dialami oleh Pedagang	87

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Diagram Sederhana Arus Barang	32
Diagram 3.2 Structure-Conduct-Performance	34
Diagram 4.1 Kebijakan Ekonomi Makro dan Kinerja Ekonomi Indonesia	68

S A M B U T A N
DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA BIDANG KEBIJAKAN MONETER
DALAM RANGKA PENERBITAN
BUKU OUTLOOK EKONOMI INDONESIA EDISI JULI 2008

Dalam menentukan kebijakannya, otoritas ekonomi dituntut untuk selalu mendasarkan kepada data dan informasi yang beragam dan senantiasa terkini (*updated*), terlebih saat ini ketika pasar bergerak sangat cepat dan informasi mengalir dalam hitungan detik. Dengan bekal itu kebijakan yang dihasilkan bisa tetap kontekstual, tepat waktu. Namun data dan informasi terus bergerak dengan dinamis. Saat ini kita bahkan tengah menyaksikan betapa globalisasi menjadikan dinamika informasi itu menjadi dramatis. Kejadian di benua lain dengan cepat mengubah persepsi risiko pelaku pasar di seluruh dunia dan ekonomi kita yang jauh dari sumber masalah itu tiba-tiba saja bisa terkena imbasnya. Namun, jika tidak hati-hati, gempuran data dan informasi malahan bisa menjadikan pandangan kita menjadi *myopic*, parsial dan berjangka pendek. Sebuah paradoks informasi. Dan apabila pandangan semacam itu terjadi pada otoritas ekonomi, kebijakan yang dihasilkannya bisa jadi bersifat reaktif dan hanya berorientasi jangka pendek yang sangat mungkin kontradiktif dengan kepentingan jangka panjang.

Maka kehadiran sebuah outlook ekonomi jangka menengah-panjang dapat berfungsi sebagai sebuah pegangan, apalagi jika ia bisa terbit secara berkala. Dengannya penentu kebijakan dapat melihat posisi ekonomi hari ini dalam horison yang lebih luas dan berjangka panjang. Sebagai contoh, edisi kali ini dari Outlook Ekonomi Indonesia (OEI) yang merupakan publikasi berkala dari Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia hadir di tengah-tengah kegalauan pasar keuangan dunia. Meskipun kita tahu bahwa kejadian ini adalah bagian dari proses ekonomi dunia yang sedang mencari keseimbangan baru dan karenanya sulit untuk dibendung oleh sebuah kebijakan domestik, kegalauan semacam ini akan sangat membahayakan jika diikuti oleh persepsi pasar akan rendahnya resiliensi ekonomi domestik. Pandangan semacam ini misalnya terlihat dari beberapa analisis yang mengatakan betapa ekonomi kita sangat mudah “panas”, di mana pertumbuhan sekitar 6% saja sudah menimbulkan tekanan inflasi dan neraca pembayaran. Dalam konteks itulah hasil proyeksi dari IEO ini menjadi membesarkan hati, karena ekonomi Indonesia dalam jangka menengah diramalkan dapat tumbuh solid bahkan dengan tekanan inflasi yang rendah. Di sini misalnya dikatakan bahwa dalam tahun 2013 ekonomi Indonesia diproyeksikan dapat tumbuh tinggi hingga 6,7-7,2% dengan tetap disertai laju inflasi yang rendah hingga mendekati 3,5%.

Dari hasil proyeksi yang dihasilkan oleh sebuah model ini, tentu kita menyadari bahwa kombinasi pertumbuhan tinggi dengan inflasi rendah semacam itu bukan sebuah kondisi yang *given*, yang ada pada hari ini. Di dalamnya ada seperangkat asumsi baik eksternal maupun internal. Saat ini kita masih harus menghadapi kenyataan bahwa kenaikan *demand* menghasilkan tekanan yang cukup kuat pada inflasi dan neraca pembayaran. Secara implisit, *exercise* ini mengatakan bahwa

kebijakan di sisi *demand*, melalui *monetary* dan *fiscal policy*, harus terus dijaga konsistensinya agar menghasilkan ekspektasi pelaku ekonomi yang positif, yang tidak menimbulkan gejolak *demand* sehingga dalam jangka panjang bisa kondusif bagi perencanaan bisnis. Kemudian yang tidak kalah penting tentu saja adalah kebijakan ekonomi secara struktural di sektor riil untuk terus menghasilkan tambahan kapasitas ekonomi di sisi *supply*. Hanya dengan kombinasi kebijakan itulah ekonomi kita bisa tumbuh secara sehat, kini dan ke depan.

Konsistensi kebijakan di sisi *demand* dan perbaikan struktural di sisi *supply* itu pula yang bisa diharapkan perannya dalam mengatasi persoalan persistensi inflasi di Indonesia. Penelitian di Bank Indonesia telah sejak lama menengarai hal ini. Analisis perilaku inflasi menunjukkan fakta bahwa inflasi Indonesia bersifat sangat persisten, terutama karena pembentukan ekspektasi inflasi yang masih didominasi oleh inflasi masa lalu (ekspektasi adaptif). Pembentukan ekspektasi inflasi ini banyak diwarnai oleh inflasi *costpush* atau *supply shocks* yang tinggi dan sering terjadi, seperti kejutan harga minyak, kenaikan harga BBM, devaluasi dan fluktuasi nilai tukar serta kenaikan upah minimum yang melebihi inflasi. Bagi bank sentral, implikasi kebijakannya menjadi sulit karena perilaku ekspektasi adaptif yang membuat sebagian besar produsen dan pedagang itu enggan menurunkan laju kenaikan harga menjadikan kebijakan moneternya baru bisa efektif jika sudah berdampak pada kontraksi ekonomi. Karena proses ekspektasi yang adaptif itu telah tertanam dalam benak pelaku ekonomi, maka satu-satunya alat yang bisa mengubah persepsi itu hanyalah konsistensi kebijakan, khususnya di sisi *demand* melalui kebijakan moneter. Selain itu, penghapusan berbagai hambatan di sisi *supply* juga menjadi penting agar tidak menimbulkan lonjakan inflasi sesering seperti saat ini sehingga persepsi atas inflasi yang selalu tinggi itu juga bisa dikikis.

Maka membicarakan inflasi yang persisten di Indonesia kemudian adalah seperti sisi lain dari mata uang yang sama dengan kondisi ekonomi yang mudah panas seperti yang sudah diuraikan di muka. Kondisi persistensi inflasi menjadikan upaya disinflasi yang terlalu agresif akan membawa *output loss* yang terlalu mahal, sama seperti upaya menjadikan ekonomi tumbuh terlalu tinggi hanya akan berakhir pada kondisi *overheating*. Dan model IEO ini kembali mengingatkan kita bahwa resep untuk keduanya adalah sama: konsistensi kebijakan di sisi *demand* dan perbaikan struktural di sisi *supply*. Obat lama yang sudah turun-temurun, yang kembali diresepkan oleh laporan IEO kali ini.

Hal lain yang juga menarik dari laporan ini adalah suatu topik yang saya kira masih dalam semangat yang sama, yang ada pada Bab 3: Organisasi Industri dan Perilaku Pembentukan Harga Produsen di Industri Manufaktur Indonesia. Di sini kembali disimpulkan bahwa dalam jangka menengah panjang, kebijakan yang bisa menyehatkan perekonomian Indonesia melalui bidang industri adalah kebijakan struktural yang mampu membuat industri menjadi lebih efisien, persaingan usaha menjadi lebih sehat, dan pasar menjadi lebih *contestable*, yang pada ujungnya akan mampu meningkatkan penawaran agregat.

1 Untuk ulasan yang lebih lengkap, lihat misalnya "Determinan Inflasi Indonesia" oleh Akhis R. Hutabarat (2005), Bank Indonesia Working Paper No. 01/DKM/05.

Dengan semua temuan dan rekomendasi yang sangat baik itu, perkenankan saya, atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun Outlook Ekonomi Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi pekerjaan kita dan meringankan langkah kita dalam berusaha menuju masa depan yang lebih baik.

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartadi A. Sarwono', with a long horizontal flourish extending to the right.

Hartadi A. Sarwono

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka buku Outlook Ekonomi Indonesia (OEI) edisi Juli 2008 telah berhasil disusun dan selesai pada waktunya. Buku yang memuat prospek perekonomian Indonesia jangka menengah panjang (2008 – 2013) ini diharapkan akan menjadi acuan dan sumber informasi bagi para *stakeholders* Bank Indonesia, dalam melakukan perencanaan kegiatan ekonomi ke depan.

Selain memuat perkiraan arah perkembangan ekonomi ke depan, buku OEI edisi Juli 2008 juga menyampaikan hasil studi yang cukup mendalam tentang perilaku pembentukan harga di tingkat produsen di Indonesia. Topik studi ini sangat relevan mengingat harga yang harus dibayar di tingkat konsumen tidak dapat dilepaskan dari perilaku produsen dalam pembentukan harga. Oleh karena itu, studi ini merupakan salah satu upaya Bank Indonesia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang fenomena inflasi di Indonesia. Hal ini pada gilirannya diharapkan akan turut meningkatkan kualitas perumusan kebijakan moneter yang diambil.

Akhir kata, semoga penerbitan buku ini dapat memberi sumbangan berarti dalam upaya untuk mengantarkan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik.

Jakarta, Juli 2008

Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter



MADE SUKADA

Direktur

halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 1: Tinjauan Umum

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam jangka panjang hanya mungkin tercapai dengan dukungan kapasitas produksi perekonomian yang memadai. Dalam jangka pendek, dorongan pertumbuhan ekonomi memang dapat bertumpu pada peningkatan permintaan masyarakat saja. Namun dalam jangka panjang, hanya pertumbuhan permintaan yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas produksi yang memadai yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa mengorbankan stabilitas harga maupun neraca pembayaran. Pemahaman akan kondisi kapasitas perekonomian serta perkiraannya ke depan dengan demikian menjadi sangat penting, baik bagi Bank Sentral maupun Pemerintah. Bank Sentral perlu melakukan manajemen permintaan dengan tepat agar geliat perekonomian ke depan senantiasa sesuai dengan daya dukung perekonomian domestik. Dengan pemahaman seperti ini, maka prospek ekonomi Indonesia dalam jangka lima tahun ke depan akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam mendorong kapasitas perekonomian, melalui peningkatan kontribusi faktor-faktor produksi yang meliputi akumulasi kapital dan SDM yang berkualitas, serta penguasaan teknologi yang menghasilkan peningkatan tingkat produktivitas dan efisiensi.

Hasil penelitian Bank Indonesia menunjukkan perkembangan kondisi kapasitas perekonomian pascakrisis yang berada dalam arah yang semakin baik, meskipun belum mencapai kinerja seperti yang diharapkan. Perbaikan ini ditunjukkan oleh tren peningkatan kegiatan investasi yang terus tumbuh positif dalam beberapa triwulan belakangan ini. Ke

depan peningkatan kinerja investasi ini diperkirakan akan terus berlangsung sejalan dengan terus menguatnya permintaan masyarakat yang juga didukung oleh pesatnya pertumbuhan kredit perbankan. Kondisi ini tidak terlepas dari berbagai upaya Pemerintah selama ini dalam memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai indikator yang mengkonfirmasi adanya perbaikan pada iklim usaha di Indonesia, seperti terlihat dalam peringkat indeks risiko yang dikeluarkan *International Country Risk Guide (ICRG)*¹. Selain itu, beberapa hasil survei internasional juga mengkonfirmasi adanya perbaikan dalam hal kemudahan berusaha dan tingkat daya saing Indonesia. Ke depan, reformasi struktural yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan akan terus berjalan dengan skala dan kecepatan yang lebih signifikan.

Selain peningkatan kapasitas produksi domestik, prospek perekonomian Indonesia juga sangat ditentukan oleh kondisi perekonomian global. Kondisi eksternal yang dua tahun terakhir ini cenderung kurang kondusif, secara perlahan diperkirakan akan pulih kembali memasuki tahun 2010 sejalan dengan semakin berkurangnya ancaman stagflasi ke depan. Kondisi ini diproyeksikan akan tercermin pada pertumbuhan ekonomi dunia yang kembali meningkat hingga

1 Sampai Juni 2008 angka ICRG komposit rata-rata untuk Indonesia adalah 69,7. Angka ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 64 (2005); 67,2 (2006); 69,5 (2007). Angka indeks komposit yang semakin tinggi menunjukkan risiko yang semakin rendah atas tiga kriteria risiko yang didefinisikan, yaitu risiko politik, keuangan dan ekonomi.

mencapai 5,1% di tahun 2013, ditopang oleh harga minyak dunia maupun komoditas nonmigas yang kembali turun dan stabil. Selain itu, turbulensi di pasar keuangan dunia yang dipicu oleh krisis *sub-prime mortgage* di AS diharapkan juga akan mereda dalam beberapa tahun kedepan.

Dengan dukungan dari sisi eksternal berupa prospek perekonomian global yang semakin baik serta dari sisi internal berupa peningkatan dalam kapasitas produksi domestik, maka prospek ekonomi Indonesia ke depan selanjutnya akan sangat ditentukan oleh keberhasilan Bank Indonesia maupun Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro yakni berupa inflasi yang rendah dan stabil serta pergerakan nilai tukar yang sesuai dengan fundamental ekonomi. Hal ini sekaligus akan memberikan landasan yang kokoh bagi upaya Pemerintah dalam melakukan perbaikan iklim investasi. Guna mewujudkan hal ini, koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah perlu terus dilakukan.

Dalam hal pengendalian inflasi, koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah menjadi semakin penting mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi pembentukan harga, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, sementara instrumen yang dimiliki Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi terbatas. Hasil penelitian Bank Indonesia selama ini juga memperkuat keyakinan cukup besarnya tekanan harga yang berasal dari sisi penawaran/produksi. Salah satu contoh sumber tekanan harga dari sisi penawaran, yang selama ini sering luput dari pengamatan, adalah kondisi struktur pasar yang cenderung terkonsentrasi pada beberapa pemain besar serta situasi industri yang diwarnai inefisiensi yang tinggi.

Hasil penelitian Bank Indonesia menunjukkan masih cukup tingginya tingkat

konsentrasi beberapa industri manufaktur utama di Indonesia.² Selain itu, hambatan masuk (*entry barrier*) pada industri manufaktur Indonesia juga terindikasi cukup tinggi. Kondisi ini senantiasa menciptakan insentif bagi para pemain besar untuk melakukan berbagai strategi dalam upaya memaksimalkan profit. Sebagai akibatnya dorongan untuk memperbesar *mark-up ratio* atau *price-cost margin* selalu timbul. Disamping itu, bukti empiris juga menunjukkan adanya beberapa industri yang berperilaku *pro-cyclical* dalam penentuan harga jual. Dalam situasi sekarang, dengan perilaku produsen yang *pro-cyclical* - dimana kenaikan permintaan akan segera diikuti dengan kenaikan harga jual – kemungkinan terjadinya peningkatan inflasi akan semakin besar. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya Pemerintah yang lebih kuat dalam menjamin agar persaingan usaha di Indonesia semakin sehat dan *contestable*. Selain itu, upaya Pemerintah untuk mendorong liberalisasi perdagangan dengan membuka pasar domestik yang lebih besar, menurunkan impor tarif dan menghapuskan hambatan non-tarif, juga merupakan langkah yang tepat dan perlu diteruskan karena terbukti cukup efektif dalam menurunkan *price-cost margin* di beberapa industri. Kebijakan tersebut pada gilirannya juga akan memberi peluang yang lebih besar untuk penetrasi pasar ekspor.

Kombinasi dari keberhasilan reformasi struktural dan peningkatan kapasitas kelembagaan, situasi perekonomian global yang makin kondusif, serta koordinasi yang solid antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, akan menghantar perekonomian Indonesia mencapai

2 Lihat Bab 3 : "Organisasi Industri dan Perilaku Pembentukan Harga Produsen di Industri Manufaktur Indonesia".

kisaran pertumbuhan ekonomi 6,7-7,2% di 2013. Sementara itu inflasi dapat diturunkan pada tingkat yang setara dengan inflasi negara-negara kawasan, yaitu pada tingkat 3,5 % di tahun 2013. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, penyerapan tenaga kerja akan bertambah sehingga akan mampu menekan tingkat pengangguran. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang dibarengi dengan inflasi yang terus menurun diharapkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan riil dan pengurangan tingkat kemiskinan sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konstelasi Perekonomian Dunia

Sejak pertengahan 2007, kondisi ekonomi dunia ditandai oleh kondisi yang kurang menggembirakan, dipicu oleh munculnya krisis *sub-prime mortgage* di pasar keuangan AS yang dampaknya dengan cepat menjalar ke negara-negara maju lainnya. Setelah mencapai pertumbuhan 5,1% di tahun 2006, pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi dunia menurun menjadi 5%, dan selanjutnya menurun ke tingkat 4,6% (yoy) pada triwulan pertama 2008 dan ke tingkat 3,9% pada triwulan kedua 2008. Pelemahan tersebut disamping disebabkan oleh krisis keuangan, juga dipengaruhi oleh melambungnya harga minyak hingga sempat menyentuh level USD145 per barrel di bulan Juli 2008 serta kenaikan harga komoditas makanan. Akibatnya, tekanan inflasi dunia juga semakin meningkat.

Menghadapi ancaman stagflasi di atas, negara-negara di dunia dihadapkan pada pilihan kebijakan ekonomi makro yang sulit. Di banyak *emerging market*, terutama negara yang inflasinya sudah berada di atas tren, bank sentral melakukan

kebijakan moneter ketat yang dikombinasikan dengan pengendalian fiskal yang lebih disiplin, serta dalam beberapa kasus pengelolaan kebijakan nilai tukar yang lebih fleksibel. Tantangan tambahan bagi negara berpenghasilan rendah dan menengah adalah untuk menyediakan kebutuhan pangan yang memadai namun dengan tetap menjaga inflasi.

Konstelasi Perekonomian Domestik

Secara umum, kondisi perekonomian domestik selama lima tahun terakhir terus menunjukkan perbaikan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, inflasi yang terkendali dan pergerakan kurs yang stabil. Pertumbuhan ekonomi sempat tertahan di 2006 pasca kenaikan harga BBM di penghujung 2005, namun selanjutnya kembali mengalami akselerasi hingga mampu mencatat pertumbuhan 6,3% pada 2007. Angka pertumbuhan ini merupakan pencapaian tertinggi pascakrisis. Penguatan ekonomi di 2008 terus berlanjut seperti tercermin dari angka pertumbuhan PDB di triwulan I dan II yang terus meningkat, masing-masing sebesar 6,3% dan 6,4%. Inflasi yang sempat melejit menjadi dua digit pasca-kenaikan harga BBM 2005 berhasil ditekan kembali menjadi satu digit dan mencapai rata-rata 6,4% pada 2007. Namun, pergerakan harga minyak dunia yang semakin tidak terkendali telah memaksa Pemerintah untuk memilih menaikkan kembali harga BBM pada Mei 2008 yang segera membuat inflasi kembali naik. Meskipun demikian, kenaikan suku bunga kebijakan yang dilakukan secara terukur, serta koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, secara perlahan-lahan tampak berhasil mengendalikan inflasi. Pada Agustus 2008, inflasi bulanan tercatat 0,51%, jauh menurun dari Juli 2008 yang mencapai 1,37%.

Kombinasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang terkendali telah mendorong turunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Meskipun demikian, kerja keras untuk terus menurunkan angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih diperlukan. Hal ini mengingat masih banyak permasalahan struktural yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia.

Dari sisi permintaan, tulang punggung pertumbuhan ekonomi masih berasal dari konsumsi, baik Pemerintah maupun swasta. Sementara itu, investasi masih sangat terbatas meskipun selama 3 triwulan terakhir ini sudah mulai tumbuh pesat. Dalam jangka panjang, ketimpangan antara konsumsi dan investasi ini akan memunculkan masalah pembiayaan, yang mulai terlihat dari semakin tingginya *leverage* rumah tangga. Di samping itu, pertumbuhan ekspor yang terjadi selama ini masih didominasi oleh ekspor komoditas primer yang terdorong oleh kenaikan harga.

Dari sisi produksi, pertumbuhan sektor pertanian dan manufaktur masih sangat terbatas bahkan cenderung stagnan, padahal kedua sektor ini sangat besar perannya dalam menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, perkembangan sektor-sektor tersier khususnya perdagangan, pengangkutan, dan jasa keuangan maupun non-keuangan semakin membaik, seperti tercermin dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.

Pertumbuhan sektor manufaktur dan pertanian yang melambat tidak terlepas dari dampak kegiatan investasi yang sangat terbatas. Akibatnya, pertumbuhan stok kapital pascakrisis jauh menurun dibandingkan prakrisis. Disamping itu, kegiatan investasi yang terjadi selama ini juga banyak tercurah pada sektor tersier yang *linkage*-nya dengan sektor-sektor lainnya (baik *forward linkage* maupun *backward linkage*) relatif sangat kecil.

Terbatasnya kegiatan investasi ini mengindikasikan berbagai kebijakan di sektor riil yang selama ini ditempuh Pemerintah belum memberikan hasil yang diharapkan. Masih diperlukan kerja keras dan integrasi kebijakan dalam merangsang kegiatan investasi, terutama koordinasi antara kebijakan industri, perdagangan, perpajakan, dan ketenagakerjaan.

Meskipun demikian, upaya Pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha di Indonesia sudah mencatat adanya perbaikan-perbaikan meskipun masih sangat terbatas. Dalam hal menjalankan bisnis, secara umum pada 2008 peringkat kemudahan melakukan usaha di Indonesia membaik, dari peringkat 133 pada 2007 menjadi 123. Meskipun demikian, peringkat ini masih jauh dibawah negara anggota ASEAN lainnya seperti Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Sementara itu, dilihat dari daya saing Indonesia, bila merujuk pada Hasil survei *International Institute Management for Development* (IMD) menyatakan bahwa tahun 2008 daya saing Indonesia mengalami perbaikan menjadi peringkat 51 dari peringkat 54 di tahun 2007.

Prospek Ekonomi Jangka Menengah

Apabila kondisi ekonomi dunia terus membaik dan semakin kondusif, stabilitas ekonomi makro tetap terjaga, dan upaya Pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan perbaikan infrastruktur serta reformasi birokrasi berjalan baik, maka prospek ekonomi Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan akan semakin membaik. Hal ini akan tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat hingga mencapai sekitar 7% di tahun 2013, dengan didukung oleh pertumbuhan yang tinggi pada kegiatan investasi dan ekspor, serta diiringi oleh tingkat inflasi yang setara negara-negara kawasan pada tingkat 3,5%. Konsumsi rumah

angga, yang akan tetap memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, diperkirakan akan tumbuh lebih dari 5%, bahkan mencapai sekitar 5,7-6,1% pada 2013. Disamping itu, membaiknya iklim investasi akan mendorong investasi untuk tumbuh menjadi sekitar 12,5-13,9% pada tahun 2013.

Sementara itu, daya saing yang meningkat serta membaiknya permintaan dunia berdampak pada tetap tingginya kinerja ekspor. Ekspor diprediksi akan tumbuh menjadi 12,2-12,6% pada tahun 2013 yang akan diikuti dengan pertumbuhan impor pada kisaran 15,8-16,2% akibat kuatnya permintaan domestik. Kondisi di atas menyebabkan surplus neraca transaksi berjalan (*current account*) akan turun. Namun demikian, tekanan pada neraca transaksi pembayaran ini akan terkompensasi oleh membaiknya neraca transaksi keuangan (*financial account*), sejalan dengan terus masuknya investasi portofolio dan FDI, sehingga secara keseluruhan neraca pembayaran diperkirakan masih akan mencatat surplus. Hal ini pada gilirannya mampu menjaga kestabilan nilai Rupiah.

Perkiraan membaiknya kondisi ekonomi dunia didasari oleh perkembangan harga minyak dunia yang mulai menurun, prospek pertumbuhan AS yang diperkirakan akan kembali membaik, prospek pertumbuhan negara berkembang yang tetap tinggi, dan mulai menurunnya harga komoditas non-migas. Bila perkembangan yang positif ini terus berlanjut, ekonomi dunia diperkirakan akan mulai pulih di tahun 2010 dengan pertumbuhan ekonomi

yang diperkirakan terus meningkat hingga kembali mencapai 5,1% di tahun 2013. Volume perdagangan dunia akan mengikuti lintasan yang searah dengan pertumbuhan ekonomi dunia hingga tumbuh 7,6% di tahun 2013. Sementara itu harga komoditas diperkirakan akan kembali menurun. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi AS yang semakin meningkat dan tekanan inflasi yang semakin tinggi, *Fed Fund Rate* diperkirakan kembali meningkat hingga mencapai 3% pada tahun 2013. Kondisi eksternal yang semakin membaik ini tentunya perlu didukung oleh sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, sektor riil, perdagangan dan industrialisasi.

Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi jangka panjang ini tentunya sangat ditentukan oleh keberhasilan Pemerintah dalam melakukan reformasi struktural dan peningkatan kapasitas kelembagaan seiring dengan adanya sinergi yang semakin baik antara pemerintah dan bank sentral dalam menciptakan stabilitas ekonomi makro dan iklim investasi yang kondusif. Reformasi struktural dan peningkatan kapasitas kelembagaan ini akan mencakup: 1) Penguatan kelembagaan, penyederhanaan perizinan usaha dan pendaftaran tanah; 2) Kelancaran arus barang dan kepastian; dan 3) Perpajakan. Kebijakan tersebut juga perlu didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur agar distribusi barang bisa lebih efisien.

Keberhasilan reformasi struktural diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja,

Tabel 1.1 Proyeksi Ekonomi Indonesia 2008-2013

Proyeksi	2007	2008*	2009*	2010*	2011*	2012*	2013*
Inflasi (%)	6,6	11,5 - 12,5	6,5 - 7,5	4,5 - 6,5	3,5 - 5,5	3,0 - 5,0	2,5 - 4,5
Pertumbuhan PDB (%)	6,3	6,1 - 6,5	6,2 - 6,7	6,0 - 6,8	6,2 - 6,9	6,5 - 7,0	6,7 - 7,2
- Konsumsi Masyarakat (%)	5,0	5,1 - 5,6	5,2 - 5,9	5,2 - 5,6	5,4 - 5,8	5,6 - 6,0	5,7 - 6,1
- Konsumsi Pemerintah (%)	3,9	5,8 - 6,3	12,5 - 13,5	5,3 - 5,7	5,5 - 5,9	5,7 - 6,1	5,9 - 6,3
- Investasi (%)	9,2	12,7 - 13,2	13,6 - 14,6	10,5 - 12,0	11,0 - 12,5	12,0 - 13,5	12,5 - 13,9
- Ekspor Barang & Jasa (%)	8,0	14,6 - 15,1	9,1 - 10,1	10,7 - 11,3	11,3 - 11,7	11,7 - 12,3	12,2 - 12,6
- Impor Barang & Jasa (%)	8,9	16,3 - 16,8	16,4 - 17,4	13,7 - 14,1	14,3 - 14,7	15,1 - 15,5	15,8 - 16,2

Ket. : * Proyeksi Bank Indonesia

penguasaan teknologi, modal fisik serta distribusi yang akan menjadi lebih efektif. Keempat faktor ini akan mendorong peningkatan *Total Factor Productivity* (TFP) sehingga perusahaan mampu menghasilkan output yang lebih tinggi dengan ongkos produksi yang semakin menurun. Hal ini berarti meningkatnya daya saing produk yang akan memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong ekspor.

Sementara itu, kebijakan fiskal diharapkan tetap menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang dengan menerapkan *counter-cyclical policy*. Dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, defisit fiskal diperkirakan semakin menurun diiringi oleh beban utang yang semakin rendah.

Implikasi Kebijakan

Untuk mencapai target inflasi jangka menengah pada level $3,5\% \pm 1\%$ di tahun 2013 serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, diperlukan sinergi kebijakan dan kerja keras Bank Indonesia dan semua elemen masyarakat. Arah kebijakan dimaksud diantaranya:

1. Kebijakan moneter perlu dilakukan secara berhati-hati dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian dunia dan domestik. Untuk itu, akan dilakukan penguatan strategi *Inflation Targeting Framework* (ITF) dengan mempertimbangkan ekspektasi pelaku pasar dalam upaya menjaga stabilitas pasar keuangan, baik global maupun domestik, serta mempertimbangkan konstelasi perekonomian eksternal terkini.
2. Kebijakan fiskal yang saat ini masih bersifat stimulus di tingkat pusat, sebaiknya disertai dengan peningkatan kualitas administrasi keuangan di daerah dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
3. Kebijakan sektor riil mencakup percepatan

pembangunan infrastruktur dan perbaikan institusi pemerintahan yang terkait fungsi-fungsi ekonomi terutama dari sisi penawaran, yang mencakup perbaikan-perbaikan yang terkait investasi (baik perizinan, keamanan dan kepastian usaha), *human capital development* (keterampilan, pendidikan dan kesehatan), efisiensi dan produktivitas produksi, serta distribusi barang dan jasa.

4. Perlu percepatan liberalisasi perdagangan, baik multilateral, regional maupun bilateral, untuk mendorong ekspor dan meningkatkan daya saing di pasar domestik. Liberalisasi perdagangan yang berjalan baik akan menurunkan distorsi pasar sehingga struktur pasar menjadi lebih sehat.
5. Di sisi industri, Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu terus memantau tingkat persaingan usaha sehingga dapat menjaga iklim usaha yang kondusif dengan menjamin kepastian dan kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha.
6. Selain itu, penyusunan suatu skema *grand industry* Indonesia segera perlu diselesaikan, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan industri ke depan. Adapun arah kebijakan industri ke depan diharapkan dapat difokuskan pada produk andalan yang mengedepankan keunggulan kompetitif Indonesia. Hal ini terutama bertujuan untuk meningkatkan *forward linkage* dan *backward linkage* industri yang akan mendorong sinergi antar industri dan meningkatkan daya tahan ekonomi serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.
7. Penguatan peran Kantor Bank Indonesia (KBI) dalam memantau dan menekan inflasi di daerah.

Bab 2: Konstelasi Perekonomian Global dan Domestik

Dinamika perekonomian global masih diwarnai oleh perkembangan yang kurang positif yang dimulai sejak pertengahan 2007. Tekanan inflasi meningkat sementara pertumbuhan ekonomi dunia cenderung melambat yang diikuti dengan turunnya pertumbuhan volume perdagangan dunia. Namun di tengah kondisi ekonomi dunia yang masih bergejolak ini, ekonomi Indonesia masih mampu menggeliat dan melanjutkan tren positifnya, bahkan pada 2007 mampu mencapai pertumbuhan tertingginya dalam satu dasawarsa terakhir (6,3%). Inflasi pada 2007 juga berhasil dikendalikan dan dibawa kembali ke satu digit. Meskipun demikian, kajian lebih detail tentang kondisi ekonomi Indonesia memberikan gambaran yang tidak sepenuhnya positif, sehingga ruang bagi perbaikan ekonomi ke depan masih sangat terbuka.

2.1. Konstelasi Perekonomian Global

Setelah mencapai pertumbuhan tertinggi sejak 1973 pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2007 mulai mengalami perlambatan menjadi 5% (tahun 2006 tumbuh 5,1%). Hingga kuartal pertama 2008, pertumbuhan ekonomi dunia masih melambat menjadi 4,5% (pada kuartal sebelumnya tumbuh 5%). Perlambatan ini terutama dipicu oleh krisis finansial (*sub-prime mortgage*) di AS yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi AS dan dunia tergerus. Harga komoditas, baik migas maupun non-migas yang melambung tinggi juga berkontribusi pada menurunnya pertumbuhan ekonomi negara-negara maju lain. Dari Tabel 2.1

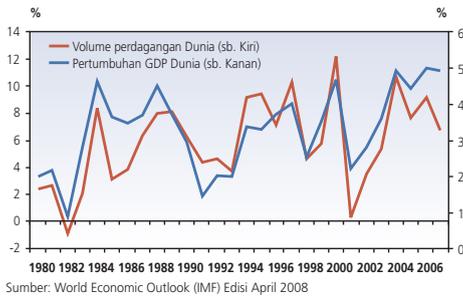
Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia

	2006	2007
Output Dunia	5,1	5,0
Negara-negara Maju	3,0	2,7
Amerika Serikat	2,9	2,2
Euro Area	2,8	2,6
Jerman	2,9	2,5
Perancis	2,2	2,2
Italia	1,8	1,5
Spanyol	3,9	3,8
Jepang	2,4	2,1
Inggris	2,9	3,1
Kanada	3,1	2,7
Negara Maju Lainnya	5,6	5,6

Sumber : World Economic Outlook Update (IMF) Juli 2008

terlihat bahwa hanya Inggris yang tingkat pertumbuhannya pada 2007 lebih tinggi dari tahun 2006. Di negara-negara maju indeks produksi melemah dan sentimen bisnis serta keyakinan konsumen memburuk. Gejala serupa juga mulai terlihat di *emerging markets* yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dunia dan membuat pertumbuhan ekonomi dunia dalam beberapa tahun terakhir selalu berada di atas rata-rata historisnya.

Sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, pertumbuhan volume perdagangan dunia berkontraksi dari 9,18% pada 2006 menjadi 6,78% pada 2007. Sejak 1970, dinamika volume perdagangan dunia selalu menunjukkan hubungan positif yang erat dengan pertumbuhan ekonomi dunia, sehingga perekonomian dunia yang melambat diikuti dengan lesunya volume perdagangan dunia. (Grafik 2.1).



Grafik 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Dunia

Seiring dengan perlambatan ekonomi dunia, tekanan inflasi dunia semakin meningkat. Hal ini terutama didorong oleh tingginya harga minyak dan pangan dunia. Dari sisi kenaikan harga minyak, kombinasi faktor fundamental seperti terbatasnya *spare capacity* dan permintaan yang inelastik, serta faktor nonfundamental seperti memburuknya kondisi geopolitik, mengakibatkan harga minyak tetap tinggi, bahkan pernah menyentuh 145 USD per barrel pada awal Juli 2008. Sementara itu, kenaikan harga bahan makanan dipicu oleh terbatasnya pasokan sebagai dampak perubahan iklim yang mengakibatkan kegagalan panen di sejumlah kawasan dunia. Selain itu, kondisi permintaan juga tetap tinggi terkait dengan beralihnya pengguna BBM ke bahan bakar minyak nabati dan dalam rangka pemenuhan energi biofuel, seperti yang dilakukan oleh beberapa negara produsen pangan seperti AS dan Brazil. Akibatnya, harga pangan global dalam waktu hanya tiga tahun naik dua kali lipat. Berdasarkan laporan tahunan Program Pangan Dunia PBB (UN-WFP), stok pangan dunia mencapai posisi terendah dalam 30 tahun terakhir. Sementara itu, harga jagung dan kedelai masing-masing mencapai rekor dalam 11 dan 35

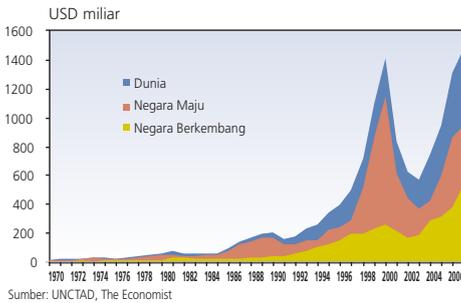
tahun terakhir. Sedangkan stok gandum berada di titik terendah selama 50 tahun terakhir.¹

Negara-negara di dunia dihadapkan pada pilihan kebijakan ekonomi yang dilematis. Di satu sisi tekanan inflasi meningkat namun di sisi yang lain perekonomian dunia sedang melambat. Di AS, respons *The Fed* dalam menghadapi resesi dan tekanan inflasi global adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga kebijakannya hingga menyentuh tingkat 2% (April 2008) atau turun 375 bps dalam waktu 8 bulan. Hingga pertengahan Juli 2008, beberapa negara berupaya mempertahankan suku bunga kebijakannya sebagai upaya menahan tekanan inflasi, antara lain Australia, Inggris, dan Eropa. Sementara di banyak negara *emerging markets* di antaranya Indonesia, Thailand, dan Rumania, bank sentral melakukan kebijakan moneter ketat dengan menaikkan suku bunga.

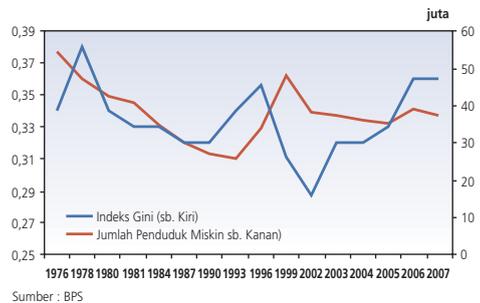
Pola aliran FDI global mengalami pergeseran, dimana peran negara-negara berkembang sebagai penerima aliran masuk FDI semakin meningkat.

Pada periode 1970-2000, sekitar 73% dari aliran masuk FDI global bergerak di sekitar AS dan Eropa dan angka tersebut bahkan sempat mencapai 81% dari total aliran masuk FDI dunia pada 2000. Namun kemudian aliran FDI ke Timur Tengah dan negara-negara dunia ketiga semakin meningkat, terlebih dengan adanya peningkatan harga pangan dan minyak dunia yang menjadi daya tarik investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor tersebut, dan juga dipicu oleh krisis *subprime mortgage*. Pada periode 2001-2007, total aliran masuk FDI ke negara berkembang rata-rata mencapai 31,5%, sementara di negara maju menurun ke tingkat 65% (Grafik 2.2)

¹ Dalam 5 tahun, harga gandum meningkat 63%, beras 61%, dan jagung 45%.



Grafik 2.2 Perkembangan FDI Global

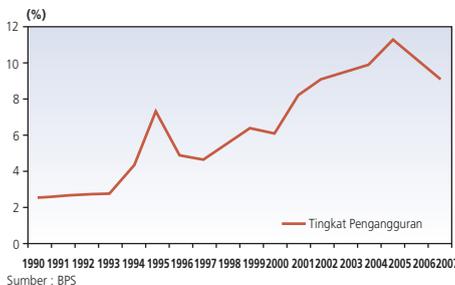


Sumber : BPS

Grafik 2.4 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

2.2. Konstelasi Perekonomian Domestik

Perkembangan perekonomian domestik dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus menunjukkan perbaikan. Ekonomi tumbuh dengan mantap, meskipun sempat sedikit tertahan di 2006, namun kemudian kembali mengalami akselerasi hingga pada akhirnya mampu mencatat pertumbuhan 6,3% pada 2007. Angka pertumbuhan ini merupakan angka pertumbuhan tertinggi pascakrisis. Inflasi yang sempat melejit menjadi dua digit pascakenaikan harga BBM, berhasil ditekan kembali menjadi satu digit yaitu rata-rata 6,4% pada 2007. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, tingkat penyerapan tenaga kerja dalam dua tahun terakhir (2006-2007) melebihi pertumbuhan angkatan kerja, sehingga pada akhirnya berdampak pada turunnya angka pengangguran

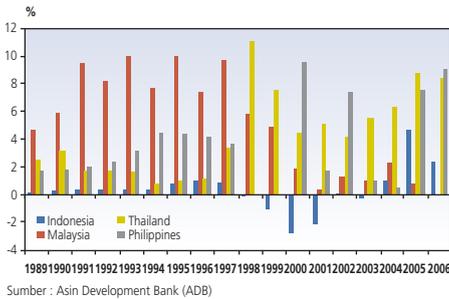


Sumber : BPS

Grafik 2.3 Tingkat Pengangguran di Indonesia

(Grafik 2.3). Sejalan dengan hal ini, jumlah penduduk miskin secara perlahan mulai dapat diturunkan. Penurunan tingkat kemiskinan ini sayangnya belum dibarengi dengan perbaikan dalam pemerataan pendapatan, seperti terlihat dari perkembangan koefisien Gini yang masih berada dalam tren peningkatan (Grafik 2.4).

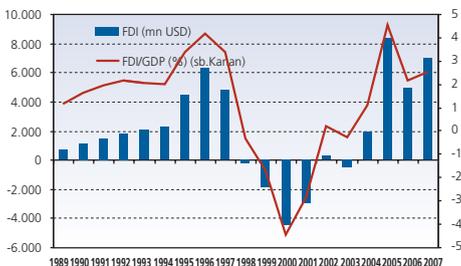
Meskipun secara umum kinerja perekonomian telah membaik, namun sesungguhnya perekonomian domestik masih dibayangi oleh sejumlah permasalahan struktural yang berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Perbaikan struktural memang terus terjadi, namun dalam skala dan kecepatan yang dipandang masih belum memadai untuk mengejar ketertinggalan yang ada. Sebagai akibatnya, tingkat pertumbuhan akumulasi kapital masih belum cukup signifikan, sementara produktivitas tenaga kerja juga cenderung stagnan. Kondisi struktural ekonomi domestik yang belum sepenuhnya terkelola dengan baik diyakini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan relatif kurangnya daya tarik Indonesia dalam menarik aliran masuk FDI, yang merupakan salah satu sumber penting dalam akumulasi kapital. Meskipun sejak 2002 perkembangan aliran masuk FDI ke Indonesia cenderung terus meningkat, namun dibandingkan beberapa negara ASEAN posisi



Grafik 2.5 Perkembangan Rasio FDI terhadap GDP Beberapa Negara ASEAN

Indonesia relatif masih tertinggal (Grafik 2.5 dan 2.6).

Terkendalanya pertumbuhan faktor-faktor produksi dalam perekonomian merupakan gambaran dari kapasitas perekonomian domestik yang masih terbatas. Kurangnya dukungan dari kapasitas perekonomian ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi sulit dipacu tanpa mengganggu keseimbangan internal. Belum teratasinya kendala struktural juga menyebabkan rendahnya daya tahan perekonomian terhadap guncangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini pada akhirnya terrefleksikan dari perkembangan inflasi, yang meskipun telah dapat lebih ditekan, namun secara rata-rata angka inflasi tersebut masih berada pada tingkat yang cukup tinggi dan cenderung tidak stabil.

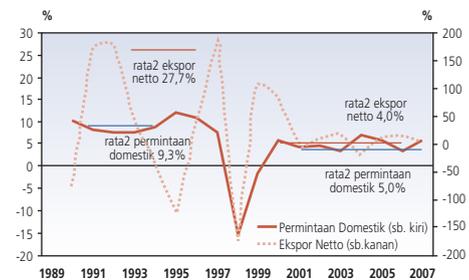


Grafik 2.6 Perkembangan FDI Indonesia

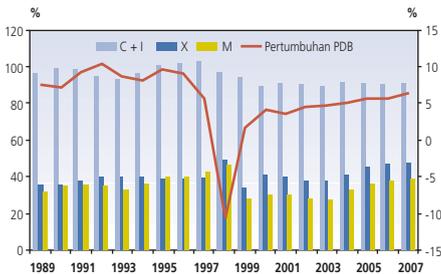
2.2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Nasional

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi pascakrisis lebih didorong oleh permintaan domestik. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan permintaan domestik pascakrisis (2001-2007) yang mencapai sekitar 5%, melebihi rata-rata pertumbuhan ekspor neto yang mencapai 4%. Di sisi lain, *gap* antara permintaan domestik dan ekspor neto pada periode pascakrisis jauh lebih kecil dibandingkan kondisi beberapa tahun sebelum krisis (Grafik 2.7).

Hal ini juga terlihat dari perkembangan pangsa maupun kontribusi komponen terhadap pertumbuhan ekonomi (Grafik 2.8 dan 2.9). Apabila dilihat dari pangasanya, pangsa ekspor pascakrisis secara rata-rata sebenarnya lebih tinggi dari sebelum krisis, namun sayangnya pertumbuhannya masih belum sebaik saat sebelum krisis. Kondisi ini menjadikan kontribusi ekspor pascakrisis masih sedikit lebih rendah dibandingkan prakrisis. Di sisi lain, kontribusi ekspor neto pascakrisis terlihat lebih tinggi dibandingkan prakrisis, namun hal tersebut lebih disebabkan oleh menurunnya kinerja impor. Sementara itu, kondisi permintaan domestik pascakrisis lebih lemah dibandingkan prakrisis, yang terutama bersumber dari lemahnya investasi.



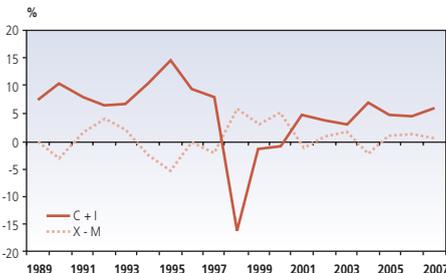
Grafik 2.7 Pertumbuhan Komponen PDB Pra dan Pascakrisis



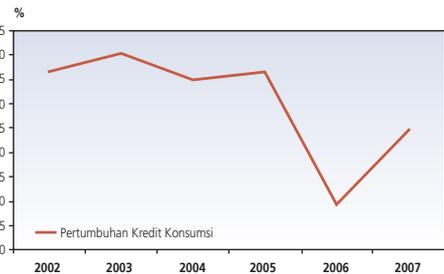
Grafik 2.8 Pangsa Komponen PDB Terhadap Pertumbuhan PDB

Gap antara sumber-sumber pertumbuhan yang makin menyempit di satu sisi menunjukkan struktur ekonomi yang lebih merata, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran. Semakin kecilnya gap antara permintaan domestik dan ekspor neto dapat merupakan indikasi mulai bergesernya peran permintaan domestik sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Hal ini terkait dengan kinerja konsumsi rumah tangga dan pemerintah yang kian meningkat, sementara peningkatan dari investasi dirasa masih terlalu lambat. Peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut juga dibarengi dengan meningkatnya utang konsumen, seperti terindikasi dari kembali melonjaknya pertumbuhan kredit konsumsi (Grafik 2.10).

Sementara itu, di sisi eksternal, prestasi ekspor lebih didominasi oleh peningkatan ekspor



Grafik 2.9 Kontribusi Komponen PDB Terhadap Pertumbuhan PDB



Grafik 2.10 Pertumbuhan Kredit Konsumsi

komoditas berbasis sumber alam. Hal ini terlihat dari angka indeks *Revealed Comparative Advantage* (RCA) beberapa komoditas andalan ekspor Indonesia (Grafik 2.11).²

Berdasarkan indeks RCA, karet dan batubara merupakan komoditas yang daya saingnya mengalami peningkatan. Sementara tekstil, elektronik, dan produk kayu cenderung mengalami penurunan daya saing. Kurang kuatnya kinerja komoditas ekspor berbasis manufaktur ini tidak dapat dilepaskan dari lemahnya dukungan dari kegiatan investasi pada periode pascakrisis.

Dari sisi produksi, kontribusi sektor-sektor yang memiliki pangsa besar terhadap pertumbuhan terus menurun. Perkembangan kinerja dua sektor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan, dalam periode

² RCA (Ballasa, 1965) pada dasarnya mengukur tingkat daya saing perdagangan luar negeri suatu negara yang didasarkan pada market share suatu produk di suatu negara terhadap pasar dunia, dan dirumuskan sebagai berikut:

$$RCA_{ij} = \frac{X_{ij} / X_i}{W_j / W}$$

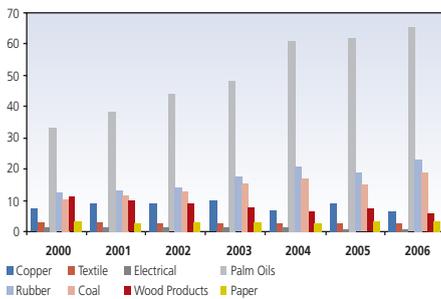
, dimana

RCA_{ij} = RCA barang j dari negara i

X_{ij} = nilai ekspor barang j dari negara i

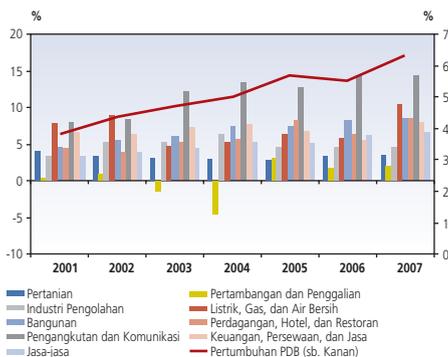
X_i = total ekspor negara i

W_j = total ekspor dunia barang j

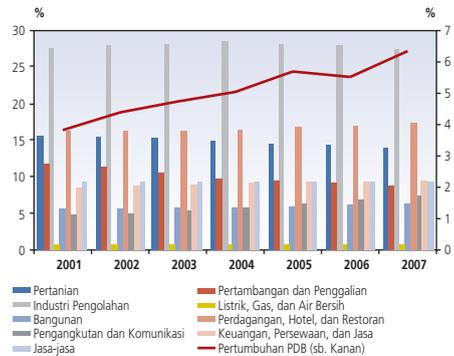


Grafik 2.11 Revealed Comparative Advantage Index / Beberapa Komoditi Andalan Ekspor

pascakrisis (2001-2007) secara umum dapat dikatakan masih terus menurun. Dengan pangsa yang semakin mengecil serta pertumbuhan yang cenderung stagnan (Grafik 2.11 dan 2.13), kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode pascakrisis dapat dikatakan menjadi semakin berkurang (Grafik 2.14). Sebaliknya, perkembangan sektor-sektor tersier khususnya perdagangan, pengangkutan, dan jasa keuangan maupun non-keuangan semakin membaik, seperti tercermin dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.

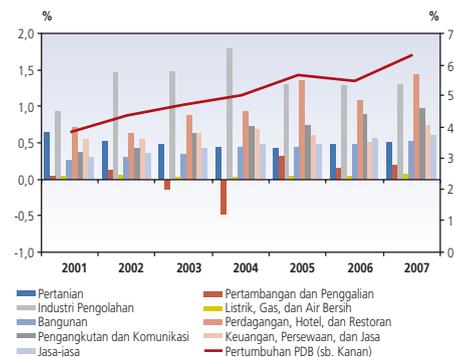


Grafik 2.12 Pertumbuhan PDB dan Pertumbuhan Sektoral



Grafik 2.13 Pertumbuhan PDB dan Pangsa Sektoral

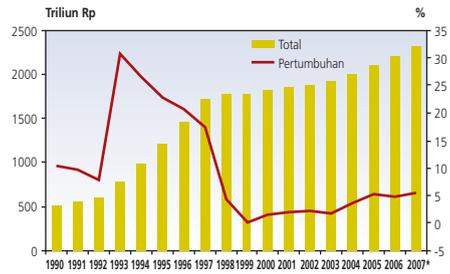
Lemahnya kinerja sektor industri pengolahan, khususnya industri pengolahan nonmigas, tidak dapat dilepaskan dari kondisi permintaan domestik yang terus mengalami tekanan. Dengan karakteristik sektor industri dimana orientasi dari industri-industri yang berskala besar lebih tertuju ke pasar domestik, maka lemahnya permintaan masyarakat jelas akan mempengaruhi kinerja sektor industri secara keseluruhan. Kinerja industri pengolahan nonmigas (manufaktur) pascakrisis yang belum sepenuhnya membaik ini juga tercermin dari nilai produksi maupun nilai tambah produksi yang dihasilkan oleh keseluruhan industri,



Grafik 2.14 Pertumbuhan PDB dan Kontribusi Sektoral

baik industri besar dan sedang, yang secara umum terlihat masih dibawah kondisi prakrisis.³

Kinerja sektor industri pengolahan pascakrisis yang masih belum dapat mengejar kondisi sebelum krisis tidak dapat dilepaskan dari perkembangan faktor produksi, khususnya kapital.⁴ Dengan kinerja investasi yang belum terlalu kuat, rata-rata pertumbuhan akumulasi kapital pascakrisis terlihat jauh lebih rendah dibandingkan kondisi prakrisis (Grafik 2.15), meskipun secara umum telah mengindikasikan adanya perbaikan.⁵ Apabila dilihat dari perkembangan akumulasi kapital secara sektoral, alokasi investasi terbesar terjadi pada sektor jasa, yaitu sektor jasa dan keuangan, dan bukan pada sektor industri pengolahan yang saat ini masih memiliki pangsa terbesar dalam pembentukan PDB. (Grafik 2.16). Jika dilihat dari sisi *backward* maupun *forward linkage*, sebagian besar alokasi investasi (lebih dari 50%) juga tercurah pada sektor yang memiliki *forward linkage* rendah, seperti sektor jasa, pengangkutan, dan jasa keuangan. Selain mempunyai *forward linkage* yang relatif rendah, sektor jasa keuangan juga



Grafik 2.15 Akumulasi Kapital



Grafik 2.16 Alokasi Akumulasi Kapital Sektoral

mempunyai *backward linkage* yang rendah, yang berarti mempunyai efek pengganda penciptaan output yang relatif rendah pula.⁶ Namun demikian, semakin dominannya investasi di sektor jasa menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran yang semakin strategis dalam menopang perekonomian nasional.

Perkembangan tingkat akumulasi kapital yang cenderung masih berjalan di tempat, khususnya di industri pengolahan, juga tidak terlepas dari kondisi sarana dan prasarana pendukung kegiatan produksi yang masih sangat perlu diperbaiki. Dari sisi ketersediaan infrastruktur, Indonesia boleh dikatakan masih

3 Gambaran umum industri manufaktur secara lebih lengkap diuraikan di Bab 3 Organisasi Industri dan Perilaku Pembentukan Harga Produsen di Industri Manufaktur Indonesia.

4 Yang dimaksud kapital adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan produksi, mencakup bangunan, mesin, alat transportasi, dan barang modal lainnya.

5 Konsep yang digunakan dalam analisis ini adalah Net Capital Stock (NCS) yang merupakan akumulasi kapital setelah memperhitungkan depresiasi kapital dengan menggunakan harga konstan tahun 2000. Dapat dinotasikan dengan rumus $NCS = PMTB - \text{" DEP}$, dimana "PMTB = (GCS + " RET) - " DEP, dimana

NCS = Net Capital Stock

PMTB = Pembentukan Modal Tetap Bersih

DEP = Depresiasi

RET = Retirement (Stok yang tidak terpakai lagi)

GCS = Gross Capital Stock

6 Lihat Permata, Meily (2007) "Pertumbuhan Sektoral: Strategi Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas", Laporan Hasil Penelitian

Tabel 2.2 Perbandingan Kondisi Infrastruktur Regional

Kategori	Skor	Posisi
Populasi dengan sanitasi yang baik (%)	55	4 dari 6 di ASEAN
Populasi dengan sumber air bersih (%)	77	7 dari 9 di ASEAN
Jaringan telepon tetap (per 1000 penduduk)	58	6 dari 10 di ASEAN
Pengguna telepon selular (per 1000 penduduk)	213	6 dari 10 di ASEAN
Pengguna internet (per 1000 penduduk)	73	6 dari 10 di ASEAN
Tingkat elektrifikasi (%)	54	7 dari 9 di ASEAN

Sumber : Human Development Report 2007-2008

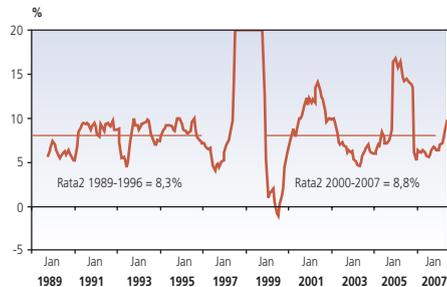
tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga (Tabel 2.2).

Dari berbagai jenis infrastruktur, masalah kelistrikan dirasa sangat mengemuka dalam beberapa tahun terakhir ini. Beberapa permasalahan kelistrikan yang berhasil diidentifikasi antara lain rendahnya daya listrik yang dihasilkan dibandingkan dengan beban puncak, realisasi pembangunan pembangkit yang tidak sesuai dengan rencana, kerusakan transmisi dan distribusi aliran listrik serta terganggunya pasokan bahan bakar. Peran sektor listrik yang vital bagi semua industri menyebabkan permasalahan gangguan pasokan listrik menimbulkan dampak yang besar terhadap aktivitas produksi sektor-sektor lain dalam perekonomian (lihat *Boks Permasalahan dan Dampak Sektor Listrik Terhadap Perekonomian Indonesia*).

Perkembangan rata-rata inflasi pascakrisis (2000-2007) masih lebih tinggi dari kondisi sebelum krisis, disertai dengan tingkat volatilitas inflasi yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini memang tidak dapat dilepaskan dari kuatnya tekanan eksternal, khususnya yang berasal dari bergejolaknya harga minyak dunia sejak 2005. Meskipun demikian, kondisi struktural dalam negeri yang belum sepenuhnya terkelola dengan baik telah berdampak pada berkurangnya kemampuan perekonomian

domestik dalam memitigasi berbagai risiko, baik yang berasal dari domestik maupun eksternal. Hal ini terefleksikan pada perkembangan rata-rata inflasi pascakrisis (2000-2007) yang masih lebih tinggi dari inflasi sebelum krisis. Meskipun dalam tahun 2007 inflasi telah berhasil dibawa kembali menjadi *single digit*, namun volatilitas inflasi pada periode pascakrisis lebih tinggi dari periode sebelum krisis (Grafik 2.17). Volatilitas inflasi yang lebih tinggi ini menunjukkan adanya risiko inflasi yang lebih tinggi di perekonomian sebagai sinyal masih adanya bagian dari struktur ekonomi yang harus diperbaiki.

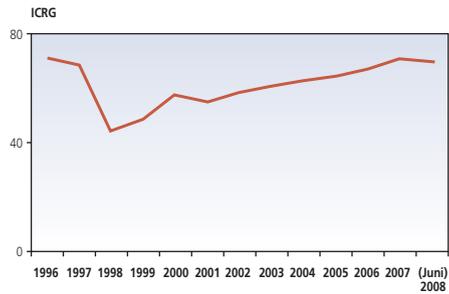
Sulitnya membawa inflasi ke tingkat yang lebih rendah dan stabil mengindikasikan adanya kompleksitas permasalahan yang harus dihadapi dalam upaya disinflasi yang sudah dijalani. Selain berbagai permasalahan mendasar yang bersifat



Grafik 2.17 Perkembangan Inflasi 1989-2007

struktural, yang diantaranya mencakup aspek produktivitas, efisiensi, dan distribusi, proses pembentukan harga sendiri harus dipahami sebagai suatu proses yang cukup kompleks. Hal ini mengingat panjangnya rantai distribusi yang harus dilalui suatu komoditas, dimulai dari tingkat produsen hingga ke tingkat konsumen. Dalam hal ini peran dari organisasi industri beserta struktur pasar di dalamnya menjadi penting untuk dipahami, karena akan berpengaruh pada perilaku pembentukan harga di tingkat produsen. Perilaku produsen dalam pembentukan harga sendiri sangat dipengaruhi oleh karakteristik struktur pasar di industri tersebut. Struktur pasar yang diwarnai dengan persaingan yang ketat misalnya, akan mendorong produsen untuk menetapkan harga jual yang semakin kompetitif. Selain itu, penetapan harga di tingkat produsen juga sangat ditentukan oleh bagaimana perusahaan-perusahaan saling berinteraksi dalam satu industri.⁷

Berbagai indikator dan survei mengkonfirmasi adanya perbaikan kondisi ekonomi Indonesia. Meskipun masih dalam skala dan kecepatan yang dirasa masih kurang, beberapa indikator menunjukkan adanya perbaikan pada iklim kegiatan usaha di Indonesia. Hal ini diantaranya tercermin dari membaiknya persepsi risiko berbisnis di Indonesia, seperti terlihat dalam peringkat indeks risiko yang dikeluarkan *ICRG (International Country Risk Guide)* pada Grafik 2.18. Sampai dengan bulan Juni tahun 2008 angka ICRG komposit untuk Indonesia rata-rata 69,65, di mana terjadi peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu 64 (2005); 67.2 (2006); 69.5 (2007). Angka indeks komposit yang semakin



Sumber: International Country Risk Guide

Grafik 2.18 Indeks Risiko Komposit

tinggi menunjukkan risiko yang semakin rendah atas tiga kriteria risiko yang dianalisis yaitu risiko politik, keuangan dan ekonomi.

Hasil survei lain milik *International Institute Management for Development (IMD)* menyatakan bahwa tahun 2008 daya saing Indonesia mengalami perbaikan dari peringkat 54 pada 2007 menjadi peringkat 51 dari 55 negara. Penilaian daya saing oleh IMD berdasarkan pada empat kategori yaitu kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi dunia usaha, dan infrastruktur. Meski telah mengalami perbaikan, hasil survei ini juga mengkonfirmasi posisi Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara anggota ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina.

Hasil survei *Japan External Trade Organization (JETRO)* tahun 2008⁸ menunjukkan bahwa Indonesia masih dianggap sebagai tempat usaha yang menarik karena memiliki pasar yang besar serta menawarkan biaya produksi yang rendah. Ditinjau dari sisi rendahnya biaya bisnis, Vietnam berada pada peringkat pertama, disusul Cina kemudian Indonesia. Namun survei tersebut juga mengungkapkan bahwa infrastruktur yang kurang tertata dengan baik, sistem hukum yang

⁷ Analisis lebih mendalam tentang struktur pasar dan kaitannya dengan pembentukan harga/ inflasi dapat dilihat pada Bab 3.

⁸ *Japan Attractiveness Survey 2008*, JETRO.

Tabel 2.3 Survei *Doing Business* 2008

Country	Year	Ease of Doing Business Rank	Starting a Business	Dealing with Construction Permits	Employing Workers	Registering Property	Getting Credit	Protecting Investors	Paying Taxes	Trading Across Borders	Enforcing Contracts	Closing a Business
Singapore	2009	1	10	2	1	16	5	2	5	1	14	2
	2008	1	9	5	1	13	5	2	3	1	3	2
Hong Kong, China	2009	4	15	20	20	74	2	3	3	2	1	13
	2008	4	13	61	20	67	2	3	5	3	1	15
Malaysia	2009	20	75	104	48	81	1	4	21	29	59	54
	2008	25	82	106	46	73	1	4	60	24	60	57
Mongolia	2009	58	59	103	71	20	68	24	79	156	38	108
	2008	55	53	109	70	17	61	19	84	149	36	118
Brunei	2009	88	130	72	5	177	109	113	35	42	157	35
	2008	83	119	68	5	177	102	110	29	38	158	38
Vietnam	2009	92	108	67	90	37	43	170	140	67	42	124
	2008	87	101	64	72	38	51	168	131	65	42	124
Papua New Guinea	2009	95	92	124	31	73	131	38	87	89	162	102
	2008	89	80	120	32	71	126	33	85	85	164	100
India	2009	122	121	136	89	105	28	38	169	90	180	140
	2008	120	114	131	89	114	25	33	167	81	180	140
Indonesia	2009	129	171	80	157	107	109	53	116	37	140	139
	2008	127	167	79	160	101	116	49	111	39	140	139
Cambodia	2009	135	169	147	134	108	68	70	24	122	136	181
	2008	150	163	144	133	102	180	66	22	144	135	181
Philippines	2009	140	155	105	126	97	123	126	129	58	114	151
	2008	136	151	102	123	88	116	125	132	58	113	150
Lao PDR	2009	165	92	110	85	159	145	180	113	165	111	181
	2008	162	81	107	84	156	141	179	119	164	112	181
Timor Leste	2009	170	150	100	78	177	178	126	75	79	181	181
	2008	170	146	100	78	177	177	125	68	87	181	181

Sumber: World Bank

kurang terimplementasikan secara sempurna, serta tingginya risiko kurs merupakan faktor yang menghambat minat para investor, terutama yang berasal dari Jepang, dalam melakukan investasi di Indonesia. Sebagian responden juga merasakan hambatan dalam hal ketenagakerjaan, perpajakan, dan masalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Sementara itu, dalam hal menjalankan bisnis, peringkat Indonesia dalam laporan *Doing Business* 2009 mengalami penurunan dari peringkat 127 menjadi 129 dari total 181 negara (Tabel 2.3).⁹ Salah satu faktor yang menyebabkan memburuknya peringkat tersebut terkait dengan meningkatnya persyaratan pemodal minimum untuk memulai

suatu kegiatan usaha (berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas). Meskipun demikian, untuk beberapa kriteria penilaian lain seperti penyederhanaan prosedur dan waktu untuk memulai kegiatan usaha serta kemudahan memperoleh pinjaman, peringkat Indonesia mengalami perbaikan. Hasil survei ini secara umum masih menempatkan Indonesia dibawah beberapa anggota ASEAN lain seperti Singapore, Thailand, Malaysia, dan Vietnam namun lebih baik dibandingkan Filipina, Kamboja, dan Laos.

Selain itu, survei daya saing untuk industri minyak dan gas yang dilakukan oleh *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) menyatakan bahwa terdapat lima hal yang membuat industri minyak dan gas di Indonesia berdaya saing tinggi, yaitu peluang geografis (termasuk akses untuk

9 Sumber: World Bank 2008

Tabel 2.4 Peringkat Daya Saing Oleh IMD

Negara	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
USA			1	1	1	1	1	1
Singapura	3	8	4	2	3	3	2	2
Hongkong	4	13	40	6	2	2	3	3
Taiwan	16	20	17	12	11	17	18	13
China	26	28	29	24	31	18	15	17
Malaysia	28	24	21	16	28	22	23	19
Thailand	34	31	30	29	27	29	33	27
India	42	41	50	34	39	27	27	29
Korea	29	29	37	35	29	32	29	31
Filipina	39	40	49	52	49	42	45	40
Brazil	40	37	52	53	51	44	49	43
Indonesia	46	47	57	58	59	52	54	51
Argentina	45	48	58	59	58	47	51	52
Afrika Selatan			47	49	46	44	50	53
Venezuela	49	46	59	60	60	53	55	55
Negara	49	49	59	60	60	55	55	55

Sumber : International Institute For Management Development (IMD)

melakukan penggalan), kestabilan politik, proses persetujuan kontrak dan proyek, kerangka peraturan, dan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan. Secara umum kepercayaan investor terhadap prospek industri minyak dan gas di Indonesia tetap kuat akibat harga komoditas yang terus meningkat dan pertumbuhan yang signifikan dari kapitalisasi di pasar. Di samping itu, keuntungan dari sektor ini juga terus meningkat seiring harga komoditas yang bergerak naik. Meski menunjukkan perbaikan, namun masih terdapat hal-hal yang dinilai menghambat investasi pada sektor ini yaitu masalah perpajakan dan koordinasi antar-institusi di pemerintah.¹⁰

2.2.2. Perkembangan Kebijakan Sektor Riil dan Ekonomi Makro

Sinergi kebijakan Pemerintah dan otoritas moneter berusaha menjaga stabilitas makro yang

10 Investor Survey of The Indonesian Oil and Gas, Pricewaterhouse Coopers Indonesia, May 2008.

merupakan prasyarat bagi terciptanya pembangunan yang berkesinambungan dan berkualitas. Sebagai kelanjutan dari paket kebijakan ekonomi yang tertuang dalam Inpres No 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah mengeluarkan Inpres No 5 Tahun 2008 tentang

Tabel 2.5 Inpres No 5 Tahun 2008

No.	Kebijakan	Program	Tindakan
1	Perbankan Iklim Investasi	22	43
2	Ekonomi Makro dan Keuangan	23	33
3	Ketahanan Energi	7	14
4	Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pertanian	9	13
5	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	17	30
6	Pelaksanaan Komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN	8	13
7	Infrastruktur	19	31
8	Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	4	6
	Jumlah	109	183

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Fokus Program Ekonomi 2008-2009 tanggal 22 Mei 2008. Pelaksanaan Fokus Program Ekonomi 2008-2009 yang terdiri dari 109 program ekonomi ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga kelestarian sumber daya alam, meningkatkan ketahanan energi dan kualitas lingkungan, dan melaksanakan agenda dalam rangka menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) secara konsisten mengarahkan kebijakannya untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil melalui penerapan *Inflation Targeting Framework (ITF)*. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro terakhir serta arah perkembangan inflasi ke depan, BI Rate dalam 3 bulan terakhir dinaikkan secara bertahap dengan posisi terakhir pada akhir Agustus 2008 berada pada level 9%. Keputusan tersebut dimaksudkan untuk memantapkan stabilitas perekonomian dan sistem keuangan, khususnya untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi dalam jangka menengah sebesar 3,5%.¹¹ Tekanan inflasi yang kuat terutama bersumber dari tingginya gejolak harga minyak dan pangan dunia, serta faktor internal berupa tekanan yang berasal dari permintaan dalam negeri. Guna mengefektifkan kebijakan moneter, naiknya suku bunga kebijakan perlu diiringi dengan optimalisasi dalam penggunaan instrumen kebijakan moneter lainnya seperti pengendalian volatilitas nilai tukar dan penyerapan eksekusi likuiditas melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT). Sebagai salah satu upaya dalam rangka penyempurnaan kerangka operasional kebijakan moneter, maka pada tanggal



Grafik 2.19 BI Rate dan Laju Inflasi

9 Juni 2008 Bank Indonesia telah menetapkan secara resmi suku bunga PUAB O/N sebagai sasaran operasional kebijakan moneter menggantikan rata-rata tertimbang SBI 1 bulan. Dengan upaya ini, maka penggunaan seluruh instrumen OPT yang dimiliki Bank Indonesia akan diarahkan untuk mengelola likuiditas perbankan secara optimal sehingga suku bunga pasar uang (PUAB O/N) dapat bergerak dalam kisaran BI Rate.

Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah untuk memacu pertumbuhan sektor riil sekaligus menjaga sustainabilitas fiskal dan stabilitas ekonomi makro. Strategi kebijakan fiskal yang dijalankan lebih diarahkan untuk memberikan stimulus fiskal dengan tetap memperhatikan langkah-langkah konsolidasi fiskal guna mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*). Stimulus tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk: (i) pemberian insentif perpajakan; (ii) optimalisasi belanja negara untuk sarana dan prasarana pembangunan; (iii) alokasi belanja negara untuk meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah; dan (iv) dukungan pemerintah kepada swasta dalam pembangunan infrastruktur. Berdasarkan pilihan strategi kebijakan ini, arah kebijakan fiskal sejak 2005 secara umum bersifat ekspansif, seperti tercermin dari perkembangan defisit anggaran

11 Target inflasi sebesar 3,5±1% pada 2013 ini ditetapkan pada Forum Strategis (FORSTRA) Bank Indonesia 20-22 Agustus 2008.

Tabel 2.6 Ringkasan APBN Tahun 2005-2007

(Triliun Rupiah)

Uraian	2005 (LKPP)	% thd PDB	2006 (LKPP)	% thd PDB	2007 (LKPP)	% thd PDB
A. Pendapatan Negara dan Hibah	495,2	17,8	638,0	19,1	707,8	17,9
I. Penerimaan Dalam Negeri	493,9	17,7	636,2	19,0	706,1	17,8
1. Perpajakan	347,0	12,5	409,2	12,3	491	12,4
2. PNBP	146,9	5,3	227,0	6,8	215,1	5,4
II. Hibah	1,3	0,0	1,8	0,1	1,7	0,0
B. Belanja Negara	509,6	18,3	667,1	20,0	757,6	19,1
I. Belanja Pemerintah Pusat	361,2	13,0	440,1	13,2	504,6	12,8
II. Transfer ke Daerah	150,5	5,4	226,2	6,8	253,3	6,4
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	(14,4)	(0,5)	(29,1)	(0,9)	(49,8)	(1,3)
D. Pembiayaan	11,1	0,4	29,4	0,9	42,5	1,1
I. Pembiayaan Dalam Negeri	21,4	0,8	56	1,7	66,3	1,7
II. Pembiayaan Luar Negeri	(10,3)	(0,4)	(26,6)	(0,8)	(23,9)	(0,6)
E. Kelebihan/Kekurangan Pembiayaan	(3,3)	(0,1)	0,3	0,0	(7,4)	(0,2)

Sumber : Departemen Keuangan

yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2001-2005 arah kebijakan defisit anggaran Pemerintah dilakukan melalui konsolidasi fiskal yang ditunjukkan oleh defisit dari sebesar 2,4% terhadap PDB pada 2001 menjadi 0,5% pada 2005. Sedangkan pada tahun 2006 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi arah kebijakan defisit mengalami perubahan orientasi menjadi stimulus melalui peningkatan target defisit yaitu sebesar 0,9% terhadap PDB. Kebijakan defisit APBN yang cenderung terus meningkat berlanjut pada tahun 2007 menjadi sebesar 1,3% PDB.

Kebijakan pembiayaan defisit APBN dalam kurun waktu 8 tahun terakhir mengalami pergeseran kebijakan, terutama ditunjukkan oleh tren penggunaan sumber pembiayaan defisit yang dilakukan. Hal tersebut merefleksikan ketersediaan sumber pembiayaan yang semula berasal dari non-utang seperti penjualan aset, privatisasi BUMN menjadi beralih kepada utang. Pembiayaan melalui utang dapat dibedakan atas 2 instrumen yaitu pinjaman luar negeri dan penerbitan surat berharga negara. Pemenuhan terhadap tambahan kebutuhan dari penerbitan surat berharga masih akan tetap difokuskan dari permintaan pasar domestik, walaupun tidak menutup kemungkinan

untuk dilakukan melalui pasar internasional apabila masih diperlukan. Dari jenis instrumen, penerbitan SBN akan dilakukan melalui penerbitan SBN valas, obligasi negara, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan SBSN domestik.

Memasuki 2008, kondisi perekonomian Indonesia dihadapkan pada krisis ekonomi global akibat kenaikan harga minyak dan komoditas di pasar dunia, diikuti dengan krisis di pasar keuangan internasional serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Perekonomian domestik turut merasakan dampak dari kondisi eksternal tersebut sehingga asumsi makro yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebelumnya banyak mengalami perubahan. Dengan kondisi tersebut Pemerintah terdorong untuk melakukan perubahan APBN pada awal triwulan kedua yang mencakup penyesuaian kebijakan alokasi belanja negara. Basis perubahan APBN-P 2008 adalah perubahan asumsi dasar untuk memberikan sinyal yang tepat kepada publik, pelaku pasar, dan investor luar negeri mengenai target ekonomi makro serta kebijakan fiskal 2008 yang lebih realistis dan kredibel. Kondisi perekonomian yang sedang melambat menyebabkan Pemerintah melonggarkan defisit hingga sebesar 1,9%

Table 2.7 Ringkasan APBN Tahun 2008

(Triliun Rupiah)

Uraian	APBN	% Thd PDB	APBN-P	% Thd PDB	Perk. Real	% Thd PDB
A. Pendapatan Negara dan Hibah	781,4	17,4	895,0	20,0	1007,0	21,5
I. Penerimaan Dalam Negeri	779,2	17,4	892,0	19,9	1004,1	21,4
1. Perpajakan	592	13,2	609,2	13,6	641,0	13,7
2. PNBP	187,2	4,2	282,8	6,3	363,1	7,8
II. Hibah	2,1	0,0	2,9	0,1	3,0	0,1
B. Belanja Negara	854,7	19,1	989,5	22,1	1097,6	23,4
I. Belanja Pemerintah Pusat	573,4	12,8	697,1	15,5	804,0	17,2
II. Transfer ke Daerah	281,2	6,3	292,4	6,5	293,6	6,3
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	(73,3)	(1,6)	(94,5)	(2,1)	(90,6)	(1,9)
D. Pembiayaan	73,3	1,6	94,5	2,1	90,6	1,9
I. Pembiayaan Dalam Negeri	90,0	2,0	107,6	2,4	105,6	2,3
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	(16,7)	(0,4)	(13,1)	(0,3)	(15,1)	(0,3)

*) Menggunakan basis perhitungan realisasi 2007
 Sumber : Departemen Keuangan

Table 2.8 Indeks Persepsi Korupsi 2007

Negara	Ranking	Indeks Persepsi Korupsi
New Zealand	1	9,4
Singapura	4	9,3
Hong Kong	14	8,3
USA	20	7,2
Malaysia	43	5,1
Cina	73	3,5
India	75	3,5
Thailand	91	3,3
Viet Nam	127	2,6
Filipina	132	2,5
Indonesia	144	2,3
Myanmar	180	1,4
Jumlah Negara	180	

Sumber : Transparency Internasional (2007)

terhadap PDB. Penetapan defisit akan tetap dijaga pada tingkat yang masih memberikan peluang bagi Pemerintah untuk dapat mempertahankan stabilitas ekonomi makro guna menjaga momentum peningkatan kinerja perekonomian dalam jangka panjang.

Pencapaian sasaran kebijakan fiskal perlu didukung oleh perbaikan dalam **tata kelola pemerintahan (*good governance*)**. Hal ini perlu diwujudkan sebagai salah satu upaya dalam **mendorong kemajuan iklim investasi**. Kurang kondusifnya iklim investasi di Indonesia tidak terlepas dari masalah ekonomi biaya tinggi, yang salah satunya disebabkan tingkat korupsi yang masih tergolong tinggi. Menurut *Transparency International* yang melakukan perhitungan terhadap indeks persepsi korupsi pada sektor publik dari berbagai negara, tingkat korupsi Indonesia untuk tahun 2007 masih berada dalam peringkat 144 dari 180 negara, dengan indeks persepsi korupsi sebesar 2,3.¹² Dibandingkan dengan anggota ASEAN lainnya, Singapura merupakan negara dengan tingkat korupsi yang terendah, sedangkan Myanmar merupakan negara terkorup baik di wilayah ASEAN maupun di dunia.

12 Dengan rentang 0-10, nilai yang mendekati 0 menunjukkan kondisi suatu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi

BOKS: Sektor listrik: Dampak Sektor Kelistrikan terhadap Perekonomian

Dipersiapkan oleh Donni Fajar Anugrah, Tevy Chawwa, dan Yati Kurniati, serta Tim Makro Ekonomi dan Regional

Perkembangan Kelistrikan di Indonesia

Dalam beberapa waktu terakhir, seringkali terjadi gangguan pasokan listrik di beberapa wilayah Indonesia. Berbagai permasalahan yang dihadapi sektor listrik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi isu strategis yang semakin perlu dicermati seiring dengan konsumsi listrik yang meningkat dan perkembangan harga minyak yang makin tinggi. Pasokan listrik yang dirasakan kurang tercukupi juga terkait dengan pertumbuhan investasi di sektor listrik yang tumbuh kurang sepadan dengan pertumbuhan kebutuhan listrik. Keterkaitan sektor listrik yang erat baik ke industri di hulu dan hilir menyebabkan permasalahan gangguan pasokan listrik akan menimbulkan dampak yang besar terhadap aktivitas produksi sektor-sektor lain dalam perekonomian terutama sektor pertambangan dan industri. Disamping itu, sektor listrik merupakan *leading sector for investment* dimana investasi dalam sektor listrik menghasilkan tambahan output yang kedua terbesar dalam perekonomian. Isu strategis kelistrikan juga dilatarbelakangi oleh kekhawatiran mengenai dampak negatif kurangnya pasokan listrik terhadap pertumbuhan investasi di berbagai sektor ekonomi serta dampak buruk terhadap kegiatan ekonomi secara umum.

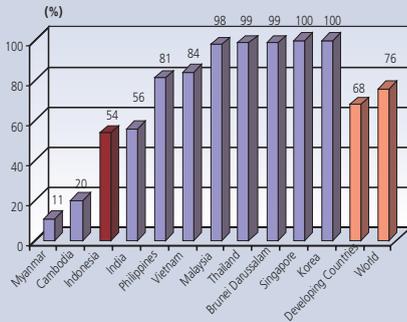
Kondisi Permintaan Listrik

Kondisi kelistrikan Indonesia secara keseluruhan tergolong rendah dengan rasio elektrifikasi¹ sebesar 54,8%, dengan tingkat elektrifikasi tertinggi di Pulau Jawa-Bali yang mengkonsumsi sekitar 83,3% dari total listrik yang didistribusikan oleh PLN. **Dibandingkan negara berkembang lainnya, Indonesia hanya berada di atas Myanmar dan Kamboja.** Rasio elektrifikasi Indonesia masih jauh berada di bawah Thailand (99%), Malaysia (98%), Vietnam (84%) dan Philipina (81%). Sementara itu, hal yang sama juga tercermin pada konsumsi perkapita listrik Indonesia yang juga masih berada di bawah Malaysia, Vietnam, Filipina dan Thailand².

Potensi permintaan listrik di Indonesia relatif masih tinggi, antara lain tercermin dari rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik perkapita yang rendah (485 Kwh). Rasio elektrifikasi, yakni jumlah rumah tangga diseluruh wilayah Indonesia yang tersambung dengan listrik, relatif masih rendah meskipun terus tumbuh dari 8,0% sejak 1980 menjadi 54,0% hingga tahun 2005. Kondisi ini mencerminkan masih banyaknya kebutuhan listrik oleh masyarakat yang belum terpenuhi serta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki sambungan listrik.

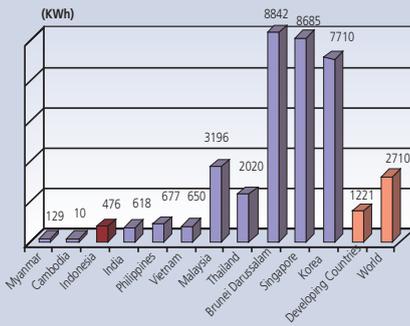
Rasio elektrifikasi terendah tercatat di Papua dan wilayah terpencil lainnya.

- 1 Rasio Elektrifikasi (*Electrification ratio*) mencerminkan seberapa besar cakupan rumah tangga yang telah menerima aliran listrik di suatu negara
- 2 UNDP Human Development Report 2007/2008 (Data bervariasi 2000-2005, data Indonesia adalah data 2005)



Sumber : UNDP Human Development Report 2007/2008³

Grafik 1. Perbandingan *Electrification Ratio*



Grafik 2. Perbandingan Konsumsi Listrik Per Kapita

Tabel 1 *Electrification Ratio* Wilayah Indonesia 2005

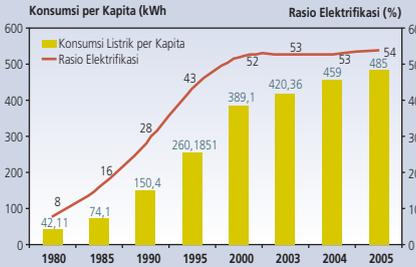
Wilayah	(%)
Jawa-Bali	59,4
Sumatera	53,1
Kalimantan	46,6
Sulawesi	47,2
Lainnya	33,0
INDONESIA	54,87

Sumber : PLN

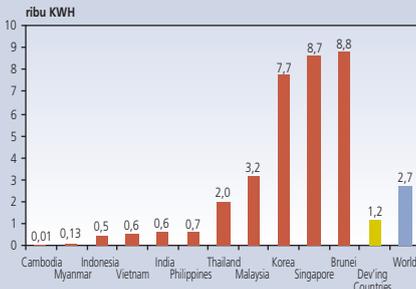
Berdasarkan wilayah kepulauan, rasio elektrifikasi terendah berada di wilayah Papua dan pulau kecil lainnya yang hanya mencapai 38,6% dari total rumah tangga. Konsumsi listrik terendah berada di wilayah Sulawesi yang hanya mencapai 3,3 Twh dengan rasio elektrifikasi mencapai 50,6%. Sementara itu, Jawa-Madura dan Bali memiliki rasio elektrifikasi tertinggi serta konsumsi listrik terbesar. Konsumsi listrik di wilayah tersebut mencapai 83.3 TWh atau ± 500,0%, jauh lebih besar dari pulau lainnya di Indonesia. Hal ini menunjukkan, tingginya aktivitas perekonomian di wilayah Jawa-Madura dan Bali serta besarnya ketergantungan terhadap sektor listrik di wilayah ini.

Konsumsi listrik di Indonesia terus tumbuh tinggi. Secara tahunan, rata-rata konsumsi listrik di seluruh kelompok pengguna tumbuh sebesar 6-8% sejak 2002. Pertumbuhan konsumsi yang tinggi ini terjadi pada semua kategori pelanggan yaitu pelanggan listrik bisnis, industri, dan rumah tangga (Grafik 5). Apabila dilihat lebih detail, beban puncak konsumsi listrik terutama terjadi pada pukul 17.30-21.00 setiap harinya. Konsumsi yang tinggi ini terutama bersumber dari peningkatan konsumsi rumah tangga. Dilihat berdasarkan wilayah, pola beban penggunaan listrik di wilayah Jawa Bali berbeda dengan wilayah lainnya. Beban harian di Jawa-Bali, meskipun meningkat pada saat jam beban puncak, sudah cukup tinggi pada jam-jam sebelum dan sesudah jam beban puncak. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi listrik di wilayah ini

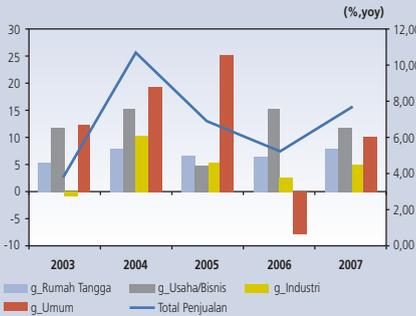
3 Data bervariasi 2000-2005, data Indonesia adalah data 2005



Grafik 3. Perkembangan Rasio Elektrifikasi



Grafik 4. Perbandingan Listrik Per Kapita di Indonesia

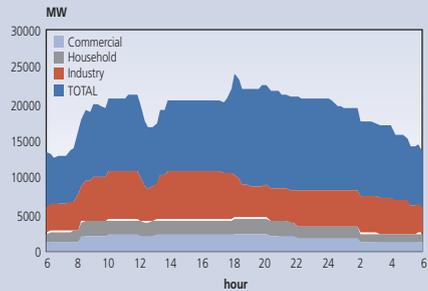


Grafik 5. Pertumbuhan Konsumsi Listrik di Indonesia

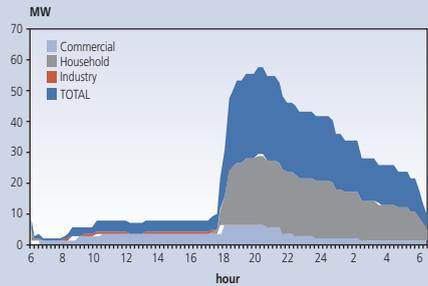
terdistribusi secara merata untuk sektor industri, bisnis, dan rumah tangga sehingga beban penggunaannya cenderung merata (Grafik 6). Sementara itu, untuk wilayah di luar Jawa-Bali, beban harian yang tinggi terutama didorong oleh peningkatan

konsumsi listrik yang tinggi oleh kelompok rumah tangga (Grafik 7).

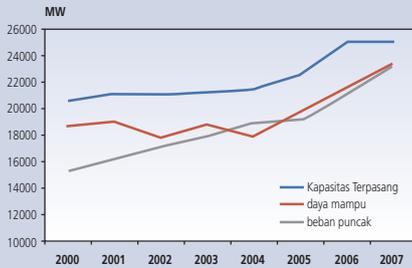
Dari sisi supply, pengadaan tenaga listrik di Indonesia saat ini didominasi oleh PLN sebesar 24.887 MW (85,6%) dari total kapasitas terpasang sebesar 29.000 MW. Sedangkan pembangkit swasta menyumbang sebesar 3.450 MW (11,9%), dan perusahaan listrik terintegrasi (PPU) sebesar 743 MW (2,5%). Pembangkit-pembangkit daya tersebut terhimpun dalam jaringan interkoneksi Jawa-Madura-Bali dan Sumatera, serta pembangkit-pembangkit yang terisolir. Meskipun kapasitas terpasang terus meningkat namun daya mampu listrik



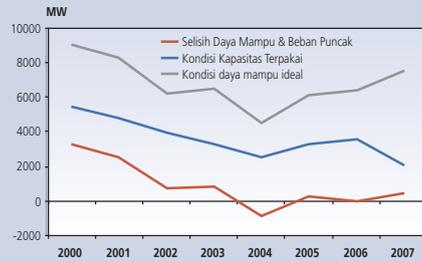
Grafik 6. Rata-rata Beban Harian Listrik Jawa Bali



Grafik 7. Rata-rata Beban Harian Listrik Luar Jawa Bali



Grafik 8. Perkembangan Kapasitas Terpasang, Beban Mampu dan Beban Puncak



Grafik 9. Kondisi Kelistrikan Aktual vs Ideal



Diagram 1 Permasalahan Penyediaan Listrik

lebih rendah dari peningkatan beban puncak sejak tahun 2004 (Grafik 8). Selain perlambatan pertumbuhan kapasitas, kondisi ini disebabkan juga oleh terbatasnya kapasitas terpasang yang dapat dipergunakan seiring dengan tingginya susut jaringan, kebutuhan pemeliharaan, dan keterbatasan sumber

pembangkit. Kondisi kelistrikan di Indonesia masih berada di bawah kondisi ideal kelistrikan yang seharusnya memiliki daya mampu cadangan 30% lebih besar dari beban puncak (Grafik 9). Dalam kondisi saat ini, setiap gangguan pasokan dan jaringan listrik akan berdampak pada pemadaman listrik secara bergiliran di beberapa wilayah Indonesia dan menimbulkan gangguan terhadap sektor-sektor yang menjadi pengguna listrik (Tabel 2).

Tabel 2. Permasalahan PLN yang berdampak Pada Pemadaman

Tahun	Permasalahan
2004	Daya mampu < Beban Puncak
2005	Kerusakan jaringan transmisi (SUTET) 500 KV Jawa-Bali.
2006	Daya mampu < Beban Puncak
2007	Daya mampu = Beban Puncak (kondisi normal)
2008	Cuaca Buruk mengganggu Distribusi Pasokan

Kondisi Pasokan Listrik dan Rencana Pembangunan Sektor Listrik **Kebutuhan sumber energi pembangkit listrik yang tinggi sebagian besar dipenuhi oleh fuel oil.**

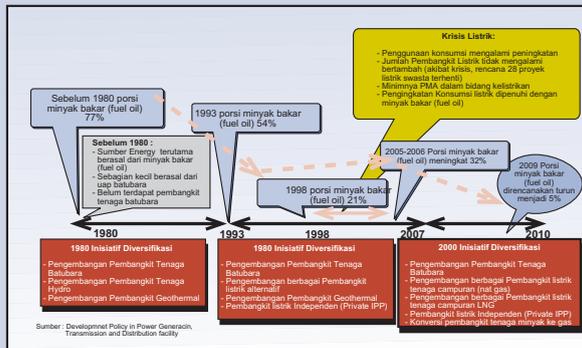
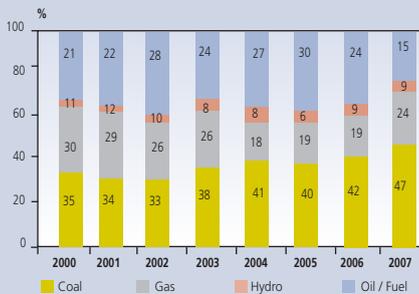


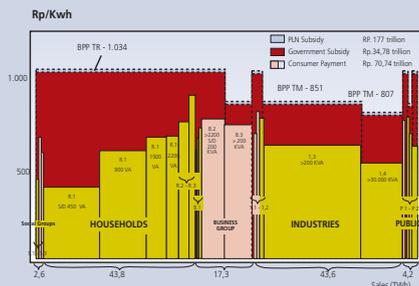
Diagram 2 Historis dan Rencana Pembangkit Listrik di Indonesia (1980-2010)

Akibatnya, porsi penggunaan minyak bakar (*fuel oil*) mengalami peningkatan seiring dengan lonjakan konsumsi listrik sejak tahun 1997. Selain itu, terganggunya upaya diversifikasi sumber daya listrik juga disebabkan oleh terhentinya pembangunan pembangkit listrik swasta akibat krisis ekonomi tahun 1998. Porsi penggunaan minyak bakar yang sempat menurun menjadi 21,0% pada awal tahun 1997 kembali meningkat hingga mencapai 32,0% pada tahun 2006 (Diagram 2).

Penggunaan minyak bakar (*fuel oil*) sebagai pembangkit listrik terus dikurangi. Sejak tahun 1980, Pemerintah Indonesia

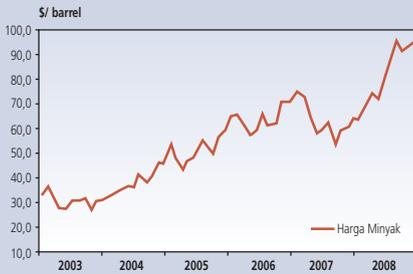


Grafik 10. Komposisi Sumber Pembangkit Listrik



Grafik 11. Perkembangan Harga Minyak Bumi

terus berusaha mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga minyak bakar (*fuel oil*). Porsi *fuel oil* terhadap total pembangkit listrik di Indonesia adalah sebesar 77%. Diversifikasi pembangkit listrik tersebut terutama difokuskan pada penyediaan pembangkit tenaga batubara dan tenaga *hydro*. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1993 diversifikasi sumber tenaga listrik tersebut mulai menunjukkan peningkatan yang tercermin pada berkurangnya porsi bahan minyak menjadi 54% dan mulai berdirinya pembangkit listrik swasta/independen meskipun proporsinya kecil.



Grafik 12. Perkembangan Harga Minyak Bumi

Pemerintah dan PLN telah mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka

memenuhi pertumbuhan kebutuhan konsumsi listrik rumah tangga serta untuk mencapai target tingkat elektrifikasi Indonesia 100% pada tahun 2020.⁴

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PLN memperkirakan keperluan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 16.167 MW dengan total investasi sebesar US\$15.670 juta (skenario normal) atau dengan skenario rendah dibutuhkan tambahan kapasitas sebesar 15.067 MW dengan kebutuhan investasi sebesar US\$14.770 juta.

Tabel 3 Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik 2006-2010

Uraian	Satuan	2006	2007	2008	2009	2010
Energy Sales	GWh					
Jawa Bali		87.051	93.144	99.665	106.641	114.106
Luar Jawa		22.704	25.120	27.917	31.254	34.996
Indonesia		109.755	118.264	127.582	137.895	149.102
	%	3,1	7,8	7,9	8,1	8,1
Produksi	GWh					
Jawa Bali		99.829	106.817	114.294	122.295	130.855
Luar Jawa		25.455	28.049	31.051	34.654	38.716
Indonesia		125.284	134.866	145.345	156.949	169.571
Beban Puncak	MW					
Jawa Bali		15.400	16.478	17.631	18.866	20.186
Luar Jawa		4.873	5.348	5.873	6.521	7.221
Indonesia		20.273	21.826	23.504	25.387	27.407
Jumlah Pelanggan	10 ^{^3}					
Jawa Bali		24.366	25.491	26.760	28.182	29.691
Luar Jawa		11.564	12.189	12.906	13.727	14.599
Indonesia		35.931	37.680	39.666	41.909	44.290

Sumber : RUPTL 2006 - 2015 PLN ⁵

4 Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas dituangkan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2006 – 2026 (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Listrik Tahun 2006 - 2015 (RUPTL) PLN

5 Proyeksi kebutuhan tahun 2005-2007 belum terpenuhi akibat berbagai kendala

**Tabel 4. Proyeksi Kebutuhan Investasi
Skenario Normal (juta USD)**

Tahun	Pembangkit	T/L	GL	Distribusi	Total
2006	0	445	225	385	1.055
2007	60	299	347	442	1.148
2008	670	409	363	483	1.925
2009	3.926	1002	451	552	5.931
2010	3.685	1004	380	542	5.611
Jumlah	8.341	3.159	1.766	2.404	15.670

Sumber : RUPTL 2006 - 2015 PLN

Skenario Rendah (juta USD)

Tahun	Pembangkit	T/L	GL	Distribusi	Total
2006	0	445	222	385	1.052
2007	60	299	334	442	1.135
2008	670	409	353	483	1.915
2009	3.071	1002	440	552	5.605
2010	3.685	1004	372	542	5.603
Jumlah	7.486	3.159	1.721	2.404	14.770

Sumber : RUPTL 2006 - 2015 PLN

**Tabel 5. Proyeksi Tambahan Kapasitas Pembangkit
Skenario Normal (MW)**

Uraian	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	Jumlah
Luar Jawa						
PLTA	292	120	49		180	641
PLTD		20	79	8	10	116
PLTG	80	338	173	279	35	905
PLTGU		190	150	4	161	505
PLTM		8	39	2	5	54
PLTP		26	30	5	250	311
PLTU	180	100	1.528	1.393	864	4.065
Sub-Jumlah	552	803	2.047	1.691	1.505	6.597
Jawa-Bali						
PLTG	0	0	0	0	0	0
PLTGU	740	50	0	0	0	790
LPTP	0	110	0	170	190	470
PLTU	1.920	0	0	3.430	2.960	8.310
Sub-Jumlah	2.660	160	0	3.600	3.150	9.570
Jumlah	3.212	963	2.047	5.291	4.655	16.167

Sumber : RUPTL 2006 - 2015 PLN

Skenario Rendah ⁶ (MW)

Uraian	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	Jumlah
Luar Jawa						
PLTA	292	120	49		180	641
PLTD		20	79	8	10	116
PLTG	80	338	173	279	35	905
PLTGU		190	150	4	161	505
PLTM		8	39	2	5	54
PLTP		26	30	5	250	311
PLTU	180	100	100	1.293	764	3.865
Sub-Jumlah	552	803	803	2.047	1.405	6.397
Jawa-Bali						
PLTG	0	0	0	0	0	0
PLTGU	740	50	0	0	0	790
LPTP	0	110	0	170	190	470
PLTU	1.920	0	0	2.530	2.960	7.410
Sub-Jumlah	2.660	160	0	2.700	3.150	8.670
Jumlah	3.212	963	2.047	4.291	4.555	15.067

Sumber : RUPTL 2006 - 2015 PLN

Dampak Sektor Listrik terhadap Perekonomian

Berdasarkan pengolahan tabel input output, dapat diketahui keterkaitan sektor listrik dengan sektor lainnya.⁷

Sektor listrik memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) yang tinggi dengan sektor pertambangan migas dan non-migas sebagai sektor pemberi input utama.

- 6 Mempertimbangkan penerapan Program *Demand Side Management* PLN yang dimaksudkan untuk mengendalikan pertumbuhan permintaan tenaga listrik, dengan cara mengendalikan beban puncak, pembatasan sementara sambungan baru terutama di daerah kritis, dan melakukan langkah-langkah efisiensi lainnya di sisi konsumen seperti rencana disintensif tarif dan sebagainya
- 7 Dalam pengolahannya, karena tidak terdapat pemisahan subsektor secara detail dalam Tabel Input Output maka sektor listrik yang digunakan sebenarnya meliputi sektor listrik, air dan gas.

Penambahan 1 unit permintaan akhir di sektor listrik akan meningkatkan output di sektor pertambangan migas dan *refinery* sebesar 0,395 unit. Hal ini terjadi terkait dengan tingginya ketergantungan sektor listrik terhadap bahan

Tabel 6. Koefisien Input Sektor Listrik

Negara	Ranking	Indeks Persepsi Korupsi
New Zealand	1	9,4
Singapura	4	9,3
Hong Kong	14	8,3
USA	20	7,2
Malaysia	43	5,1
Cina	73	3,5
India	75	3,5
Thailand	91	3,3
Viet Nam	127	2,6
Filipina	132	2,5
Indonesia	144	2,3
Myanmar	180	1,4
Jumlah Negara	180	

baku dari sektor pertambangan berupa BBM dan batubara. Secara total, indeks *backward linkage* sektor listrik terhadap output seluruh sektor perekonomian adalah 1,89 yang berarti penambahan 1 unit permintaan akhir di sektor listrik akan berdampak pada peningkatan output sektor-sektor lain yang berperan sebagai pemberi input terhadap sektor listrik sebesar 1,89 unit. Nilai indeks setelah dinormalisasi sebesar 1,15 (lebih besar dari 1) menunjukkan bahwa sektor listrik memegang peranan penting dalam mempengaruhi output sektor-sektor lain dalam perekonomian (Tabel 7).

Sektor listrik memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) terbesar terhadap berbagai sub-sektor industri, terutama industri semen, tekstil, logam, dan kertas. Penambahan 1 unit permintaan akhir di sektor listrik akan meningkatkan output sektor industri semen sebesar 0,062 unit dan meningkatkan output sektor industri tekstil sebesar 0,048 unit. Hal ini menunjukkan ketergantungan sektor industri terhadap sektor listrik sebagai sumber energi dalam proses produksi. Sebagai gambaran, industri semen melakukan produksi selama 24 jam dalam 1 hari dan untuk itu kontinuitas pasokan listrik menjadi sangat penting. Secara total, indeks *forward linkage* sektor listrik cukup tinggi yaitu sebesar 1,663, yang berarti peningkatan 1 unit permintaan akhir di sektor ini akan meningkatkan output sektor-sektor lain yang menggunakan listrik sebesar 1,663 unit. Nilai indeks setelah dinormalisasi sebesar 1,012 (lebih besar dari 1) menguatkan penjelasan bahwa sektor

listrik berperan penting dalam mempengaruhi output sektor-sektor lain dalam perekonomian (Tabel 7).⁸

Dampak Penurunan Daya Mampu Listrik dan Investasi Kelistrikan

Dengan menggunakan analisis I-O 2005, serta menggunakan metode perhitungan efek perubahan permintaan akhir terhadap output dan rasio nilai tambah terhadap output. Penurunan 10% daya mampu listrik yang tercermin pada penurunan permintaan akhir memiliki dampak penurunan terhadap total output sebesar 0,16 % serta PDB sebesar 0,08%.

Multiplier Investasi Sektor Listrik

Sektor Listrik merupakan *leading* sektor dalam perekonomian dengan **multiplier investasi yang besar (2,73)**.⁹ Hal ini berarti setiap peningkatan investasi di sektor listrik sebesar Rp1 milyar akan menghasilkan peningkatan PDB sebesar Rp2,73 milyar. Dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, sektor listrik memiliki *multiplier* investasi kedua terbesar dalam perekonomian setelah sektor industri makanan dan minuman (Tabel 8). Hal ini menunjukkan pentingnya investasi di sektor listrik dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Apabila realisasi penambahan investasi di sektor listrik pada tahun 2008 sesuai dengan

8 *Multiplier* investasi menggambarkan seberapa besar peningkatan nilai tambah perekonomian secara keseluruhan (Produk Domestik Bruto total) yang terjadi sebagai akibat dari adanya tambahan investasi di suatu sektor. Metode perhitungan multiplier mengikuti pendekatan Cuihong (2000).

Tabel 7. Backward dan Forward Linkage Sektor Listrik

No	Sektor	Backward Linkage	No	Sektor	Forward Linkage
1	Sektor Listrik, Gas & Air Minum	1.182	1	Sektor Listrik, Gas & Air Minum	1.182
2	Sektor Pertambangan, Migas dan Refinery	0.395	2	Industri Semen dan Galian Bukan Logam	0.062
3	Sektor Pertambangan (Non Migas)	0.087	3	Industri Pemintalan, Tekstil, Kulit, dan Pakaian	0.048
4	Sektor Jasa Keuangan	0.051	4	Industri Lainnya	0.045
5	Sektor Perdagangan	0.050	5	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	0.040
6	Industri Mesin, Mesin Listrik	0.027	6	Industri Kertas dan Produk Kertas	0.033
7	Sektor Pengangkutan	0.021	7	Sektor Perdagangan	0.027
8	Industri Produk Kimia	0.020	8	Industri Produk Kayu	0.022
9	Sektor Bangunan	0.016	9	Sektor Pemerintahan Umum	0.020
10	Sektor Lainnya	0.011	10	Industri Barang dari Karet	0.020
11	Industri Kertas dan Produk Kertas	0.006	11	Industri Mesin, Mesin Listrik	0.019
12	Sektor Komunikasi	0.004	12	Sektor Lainnya	0.019
13	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	0.003	13	Sektor Komunikasi	0.018
14	Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan	0.003	14	Sektor Pengangkutan	0.017
15	Sektor Restoran dan Hotel	0.003	15	Industri Alat Pengangkutan	0.016
16	Industri Barang dari Karet	0.002	16	Sektor Bangunan	0.014
17	Industri Makanan dan Minuman	0.002	17	Industri Produk Kimia	0.013
18	Industri Semen dan Galian Bukan Logam	0.001	18	Sektor Jasa Keuangan	0.012
19	Industri Pemintalan, Tekstil, Kulit, dan Pakaian	0.001	19	Sektor Restoran dan Hotel	0.011
20	Industri Alat Pengangkutan	0.001	20	Industri Makanan dan Minuman	0.009
21	Industri Produk Kayu	0.001	21	Industri Rokok	0.007
22	Sektor Pemerintahan Umum	0.000	22	Sektor Pertambangan (Non Migas)	0.005
23	Industri Lainnya	0.000	23	Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan	0.003
24	Industri Rokok	0.000	24	Sektor Pertambangan, Migas dan Refinery	0.000
	Backward Linkage Sektor Listrik	1.890		Forward Linkage Sektor Listrik	1.663
	Backward Linkage Sektor Listrik (normalized)	1.150		Forward Linkage Sektor Listrik (normalized)	1.012

Sumber : Tabel Input Output 2005, diolah¹⁰

rencana investasi PLN yang tercantum dalam RUPTL 2006 – 2015 yaitu sebesar USD1.925 juta, maka dengan *multiplier* investasi sebesar 2,728, dapat disimulasikan perkiraan terjadinya penambahan output di berbagai sektor sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi riil sebesar 1,19%. Dengan kata lain, pada tahun 2008 peningkatan investasi di sektor listrik sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara total sebesar 0,02%.

10 Dilakukan agregasi dari 66 sektor menjadi 24 sektor Tabel Input Output 2005 (Atas Dasar Harga Produsen Domestik)

Penutup

Rendahnya rasio elektrifikasi di Indonesia mengindikasikan besarnya potensi peningkatan permintaan listrik ke depan. Disisi lain, hingga saat ini, rendahnya peningkatan kapasitas listrik serta terbatasnya daya mampu untuk memenuhi kebutuhan beban puncak listrik mengakibatkan kondisi kelistrikan di Indonesia semakin rawan terhadap gangguan sehingga berdampak terhadap output sektor-sektor lainnya terutama sektor pertambangan serta sektor industri yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Potensi terjadinya permasalahan dalam

Tabel 8. *Multiplier* Investasi

No	Sektor	Multi Investasi
1	Industri Makanan dan Minuman	3.025
2	Sektor Listrik, Gas & Air Minum	2.728
3	Industri Barang dari Karet	2.575
4	Industri Logam dasar besi dan baja	2.352
5	Sektor Bangunan	2.235
6	Industri Produk Kimia	2.215
7	Industri lainnya	2.182
8	Industri Pemintalan, Textile, Kulit & Pakaian	2.118
9	Sektor Restaurants & hotels	2.075
10	Industri Produk Kayu	2.066
11	Industri Kertas dan Produk Kertas	2.065
12	Sektor Pengangkutan	2.000
13	Industri Semen dan galian bukan logam	1.857
14	Industri mesin, mesin listrik, alat2&plkgpn listrik	1.745
15	Industri alat pengangkutan	1.663
16	Sektor Lainnya	1.599
17	Sektor Pemerintahan umum dan pertahanan	1.514
18	Industri Rokok	1.419
19	Sektor Perdagangan	1.404
20	Sektor Jasa Keuangan, sewa & <i>business services</i>	1.346
21	Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	1.289
22	Sektor Pertambangan (non migas)	1.246
23	Sektor Komunikasi	1.201
24	Sektor pertambangan migas dan refinery	1.177

penyediaan listrik di Indonesia di masa yang akan datang akibat hambatan dari sisi teknis maupun finansial perlu segera ditanggulangi antara lain melalui peningkatan investasi di sektor tersebut yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan dalam penyediaan listrik di Indonesia di masa yang akan datang. Realisasi investasi di sektor listrik urgen untuk segera dilakukan dimana perlu didukung oleh kebijakan dan kerjasama antara pemerintah, perbankan, pasar modal dan swasta khususnya untuk menanggulangi permasalahan *financing* investasi dimaksud.

halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 3: Organisasi Industri Dan Perilaku Pembentukan Harga Produsen di Industri Manufaktur Indonesia

Sesuai dengan amanah Undang Undang No.23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.4 tahun 2003 tentang Bank Indonesia, tugas utama Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah.¹ Data historis perkembangan inflasi di Indonesia selama ini menunjukkan besarnya tantangan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir (1980-2007), rata-rata inflasi Indonesia tercatat hampir mendekati angka 10%. Sulitnya membawa inflasi Indonesia ke tingkat yang lebih rendah mengindikasikan adanya permasalahan yang lebih mendasar dalam fenomena inflasi di Indonesia, yang antara lain mencakup aspek-aspek seperti produktivitas, efisiensi, distribusi, termasuk juga permasalahan yang terkait dengan organisasi industri beserta struktur pasar di dalamnya.

Terkait dengan upaya memahami fenomena inflasi di Indonesia ini, Bank Indonesia melalui berbagai penelitian telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi pergerakan inflasi seperti nilai tukar, *output gap*, dan ekspektasi inflasi. Sementara itu, penelitian yang mengkaitkan fenomena inflasi dengan kinerja sektor industri masih belum banyak dilakukan. Dalam konteks organisasi industri, yang dapat dijadikan ukuran kinerja industri diantaranya adalah tingkat profitabilitas, penjualan, harga,

maupun efisiensi. Upaya memahami fenomena inflasi dari sisi penawaran menjadi sangat relevan mengingat bahwa harga yang harus dibayar di tingkat konsumen tentunya tidak dapat dilepaskan dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen. Harga yang terbentuk di tingkat produsen sendiri sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut berfungsi dalam struktur pasar di industri tersebut. Struktur pasar yang diwarnai dengan persaingan yang ketat misalnya, akan mendorong produsen untuk menetapkan harga jual yang semakin kompetitif. Selain dipengaruhi oleh struktur pasar, penetapan harga di tingkat produsen juga sangat ditentukan oleh bagaimana perusahaan-perusahaan saling berinteraksi dalam satu industri. Pilihan strategi interaksi yang bersifat kooperatif misalnya, dapat melahirkan praktik-praktik seperti kartel, sindikasi, maupun pengaturan harga, yang pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan yang terlibat di dalamnya.

Dalam mata rantai arus perpindahan barang dari tingkat produsen hingga ke konsumen akhir, harga yang terbentuk di tingkat produsen tentu saja belum dapat sepenuhnya menerangkan dinamika harga di tingkat konsumen. Hal ini mengingat cukup panjangnya mata rantai dari produsen sampai ke konsumen akhir (Diagram 1). Panjang pendeknya jalur distribusi memang sangat tergantung dari keadaan maupun jenis komoditas yang diperdagangkan. Untuk Indonesia, jalur distribusi untuk barang manufaktur umumnya sudah terstruktur cukup baik. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan perdagangan eceran

1 Kestabilan nilai rupiah dapat ditinjau dari dua sisi yakni kestabilan terhadap mata uang negara lain (nilai tukar) dan kestabilan terhadap harga barang dan jasa. Setelah Bank Indonesia menerapkan *free floating exchange rate system* pada tahun 1998, maka pencapaian kestabilan nilai rupiah difokuskan kepada harga barang dan jasa atau pencapaian inflasi yang rendah.

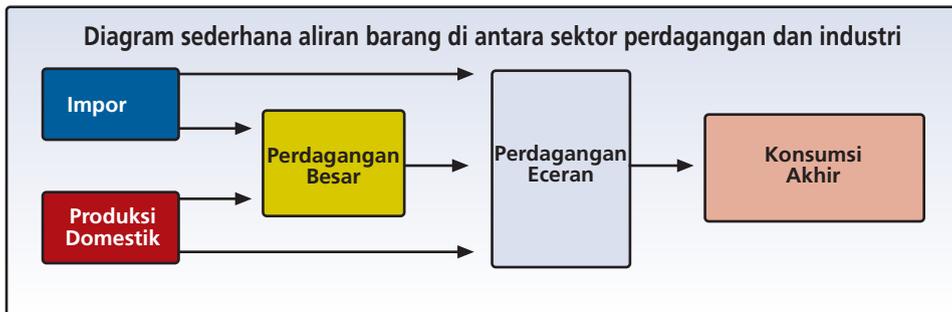


Diagram 3.1 Diagram Sederhana Arus Barang

(*retail*) sebagai salah satu mata rantai dalam distribusi barang telah berkembang sangat marak dan dapat dikatakan telah menjelma menjadi suatu industri tersendiri. Sementara itu, distribusi untuk produk pertanian khususnya untuk produk pertanian segar, masih belum terstruktur dengan baik sehingga sering menimbulkan distorsi harga.²

Menyadari kompleksnya proses pembentukan harga dari tingkat produsen sampai ke tingkat konsumen akhir, maka kajian ini hanya akan difokuskan pada perilaku pembentukan harga di tingkat produsen. Selain itu, fokus kajian juga dipilih pada industri manufaktur. Kelompok industri manufaktur dipilih dengan pertimbangan cukup besarnya bobot barang industri manufaktur (sekitar 70%) dalam keranjang IHK yang digunakan dalam perhitungan inflasi.

Kajian ini menggunakan paradigma struktur-perilaku-kinerja (*structure-conduct-performance*) yang lazim digunakan untuk menganalisis hubungan antara struktur pasar dengan kinerja suatu industri. Fokus dari kajian adalah mencoba memperjelas kinerja sektor industri terkait dengan kondisi yang terdapat dalam struktur pasar.³ Dalam hal ini, ukuran yang biasa digunakan untuk menilai

kinerja industri adalah *price-cost margin* (PCM) atau yang lebih dikenal sebagai *mark-up ratio*. Kajian ini mencoba menganalisis perilaku *mark-up ratio* dikaitkan dengan kondisi siklus bisnis yang terjadi. Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mendeteksi kaitan antara perilaku produsen dalam pembentukan harga dengan dinamika inflasi yang terjadi. *Mark-up ratio* yang bersifat *pro-cyclical* misalnya, menunjukkan bahwa perilaku produsen dalam penetapan harga patut diduga merupakan salah satu penyebab peningkatan inflasi.

3.1. Gambaran Umum Industri Manufaktur di Indonesia

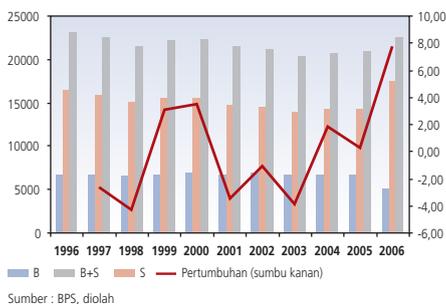
Dalam kurun waktu 1996-2006 jumlah industri berskala sedang dan besar cenderung terus meningkat.⁴ Jumlah perusahaan pada industri manufaktur secara keseluruhan sempat

2 Lihat bab 5 Topikal Isu : "Peran Distribusi dalam Pembentukan Harga Komoditas".

3 Penelitian sebelumnya oleh Astiyah et al. (2004) juga menggunakan paradigma *structure-conduct-performance*, namun lebih terfokus pada analisis kinerja sektor industri secara umum dikaitkan dengan dampak liberalisasi perdagangan.

4 Mengikuti kategori BPS, industri sedang adalah industri dengan perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 20-99 orang, sementara industri besar adalah industri dengan perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih.

Bab 3: Organisasi Industri Dan Perilaku Pembentukan Harga Produsen di Industri Manufaktur Indonesia



Grafik 3.1 Jumlah dan Pertumbuhan Perusahaan Industri Manufaktur Besar dan Sedang

mengalami penurunan dalam masa krisis 1997/1998, namun setelahnya secara bertahap cenderung meningkat kembali. Dilihat dari skala usaha, sekitar 70% dari perusahaan yang ada tersebut termasuk dalam kategori industri sedang. Selain itu, sejak tahun 2004 rasio perusahaan industri berskala besar terhadap keseluruhan jumlah industri juga terus menurun, sejalan dengan semakin meningkatnya rasio industri sedang. Bila dilihat dari komposisinya, Industri Makanan dan Minuman, Tekstil, Pakaian Jadi, dan Furnitur mendominasi jumlah perusahaan dalam industri. Lebih dari 50% dari industri besar dan sedang adalah industri yang bergerak di empat golongan industri tersebut.

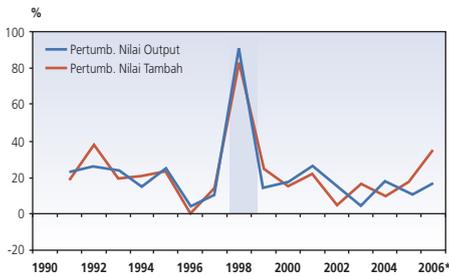
Dilihat dari jumlah tenaga kerja yang dapat diserap, peran sektor industri manufaktur dalam menyerap tenaga kerja nasional memang masih relatif rendah (Tabel 3.1). Distribusi penyerapan tenaga kerja masih terkonsentrasi pada sektor pertanian (41%) dan sektor jasa seperti perdagangan (21%), pengangkutan (6%) dan jasa-jasa lain (12%). Sementara itu, pangsa sektor industri manufaktur cenderung stagnan, dan bahkan cenderung berada dalam tren menurun. Apabila dilihat dari jenis industrinya, Industri Pakaian Jadi, Tekstil, Makanan dan Minuman, serta Furnitur merupakan industri yang menyerap tenaga kerja terbesar. Hal ini sejalan dengan perkembangan jumlah perusahaan dalam industri tersebut.

Apabila dilihat dari nilai output yang dihasilkan oleh keseluruhan industri manufaktur yang berskala besar dan sedang, secara umum terlihat kinerja industri pascakrisis masih di bawah prakrisis. Rata-rata pertumbuhan output pada periode prakrisis (1991-1995) mencapai sekitar 22%, sementara pada periode pascakrisis (2002-2006) baru mencapai sekitar 12%. Dilihat dari pangsa terhadap keseluruhan nilai produksi, penyumbang terbesar nilai output adalah Industri Makanan dan Minuman, Tekstil, Kimia, Logam,

Tabel 3.1 Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor (%)

No	Sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 (Jan-Feb)
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	45,28	43,77	44,34	46,38	43,33	43,97	42,05	41,24	41,83
2	Pertambangan dan Penggalian	0,50	1,05	0,69	0,79	1,10	0,96	0,97	1,00	1,04
3	Industri Manufaktur	12,96	13,31	13,21	12,39	11,81	12,72	12,46	12,38	12,19
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,08	0,15	0,19	0,16	0,24	0,21	0,24	0,18	0,20
5	Bangunan	3,89	4,23	4,66	4,37	4,84	4,86	4,92	5,26	4,64
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,58	19,24	19,42	18,59	20,40	19,06	20,13	20,57	20,27
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5,07	4,90	5,10	5,32	5,85	6,02	5,93	5,96	5,89
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0,98	1,24	1,08	1,41	1,20	1,22	1,41	1,40	1,41
9	Jasa-Jasa	10,66	12,12	11,30	10,59	11,22	10,99	11,90	12,03	12,52

Sumber : Survei Tenaga Kerja Nasional, BPS



Grafik 3.2 Perkembangan Output dan Nilai Tambah Industri Manufaktur

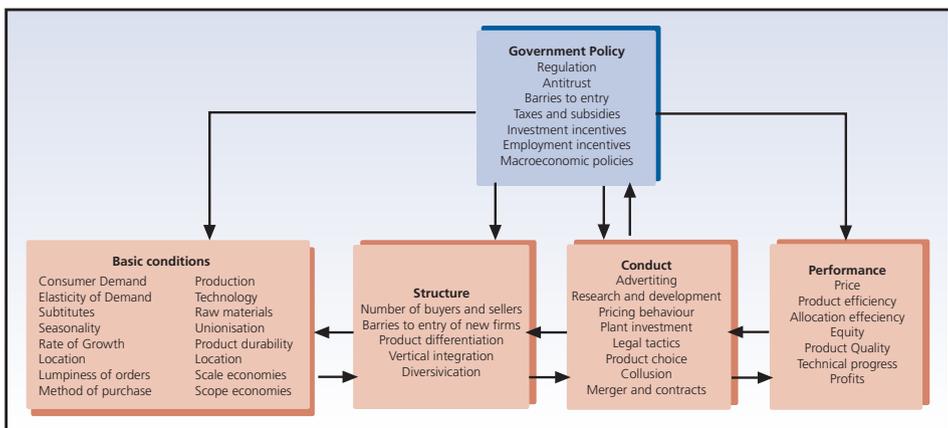
Karet dan Barang Plastik, serta Industri Kendaraan Roda Empat.

Apabila dilihat dari sisi nilai tambah, gambaran yang diperoleh hampir serupa dengan perkembangan nilai output, dimana pertumbuhan nilai tambah periode pascakrisis masih lebih rendah dari pertumbuhan prakrisis.⁵ Dilihat dari jenis industrinya, penyumbang terbesar dalam nilai tambah adalah Industri Makanan dan Minuman, Tembakau, Tekstil, Kertas, dan Industri Bahan Kimia.

5 Dari "Indikator Industri Besar dan Sedang" terbitan BPS, yang dimaksud Nilai Tambah adalah besarnya output dikurangi biaya input atau biaya antara.

3.2. Paradigma *Structure-Conduct-Performance* (SCP)

Upaya untuk mengkaji perilaku pembentukan harga oleh produsen tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai organisasi industri. Secara singkat, organisasi industri adalah bagian dari disiplin ekonomi mikro yang khusus mengkaji tentang perusahaan, pasar, dan interaksi antara keduanya. Di dalam organisasi industri berkembang berbagai paradigma yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara struktur pasar, perilaku industri, dan kinerja industri. Paradigma yang paling klasik namun populer sampai saat ini adalah *Structure-Conduct-Performance* (SCP) yang pertama kali diperkenalkan oleh Edward S. Mason (1939) dan kemudian dikembangkan oleh Joe S. Bain (1941). Perspektif dalam paradigma SCP adalah bahwa struktur industri akan mempengaruhi perilaku pelaku usaha, dan selanjutnya interaksi antara struktur dan perilaku pengusaha akan berdampak pada kinerja (*performance*) industri (Diagram 3.2).



Sumber : Carlton & Perloff (2000)

Diagram 3.2 Structure-Conduct-Performance

Tabel 3.2 Ringkasan Matriks Industri

Karakteristik	Pasar persaingan sempurna	Pasar Persaingan Monopolistik	Oligopoli	Monopoli
Jumlah perusahaan	Besar (1000)	Banyak (50 - 100)	Sedikit (<10) tingkat kebergantungan tinggi	Satu
Sifat produk	Standar/Homogen	Beragam	Standar/Beragam	Unik, tidak ada barang pengganti
Barrier to entry/exit	Tidak ada	Tidak ada	Tinggi	Blokade
Kontrol akan harga	Tidak ada	Kecil	Sedang	Substansial

Sumber : Machmud (2008)

Struktur pasar secara sederhana adalah kumpulan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kompetensi di pasar. Struktur pasar sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat penguasaan teknologi, elastisitas permintaan terhadap suatu produk, lokasi, ada tidaknya hambatan masuk pasar (*entry barrier*), tingkat efisiensi serta beberapa faktor lainnya. Jenis struktur pasar bervariasi, namun pada dasarnya bisa dikelompokkan ke dalam dua bentuk pasar yang berbeda secara ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Termasuk dalam pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik.

Adapun proksi yang biasa digunakan untuk menjelaskan struktur pasar adalah rasio konsentrasi pasar. Semakin tinggi rasio konsentrasi pasar, struktur pasar akan semakin mengarah ke monopoli, yang berarti semakin tinggi pula kekuatan pasar yang dimiliki produsen.⁶

Perlu dipahami bahwa konsep struktur pasar bersifat dinamis, artinya struktur pasar yang tadinya mengarah ke persaingan sempurna, dapat saja berubah menjadi monopolistik karena adanya

intervensi pemerintah ataupun aksi dari para pelaku usaha sendiri.

Kondisi struktur pasar selanjutnya akan mempengaruhi perilaku perusahaan seperti dalam hal penentuan harga jual, promosi produk, termasuk dalam strategi interaksi dengan perusahaan lain. Terdapat dua jenis strategi interaksi antara pelaku usaha, yaitu (1) interaksi yang bersifat non-kooperatif, dimana strategi yang diambil akan menguntungkan dirinya sendiri atau bahkan menjurus merugikan pesaingnya, dan (2) interaksi yang bersifat kooperatif, dimana terjadi berbagai kesepakatan antara pelaku usaha dalam bentuk seperti kartel dan kesepakatan harga. Pilihan strategi yang diambil oleh pelaku usaha menjadi sangat penting karena akan sangat berdampak pada penetapan harga. Secara teori,

6 Rasio konsentrasi (Concentration Ratio - CR) adalah jumlah pangsa pasar (*market share*) dari sejumlah perusahaan terbesar. Contoh : CR4 merupakan rasio konsentrasi dari 4 (empat) perusahaan terbesar. Ukuran lain adalah *Herfindahl-Hirschman Index (HHI)* yang merupakan penjumlahan kuadrat sederhana dari pangsa pasar untuk semua perusahaan dalam suatu industri;

$$HHI = \sum_i^N S_i^2$$

dalam kondisi struktur pasar yang mengarah ke oligopoli, pelaku usaha memiliki ruang untuk langsung mentransmisikan kenaikan biaya produksi tersebut ke konsumen. Namun hal ini belum tentu terjadi, bila pelaku usaha menjalankan strategi harga non-kooperatif dengan pesaing. Dalam kondisi demikian, upaya menaikkan harga bukan strategi yang karena pelaku usaha yang lain belum tentu akan turut menaikkan harga. Begitu pentingnya interaksi strategi antar pelaku bisnis dalam pembentukan harga produsen, sehingga dalam organisasi industri berkembang paradigma baru yang lebih menekankan pada upaya menjelaskan strategi bisnis pelaku usaha. Dalam paradigma ini unsur *conduct* (perilaku) lebih ditekankan daripada *structure* (struktur). Beberapa nama yang terkait dengan pola pikir kontemporer ini diantaranya von Neumann dan Morgenstern (1980-1990) yang menggunakan *Nash Equilibrium* untuk menjelaskan pengambilan keputusan strategis, dan juga Hall dan Porter (1980-an) yang menggunakan pemodelan empiris yang kompleks. Meskipun demikian, paradigma tradisional SCP hingga saat ini masih dianggap cukup relevan untuk menjelaskan perilaku harga di tingkat produsen dan masih banyak digunakan sebagai landasan penelitian di berbagai negara.

Interaksi antara struktur pasar dan perilaku perusahaan pada akhirnya akan melahirkan keputusan pelaku usaha dalam hal penetapan harga jual. Dalam analisis *structure-conduct-performance*, kinerja pelaku usaha dalam penetapan harga biasa diukur dengan menggunakan *Lerner Index* atau yang dikenal sebagai *price-cost margin*.

Price-cost margin (PCM) atau biasa disebut sebagai *mark-up ratio* juga lazim digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat

persaingan di pasar. Dalam kondisi persaingan sempurna, perusahaan akan berproduksi hingga mencapai kondisi dimana $Marginal Cost (MC) = Marginal Revenue (MR) = \text{Harga } (P)$, yaitu pada saat penerimaan setiap satu unit penjualan sama dengan biaya setiap satu unit atau sama dengan harga jual per unit. Dalam kondisi persaingan sempurna, perusahaan akan terpaksa mematok harga sampai ke tingkat yang sama dengan biaya marginal. Namun demikian, dalam kondisi pasar yang tidak sempurna dimana pelaku usaha memiliki kekuatan monopoli atau oligopoli, maka pelaku usaha akan melakukan *mark-up* dalam upaya meraih keuntungan yang lebih besar. Semakin menjauh suatu pasar dari kondisi persaingan sempurna, yang antara lain tercermin dari semakin tingginya konsentrasi pasar, semakin besar dorongan pelaku usaha untuk meningkatkan *mark-up ratio*.

3.3. Analisis Struktur Beberapa Kelompok Industri Manufaktur Utama

Dengan karakteristik industri yang sangat beragam, upaya untuk menjelaskan organisasi industri di Indonesia perlu didukung oleh pemahaman karakteristik masing-masing industri secara individu. Mengingat jumlah industri yang sangat banyak, maka dalam kajian ini upaya untuk menganalisis industri manufaktur secara individual dilakukan terhadap delapan jenis industri, yang dipilih berdasarkan pangsa pasarnya yang besar (di atas 95%) terhadap keseluruhan total output industri. Kedelapan industri tersebut adalah 1) Industri Makanan dan Minuman, 2) Tekstil, 3) Kimia, 4) Karet dan Barang Plastik, 5) Logam Dasar, 6) Mesin Listrik, 7) Radio, Televisi dan Peralatan Telekomunikasi, dan 8) Kendaraan Bermotor.

Tabel 3.3 Rasio Konsentrasi Tertinggi Beberapa Industri Tahun 2006 (KKI 5 Digit)

No	KKI 5	Industri	CR 4
1	15431	Bubuk Coklat	1,00
2	31101	Motor Listrik	1,00
3	15321	Tepung Terigu	1,00
4	24132	Karet Buatan	1,00
5	16003	Rokok Putih	1,00
6	21011	Bubur Kertas	0,99
7	24242	Kosmetik	0,99
8	34100	Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	0,99
9	17111	Persiapan Serat Tekstil	0,98
10	23203	Barang-barang dari Hasil Kilang Minyak Bumi	0,98
11	24122	Pupuk Buatan Tunggal	0,95
12	27102	Penggilangan Baja	0,96
13	26411	Semen	0,91
14	35911	Sepeda Motor dan Sejenisnya	0,90
15	27320	Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	0,90
16	18102	Pakaian Jadi Lainnya Dari Tekstil	0,89
17	24231	Bahan Farmasi	0,88
18	15144	Minyak Goreng dari Kelapa Sawit	0,83
19	26501	Barang dari Marmer, dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga	0,83
20	29113	Komponen dan Suku Cadang Penggerak Mula	0,82

Tabel 3.4 Nilai *Minimum Efficiency Scale* Industri Manufaktur 2006 (KKI 3 digit)

KKI 3	Industri	2001	2006*
151	Makanan olahan	0,08	0,11
152	Susu	0,13	0,28
153	Pengolahan padi	0,10	0,13
154	Makanan lainnya	0,03	0,06
155	Minuman	0,13	0,15
171	Benang dan kain	0,04	0,92
172	Permadani	0,17	0,39
173	Perajutan	0,37	0,00
174	Kapuk	0,15	0,08
241	Bahan kimia industri	0,10	0,31
242	Bahan kimia lainnya	0,16	0,35
243	Serat buatan	0,25	0,39
251	Karet	0,12	0,05
252	Barang dari plastik	0,04	0,28
271	Logam besi & baja	0,41	0,58
272	Logam bukan besi & baja	0,34	0,28
273	Pengecoran logam	0,19	0,98
311	Motor listrik & perlengkapan	0,60	0,33
312	Alat pengontrol listrik	0,28	0,97
313	Kabel listrik	0,13	0,96
314	Akumulator listrik	0,24	0,23
315	Bola lampu pijar	0,25	0,24
319	Alat listrik lainnya	0,21	0,38
321	Komponen elektronik	0,16	0,61
322	Alat komunikasi	0,79	0,78
323	Radio & sejenisnya	0,25	0,63
341	Kendaraan roda empat	0,45	0,36
342	Karoseri kendaraan	0,26	0,60
343	Komponen kendaraan	0,21	0,13

Secara umum, struktur industri manufaktur di Indonesia diwarnai oleh tingkat konsentrasi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari tingkat rasio konsentrasi industri manufaktur di tahun 2006 (Tabel 3.3), dimana terdapat sekitar 60% dari kelompok industri (berdasarkan KKI 5 digit) yang memiliki tingkat konsentrasi di atas 75%.⁷

Selain itu, hambatan masuk ke industri (*entry barrier*) untuk industri di Indonesia juga cukup tinggi. Hal ini didasarkan pada penghitungan Nilai *Minimum Efficiency Scale* (MES) terhadap delapan industri dimana 86%

memiliki nilai MES lebih besar dari 10% (Tabel 3.4).⁸ Menurut Alistair (2004), MES yang lebih besar dari 10% menggambarkan hambatan masuk yang tinggi pada suatu industri, dimana pada skala ekonomi yang semakin besar akan semakin sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke industri tersebut.

Sementara itu, PCM (*price-cost margin*) yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja suatu industri, menunjukkan perkembangan yang cukup beragam. Dalam kajian ini, PCM yang merupakan selisih antara harga dan biaya marginal dihitung dari nilai tambah dikurangi

7 Tingkat konsentrasi di atas 75% menggambarkan struktur industri yang sudah oligopoli atau monopoli.

8 MES dihitung sebagai : Output perusahaan terbesar / Output Total Industri tersebut.

biaya tenaga kerja dibagi output, atau secara matematis dapat ditulis :

$$PCM = \frac{p \cdot MC}{p} \approx \frac{(Q-IC)-LC}{Q} = \frac{VA - LC}{Q}$$

dimana

VA : nilai tambah bersih (*value-added*)

Q : nilai output

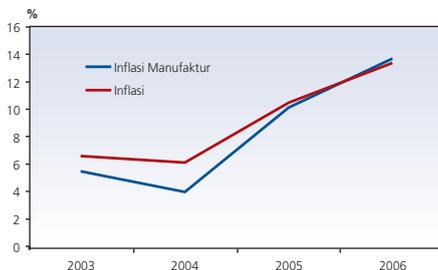
IC : biaya antara (*intermediate cost*) yang terdiri dari seluruh biaya di luar biaya tenaga kerja, depresiasi, dan pajak tidak langsung

LC : biaya tenaga kerja (*labor cost*).⁹

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan, PCM rata-rata (dari tahun 2000-2005) untuk kedelapan industri manufaktur menunjukkan perkembangan yang cukup bervariasi, namun secara rata-rata berada di sekitar angka 30%. PCM rata-rata periode 2000-2005 untuk kedelapan industri manufaktur berada dalam kisaran 10%-70%, dengan PCM tertinggi terdapat di Industri Kendaraan Bermotor dan terendah terdapat di Industri Tekstil. Meskipun berada dalam kisaran yang cukup lebar, secara rata-rata PCM untuk kedelapan industri ini terkonsentrasi di sekitar angka 30%.

Sementara itu, berdasarkan penghitungan yang dilakukan terhadap PCM seluruh industri, terlihat bahwa pergerakan PCM berkorelasi cukup kuat dengan inflasi IHK manufaktur yaitu sekitar 80% (Grafik 3.4).¹⁰ Hal ini menunjukkan

- 9 Penggunaan variabel harga barang di pasar domestik sebagai variabel endogen tidak dimungkinkan karena tidak tersedianya harga barang domestik untuk setiap barang industri.
- 10 IHK Manufaktur adalah IHK yang dihitung dengan mengeluarkan barang-barang yang bukan merupakan hasil industri manufaktur, seperti jasa dan komoditas pertanian. IHK yang digunakan berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2002 yang terdiri 744 jenis komoditas.

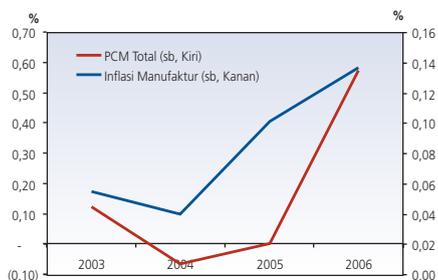


Grafik 3.3 Inflasi Manufaktur dan Inflasi Total

bahwa peran perilaku harga produsen cukup dominan dalam menjelaskan pergerakan harga di tingkat konsumen. Peran IHK manufaktur dalam IHK total juga cukup besar mengingat besarnya bobot barang-barang manufaktur dalam keranjang IHK.

3.3.1. Industri Makanan dan Minuman

Perkembangan di Industri Makanan dan Minuman sangat penting untuk diamati karena merupakan industri dengan jumlah perusahaan terbanyak sekaligus nilai produksi terbesar. Selain itu bobotnya dalam keranjang IHK juga merupakan yang terbesar. Mengingat sangat banyaknya jenis komoditas yang dihasilkan dari Industri Makanan dan Minuman, maka untuk mengukur konsentrasi pasar dalam industri ini



Grafik 3.4 Inflasi Manufaktur dan Perubahan PCM

Tabel 3.5 Rasio Konsentrasi Industri Makanan & Minuman (KKI 5 Digit)

KKI 5	Industri	2001	2006*
15431	Bubuk Coklat	0,98	1,00
15321	Tepung Terigu	0,93	1,00
15530	Malt dan Minuman Yang Mengandung Malt	0,97	1,00
15131	Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran	0,93	1,00
15423	Gula Lainnya	0,94	1,00
15213	Es Krim	0,82	0,98
15111	Pemotongan Hewan	0,74	0,96
15329	Pati Lainnya	0,98	0,95
15312	Penggilingan dan Pembersihan Padi-padian Lainnya	0,90	0,95
15332	Konsentrat Pakan Ikan /Ternak	0,95	0,94
15424	Sirup	0,73	0,94
15429	Pengolahan Gula Lainnya Selain Sirup	0,93	0,93
15139	Pengolahan Pengawetan Lainnya untuk Buah-buahan dan Sayuran	0,67	0,91
15520	Anggur dan Sejenisnya	0,69	0,90
15497	Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	0,61	0,88
15315	Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian Selain Kopi dan Cokelat	0,94	0,87
15132	Pengasinan/Pemanisan Buah-buahan dan Sayuran	0,75	0,85
15495	Makanan dari Kedele dan Kacang	0,76	0,84
15314	Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Cokelat	0,63	0,83
15144	Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit	0,53	0,83
15510	Minuman Keras	0,84	0,81
15143	Minyak Goreng dari Minyak Kelapa	0,59	0,77
15211	Susu	0,56	0,73
15112	Pengolahan dan Pengawetan Daging	0,47	0,67

diperlukan pengamatan paling tidak sampai dalam kategori lima digit ISIC (Kode Klasifikasi Komoditi Indonesia - KKI).¹¹

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan, rasio konsentrasi (CR4) untuk Industri Makanan dan Minuman yang berada di atas tingkat 75% mencapai sekitar 40%. Beberapa diantaranya adalah di kelompok Industri Tepung Terigu, Minyak

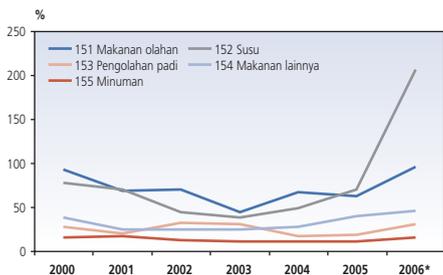
Goreng, Pengolahan Daging, Susu, Sirup, dan Penggilingan Padi. Dibandingkan kondisi lima tahun sebelumnya, rasio konsentrasi di Industri Makanan dan Minuman sebagian besar mengalami peningkatan, seperti terlihat di Industri Tepung Terigu, Minyak Goreng, Pengalengan Buah/Sayur, dan Es Krim.

Tingkat liberalisasi dalam perdagangan diyakini akan turut mempengaruhi kondisi struktur pasar. Semakin terbukanya suatu perdagangan yang tercermin dari tingkat impor maupun ekspor, semakin meningkat pula tingkat kompetisi di pasar barang domestik, yang pada akhirnya akan menahan terjadinya eksese dalam *mark-up ratio*. Tidak ada ukuran tunggal untuk menentukan tingkat liberalisasi sektor industri. Ada beberapa pendekatan yang umum digunakan untuk mengukur tingkat liberalisasi dalam perdagangan, diantaranya tingkat keterbukaan (*openness*) dan rasio penetrasi impor (*import penetration ratio - IPR*). Tingkat *openness* dihitung dengan menjumlahkan impor (M) ditambah ekspor (X) kemudian dibagi dengan total output, sementara IPR dihitung sebagai rasio antara impor dengan penjualan domestik.

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan, tingkat keterbukaan di Industri Makanan dan Minuman secara umum menunjukkan peningkatan, khususnya sejak tahun 2004 seiring dengan membaiknya kinerja ekspor yang diiringi dengan peningkatan impor. Penelitian terdahulu oleh Astiyah et. al (2004) menyebutkan bahwa tingkat liberalisasi di Industri Makanan dan Minuman menunjukkan peningkatan secara gradual sejak 1993. Tingkat liberalisasi yang cukup tinggi terdapat dalam Industri Makanan Olahan dan juga Industri Susu. Namun tingginya tingkat liberalisasi di Industri Susu lebih banyak disebabkan oleh tingginya impor

11 ISIC (International Standard of Industrial Classification) merupakan kode yang dibuat oleh PBB sebagai suatu cara dalam standarisasi klasifikasi aktivitas ekonomi di sektor industri. Di Indonesia, kode klasifikasi ini disesuaikan dan diberi nama Kode Klasifikasi Komoditi Indonesia (KKI).

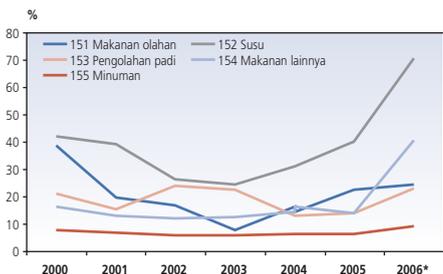
Bab 3: Organisasi Industri Dan Perilaku Pembentukan Harga Produsen di Industri Manufaktur Indonesia



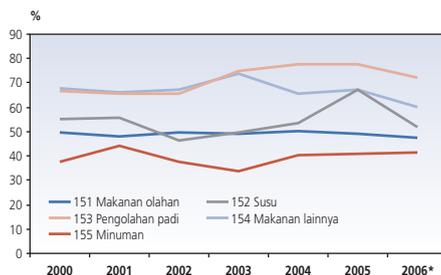
Grafik 3.5 Tingkat Openness Industri Makanan dan Minuman (KIKI 3 digit)

di industri tersebut. Pada 2006 tingkat liberalisasi di Industri Susu terlihat mengalami peningkatan yang sangat pesat (Grafik 3.5), namun bila ditelusuri lebih jauh hal ini ternyata lebih disebabkan karena anjaknya produksi susu pada tahun tersebut. Bila dilihat dari rasio penetrasi impor, Industri Susu tetap memiliki rasio impor tertinggi dibandingkan industri lainnya (Grafik 3.6). Sementara itu, tingkat penetrasi impor di Industri Makanan Olahan mengalami peningkatan signifikan di 2006, yang disebabkan oleh melonjaknya impor sekaligus menurunnya produksi.

Dari aspek biaya produksi, hasil penghitungan untuk rasio biaya material per nilai output (*Unit Material Cost - UMC*) menunjukkan kecenderungan yang menurun sejak 2003.



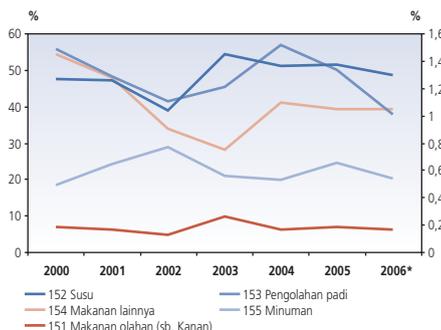
Grafik 3.6 Rasio Penetrasi Impor Industri Makanan dan Minuman (KIKI 3 digit)



Grafik 3.7 Biaya Material per Output Industri Makanan dan Minuman (KIKI 3 digit)

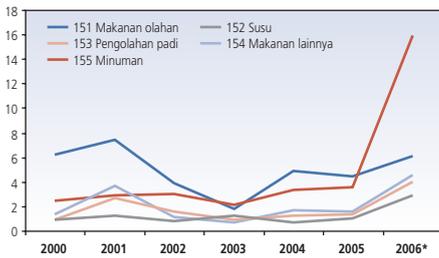
Penurunan UMC ini secara umum dapat dijadikan indikasi semakin efisienya industri tersebut. Dilihat dari komposisi material yang digunakan, terdapat perkembangan yang cukup menarik dimana sejak 2005 terjadi penurunan persentase penggunaan bahan baku impor di hampir semua jenis Industri Makanan dan Minuman. Dikaitkan dengan perkembangan meningkatnya tingkat penetrasi impor yang terjadi di beberapa industri, dapat diduga bahwa peningkatan impor terjadi pada jenis komoditas yang tergolong barang jadi ataupun komoditas yang berupa suku cadang (*spareparts*) atau mesin-mesin.

Sementara itu, biaya tenaga kerja per nilai output (*Unit Labor Cost - ULC*) untuk Industri Makanan dan Minuman pada umumnya



Grafik 3.8 Persentase Penggunaan Bahan Baku Impor Industri Makanan dan Minuman (KIKI 3 digit)

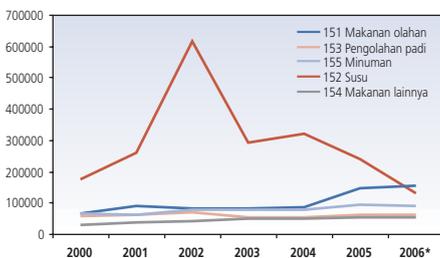
Bab 3: Organisasi Industri Dan Perilaku Pembentukan Harga Produsen di Industri Manufaktur Indonesia



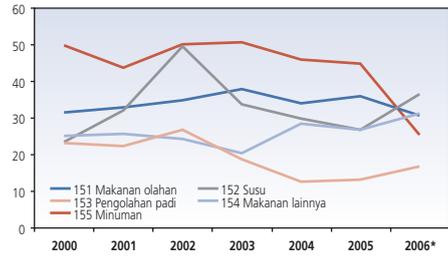
Grafik 3.9 Biaya Tenaga Kerja per Output di Industri Makanan dan Minuman (KKI 3 digit)

mengalami peningkatan khususnya setelah tahun 2005, yang sejalan dengan perkembangan meningkatnya upah buruh manufaktur. Peningkatan ULC ini tentunya diharapkan diiringi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang dihitung sebagai nilai tambah dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Secara umum, tingkat produktivitas di Industri Makanan dan Minuman berada dalam kecenderungan meningkat, dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi berada di Industri Susu.

Terkait dengan kinerja industri, PCM tertinggi di Industri Makanan dan Minuman terdapat di Industri Minuman. Hal ini diduga terkait dengan struktur pasar di industri ini yang memiliki tingkat konsentrasi yang cukup tinggi tinggi, khususnya di kelompok 1) Industri Minuman dari Malt dan 2)



Grafik 3.10 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Makanan dan Minuman (KKI 3 digit)



Grafik 3.11 Price-Cost Margin Industri Makanan dan Minuman

Minuman dari Anggur dan Sejenisnya. Sementara itu, perkembangan PCM menunjukkan arah yang bervariasi. PCM dalam Industri Makanan Olahan, Pengolahan Padi, dan Susu dalam 1-2 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Kondisi ini nampaknya seiring dengan tendensi peningkatan ULC di Industri Makanan dan Minuman. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa produsen berupaya membagi beban peningkatan upah pekerja ke konsumen melalui peningkatan *mark-up ratio*, dalam upaya mempertahankan pendapatan perusahaan. Meskipun berada dalam tingkat yang bervariasi, namun PCM untuk Industri Makanan Olahan, Pengolahan Padi, dan Makanan Lainnya sebenarnya sejak 1998 dapat dikatakan cenderung stabil, dan baru ada indikasi peningkatan dalam 1-2 tahun terakhir. Hal ini cukup menarik mengingat banyak industri dari ketiga jenis industri tersebut yang memiliki tingkat konsentrasi yang cukup tinggi. Sementara itu, bila dibandingkan dengan angka PCM rata-rata untuk kedelapan industri manufaktur (sekitar 30%), PCM rata-rata untuk Industri Makanan dan Minuman juga berada di sekitar angka 30%.

3.3.2. Industri Tekstil

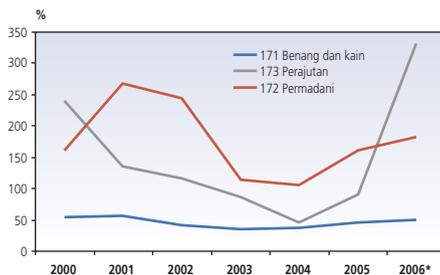
Sebagai salah satu industri prioritas dengan kontribusi output yang tinggi dan penyerapan

Tabel 3.6 Rasio Konsentrasi Industri Tekstil (KKI 5 Digit)

KKI 5	Industri	2001	2006*
17213	Tekstil Jadi Untuk Keperluan Kosmetika	0,96	1,00
17111	Persiapan Serat Tekstil	0,36	0,98
17112	Pemintalan Benang	0,41	0,98
17232	Barang-Barang dari Tali	0,02	0,92
17231	Tali	0,75	0,89
17212	Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Kesehatan	0,72	0,89
17113	Pemintalan Benang Jahit	0,59	0,88
17293	Bordir/Sulaman	0,36	0,87
17292	Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	0,93	0,86
17121	Penyempurnaan Benang	0,72	0,84
17291	Yang Menghasilkan Kain Pita	0,59	0,83
17220	Permadani (Babut)	0,59	0,81
17299	Tekstil yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	0,36	0,79
17294	Non Woven	0,89	0,79
17303	Rajutan Kaos Kaki	0,95	0,71
17115	Kain Tenun Ikat	0,82	0,69
17122	Penyempurnaan Kain	0,39	0,67
17304	Barang dari Rajutan	0,99	0,63
17301	Kain Rajut	0,60	0,57
17123	Pencetakan Kain	0,40	0,43
17302	Pakaian Jadi Rajutan	0,31	0,38
17211	Barang Jadi, Tekstil, Kecuali Untuk Pakaian Jadi	0,30	0,32
17124	Batik	0,40	0,26
17114	Pertununan	0,22	0,23
17400	Industri Kapuk	0,31	0,22

tenaga kerja yang besar, Industri Tekstil Indonesia dapat dikatakan memiliki tingkat konsentrasi yang cukup tinggi. Dibandingkan tahun 2001, tingkat konsentrasi industri ini pada 2006 juga cenderung mengalami peningkatan. Bahkan pada beberapa industri seperti 1) Persiapan Serat Tekstil, 2) Pemintalan Benang, 3) Barang-Barang dari Tali dan 4) Tekstil Jadi untuk Keperluan Kosmetika memiliki tingkat konsentrasi yang mendekati bahkan mencapai angka 1.

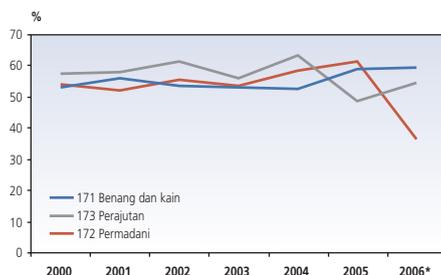
Tingkat ekspor kelompok Industri Tekstil terhadap perdagangan internasional sempat mengalami penurunan hingga tahun 2003 terutama berasal dari turunnya ekspor dan impor Industri Benang dan Kain, yang memiliki pangsa terbesar dalam kelompok industri ini. Namun



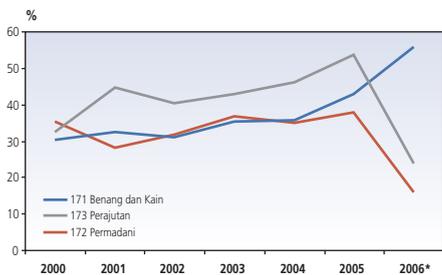
Grafik 3.12 Tingkat Openness Industri Tekstil (KKI 3 digit)

sejalan dengan meningkatnya kinerja ekspor di industri tekstil, tingkat ekspor di industri ini sejak 2004 kembali meningkat. Sementara itu, jika dilihat dari persentase nilai output yang diekspor, secara umum dapat dikatakan Industri Tekstil berorientasi pada pasar domestik, yang disumbang dari Industri Benang dan Kain sebagai kontributor terbesar. Di sisi lain, Industri Permadani dan Industri Perajutan lebih berorientasi ekspor, dengan tingkat ekspor berkisar antara 60% sampai 80%.

Dari sisi aspek biaya produksi, perkembangan biaya material per output (UMC) untuk Industri Tekstil sejak 2000 sebenarnya cenderung stabil, namun kemudian mulai menunjukkan peningkatan sejak 2005, kecuali untuk Industri Permadani. Peningkatan UMC di Industri Benang dan Kain nampaknya sejalan dengan meningkatnya



Grafik 3.13 Biaya Material per Output Industri Tekstil (KKI 3 digit)

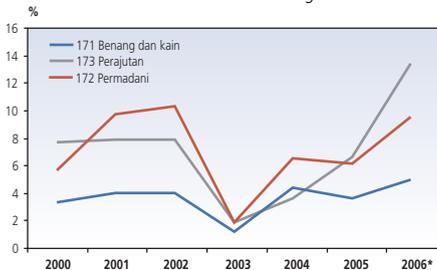


Grafik 3.14 Persentase Penggunaan Bahan Baku Impor Industri Tekstil (KKI 3 digit)

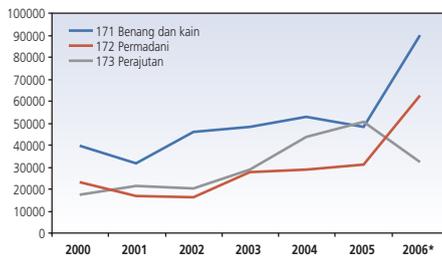
persentase penggunaan bahan baku impor di industri tersebut. Untuk Industri Perajutan, peningkatan UMC diduga bersumber dari peningkatan biaya material yang berasal dari domestik, mengingat persentase penggunaan bahan baku impor untuk industri ini menunjukkan penurunan.

Dilihat dari sisi biaya tenaga kerja, Industri Tekstil mengalami peningkatan sejak tahun 2003. Biaya tenaga kerja di Indonesia juga relatif tinggi di antara industri tekstil di negara lain.¹² Bangladesh dan Vietnam hanya membayar upah buruh sebesar \$0,35/jam, sedangkan di Indonesia buruh dibayar sebesar dua kali lipat dari nilai tersebut. Selain masalah biaya tenaga kerja yang relatif tinggi, kurang kompetitifnya Industri Tekstil nasional juga tercermin

12 Miranti, Ermina (2007) : "Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia : Antara Potensi dan Peluang"



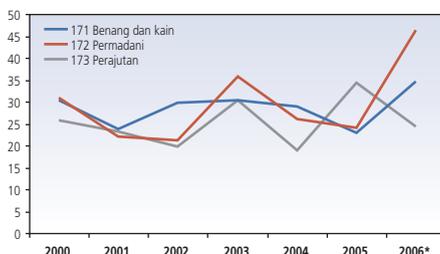
Grafik 3.15 Biaya Tenaga Kerja Per Output Industri Tekstil (KKI 3 digit)



Grafik 3.16 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Tekstil (KKI 3 digit)

dari besarnya biaya listrik yang dikeluarkan oleh industri ini. Biaya listrik yang harus dikeluarkan Industri Tekstil Indonesia adalah sebesar US\$0,08 (8 cent/kwh), tertinggi dibanding negara lain yang hanya sebesar 7 cent/kwh di China dan 6,6 cent/kwh di Vietnam. Selain bertarif tinggi, kebutuhan akan listrik belum dapat dipenuhi secara optimal oleh PLN. Apabila dikaji lebih lanjut dengan menggunakan Tabel Input Output 2005, listrik memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) terhadap sektor industri tekstil yang cukup besar. Penambahan 1 unit permintaan akhir di sektor listrik akan meningkatkan output sektor industri tekstil sebesar 0,048 unit.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketergantungan sektor industri tekstil terhadap listrik sebagai sumber energi dalam proses produksi.

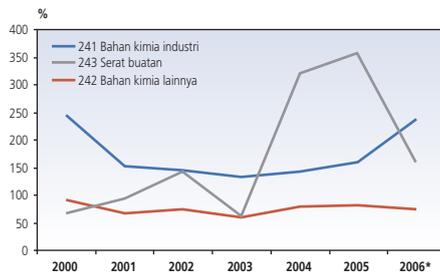
13 Lihat Bab 2, Boks Permasalahan dan Dampak Sektor Listrik terhadap Perekonomian Indonesia



Grafik 3.17 Price Cost Margin Industri Tekstil (KKI 3 digit)

Bab 3: Organisasi Industri Dan Perilaku Pembentukan Harga Produsen di Industri Manufaktur Indonesia

PCM Industri Tekstil secara umum stabil pada periode tahun 2000-2005, namun mengalami peningkatan pada tahun 2006 kecuali untuk Industri Perajutan. Nilai rata-rata PCM untuk keseluruhan industri ini adalah sekitar 25%, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata keseluruhan delapan industri (30%).



Grafik 3.18 Tingkat Openness Industri Kimia dan Barang Kimia (KCI 3 digit)

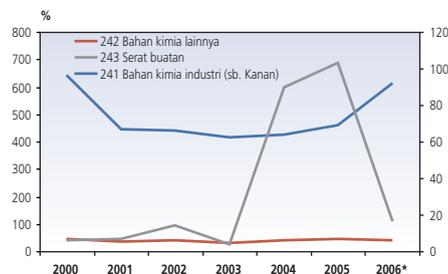
Tabel 3.7 Rasio Konsentrasi Industri Kimia dan Barang Kimia (KKI 5 Digit)

KKI 5	Industri	2001	2006*
24302	Serat Stapel Buatan	0,87	1,00
24132	Karet Buatan	0,67	1,00
24111	Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali	0,96	0,99
24212	Pemberantas Hama	0,62	0,99
24242	Kosmetik	0,06	0,99
24117	Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Bumi dan Batu Bara	0,98	0,98
24292	Bahan Peledak	0,98	0,97
24232	Farmasi	0,48	0,97
24113	Kimia Dasar Anorganik Pigment	0,88	0,96
24293	Tinta	0,51	0,96
24122	Pupuk Buatan Tunggal	0,77	0,95
24123	Pupuk Buatan Majemuk dan Campuran	0,82	0,95
24116	Kimia Dasar Organik, Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen	0,61	0,94
24112	Kimia Dasar dan Anorganik Gas Industri	0,40	0,93
24131	Damar Buatan dan Bahan Baku Plastik	0,32	0,92
24294	Minyak Atsiri	0,79	0,89
24295	Korek Api	0,60	0,88
24231	Bahan Farmasi	0,96	0,88
24299	Bahan Kimia dan Bahan Lainnya	0,79	0,86
24114	Kimia Dasar Anorganik yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	0,51	0,85
24234	Jamu	0,59	0,83
24241	Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	0,83	0,79
24118	Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	0,46	0,79
24121	Pupuk Alam/ Non Sintetis	0,72	0,66
24119	Kimia Dasar Organik yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	0,48	0,60
24115	Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	0,31	0,60
24220	Cat, Pernis dan Lak	0,40	0,55
24291	Perekat/Lem	0,35	0,54

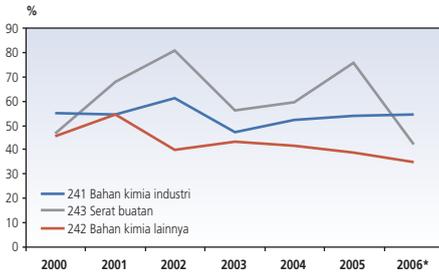
3.3.3. Industri Kimia dan Barang-barang Kimia

Industri Kimia dan Barang-barang Kimia merupakan industri dengan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi, dimana rasio konsentrasi (CR4) yang melebihi 75% mencapai lebih dari 80% jenis industri. Dibandingkan lima tahun sebelumnya, tingkat konsentrasi di industri ini juga secara umum makin meningkat, terlihat dari beberapa industri yang sebelumnya tidak terlalu tinggi konsentrasinya kemudian menjadi sangat tinggi, seperti di kelompok Industri Farmasi dan Kosmetik.

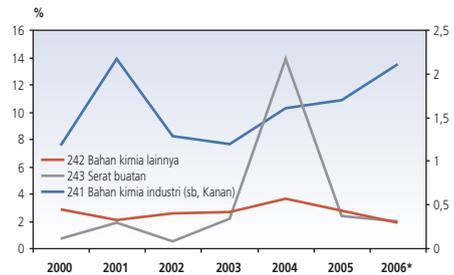
Ditinjau dari tingkat liberalisasi, secara umum eksposur Industri Kimia dalam perdagangan internasional cukup tinggi, khususnya di Industri Bahan Kimia Industri dan Serat Buatan, yang terutama bersumber dari tingginya tingkat impor. Sementara itu,



Grafik 3.19 Rasio Penetrasi Impor Industri Kimia dan Barang Kimia (KCI 3 digit)



Grafik 3.20 Biaya Material per Output Industri Kimia dan Barang Kimia (KKI 3 digit)



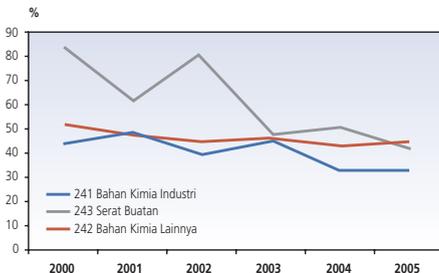
Grafik 3.22 Biaya Tenaga Kerja per Output di Industri Kimia dan Barang Kimia (KKI 3 digit)

berdasarkan orientasi pasarnya, Industri Kimia dapat dikatakan merupakan industri yang berorientasi pada pasar domestik. Hal ini disumbang oleh Industri Bahan Kimia Industri dan Industri Bahan Kimia Lainnya, yang memiliki pangsa pasar lebih dari 90% dari seluruh total output Industri Kimia. Khusus Industri Serat Buatan, orientasi produksinya cenderung kepada pasar internasional.

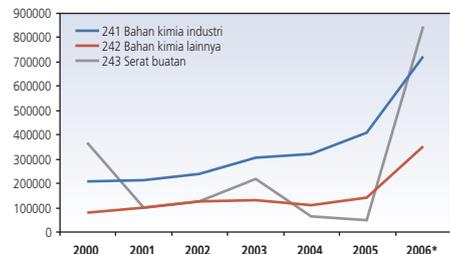
Dari aspek biaya produksi, rasio biaya material per nilai output (UMC) pada Industri Barang Kimia lainnya dan Industri Serat Buatan terlihat mengalami penurunan sejak 2005. Pada Industri Bahan Kimia Industri terjadi sedikit peningkatan rasio UMC ketika rasio penetrasi impor menurun. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan efisiensi yang terjadi bersumber dari sektor domestik.

Dari aspek biaya tenaga kerja, *unit labor cost* (ULC) pada Industri Kimia dan Barang Kimia Lainnya umumnya mulai mengalami penurunan sejak 2005, kecuali untuk Industri Bahan Kimia Industri yang terus berada dalam kecenderungan meningkat sejak 2003. Untuk Industri Serat Buatan, penurunan ULC yang cukup drastis diduga lebih karena melonjaknya output di industri ini dalam dua tahun terakhir. Di sisi lain, produktivitas tenaga kerja di semua jenis Industri Kimia dan Barang Kimia dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan.

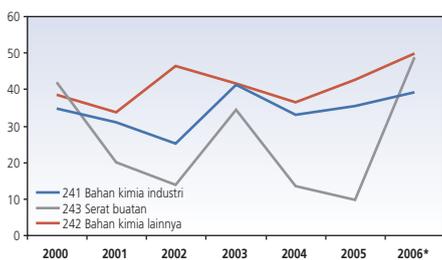
PCM di Industri Kimia dan Barang Kimia secara umum mengalami peningkatan sejak 2004. Meskipun diwarnai dengan tingkat konsentrasi yang cukup tinggi, rata-rata PCM di



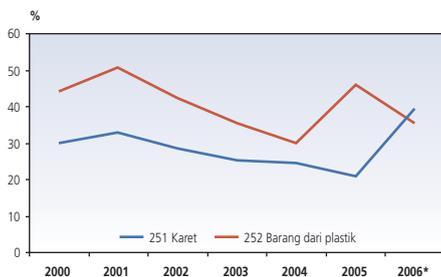
Grafik 3.21 Persentase Penggunaan Bahan Baku Impor Industri Kimia & Barang Kimia (KKI 3 digit)



Grafik 3.23 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Kimia dan Barang Kimia (KKI 3 digit)



Grafik 3.24 Price-Cost Margin Industri Kimia dan Barang-barang Kimia



Grafik 3.25 Tingkat *Openness* Industri Karet dan Barang Plastik (KKI 3 digit)

Industri Kimia dan Barang Kimia masih berada di sekitar PCM rata-rata keseluruhan industri (sekitar 30%).

3.3.4 Industri Karet dan Barang-barang dari Plastik

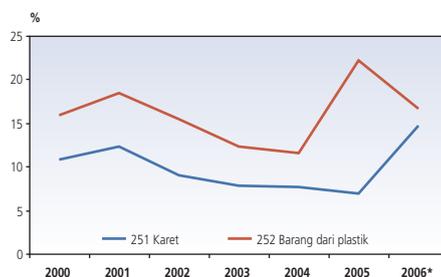
Dilihat dari penghitungan CR4, tingkat konsentrasi di Industri Karet dan Barang-barang Plastik dapat dikatakan tidak terlalu tinggi. Tingkat konsentrasi di Industri Karet relatif lebih tinggi dibandingkan Industri Plastik. Meskipun demikian,

apabila dibandingkan dengan kondisi lima tahun sebelumnya, tingkat konsentrasi di Industri Karet dan Barang-barang Plastik ini secara umum cenderung meningkat.

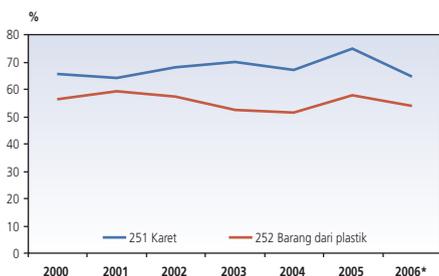
Dilihat dari tingkat keterbukaan perdagangan, eksposur Industri Karet dan Barang Plastik terhadap perdagangan internasional terlihat menurun dari sejak 2002 hingga 2004 untuk Barang dari Plastik dan 2005 untuk Barang dari Karet. Penurunan tersebut bersumber dari terus menurunnya kinerja ekspor Karet maupun Barang Plastik. Di sisi lain, kinerja produksi Karet maupun Barang dari Plastik pada periode yang sama secara umum justru mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar output dari Industri Karet maupun Barang Plastik lebih tertuju ke pasar domestik.

Tabel 3.8 Rasio Konsentrasi Industri Karet dan Barang-barang dari Plastik (KKI 5 Digit)

KKI 5	Industri	2001	2006*
25203	Media Rekam dari Plastik	0,67	1,00
25111	Ban Luar dan Ban Dalam	0,68	0,94
25122	Remilling Karet	0,64	0,86
25192	Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Industri	0,89	0,85
25201	Pipa dan Selang dari Plastik	0,64	0,81
25191	Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga	0,63	0,72
25112	Vulkanisir Ban	0,48	0,71
25205	Kemasan dari Plastik	0,17	0,69
25204	Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	0,54	0,65
25121	Pengasapan Karet	0,60	0,61
25206	Barang-Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik	0,47	0,53
25199	Barang-barang dari Karet yang Belum Termasuk 25191 dan 25192	0,55	0,49
25202	Barang Plastik Lembaran	0,48	0,47
25209	Barang-barang Plastik Lainnya	0,25	0,33
25123	Karet Remah	0,16	0,19



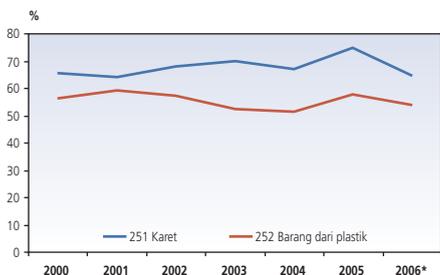
Grafik 3.26 Rasio Penetrasi Impor Industri Karet dan Barang Plastik (KKI 3 digit)



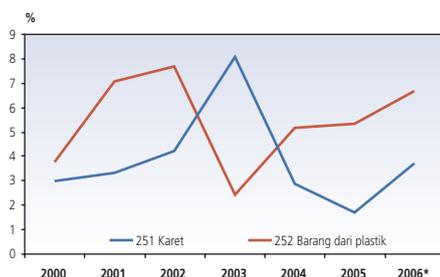
Grafik 3.27 Biaya Material per Output Industri Karet dan Barang dari Plastik (KKI 3 digit)

Dari sisi biaya produksi, perkembangan rasio biaya material per output di Industri Karet dan Barang Plastik dapat dibalang cukup stabil, dengan kata lain tingkat efisiensi di industri ini dalam periode lima tahun relatif tidak mengalami banyak perubahan. Dalam rentang waktu lima tahun tersebut, persentase penggunaan bahan baku impor di kedua industri cenderung mengalami penurunan. Dari sisi biaya tenaga kerja, pengukuran *unit labor cost* (ULC) menunjukkan kecenderungan meningkatnya pengeluaran untuk tenaga kerja di kedua industri setelah 2005. Meskipun demikian, peningkatan biaya tenaga kerja ini ternyata juga sejalan dengan meningkatnya produktivitas di kedua jenis industri.

Sejalan dengan tingkat konsentrasi di Industri Karet dan Barang Plastik yang tidak terlalu tinggi,



Grafik 3.28 Persentase Penggunaan Bahan Baku Impor Industri Karet dan Barang dari Plastik (KKI 3 digit)

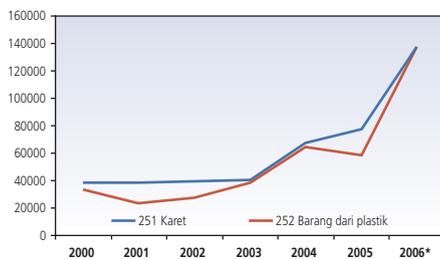


Grafik 3.29 Biaya Tenaga Kerja per Output di Industri Karet dan Barang Plastik (KKI 3 digit)

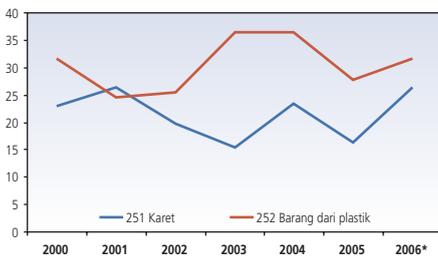
tingkat profitabilitas di industri ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan industri lainnya, seperti tercermin dari angka rata-rata PCM di industri ini yang berada di sekitar angka 25%. Namun demikian, sejak 2006 *mark-up ratio* (PCM) di kedua industri menunjukkan peningkatan. Hal ini tampaknya sejalan dengan naiknya biaya tenaga kerja di industri tersebut, sehingga dapat diduga naiknya *margin* tersebut merupakan upaya produsen untuk mempertahankan pendapatannya.

3.3.5. Industri Logam Dasar

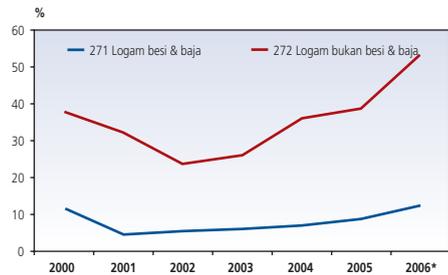
Industri Logam Dasar memainkan peran yang cukup strategis dalam perekonomian nasional yaitu sebagai penyedia bahan dasar bagi sektor lain. Tingkat konsentrasi pasar dalam industri ini cenderung tinggi, yang terlihat dari banyaknya jenis



Grafik 3.30 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Kimia dan Barang Kimia (KKI 3 digit)



Grafik 3.31 Price-Cost Margin Industri Karet dan Barang-Barang Plastik



Grafik 3.32 Tingkat *Openness* Industri Logam (KKI 3 digit)

industri yang memiliki tingkat konsentrasi (CR4) di atas 75%. Tingkat konsentrasi untuk semua jenis industri dalam Industri Logam Dasar ini juga mengalami peningkatan dibandingkan kondisi lima tahun sebelumnya.

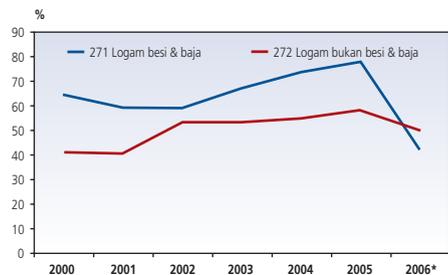
Dilihat dari tingkat keterbukaan perdagangan, eksposur Industri Logam Dasar terhadap perdagangan internasional terus meningkat sejak 2003, yang terutama bersumber dari terus meningkatnya kinerja ekspor logam. Secara umum, persentase nilai output yang diekspor untuk Industri Logam ini cukup tinggi, yakni hampir 60%, sehingga industri ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok industri berorientasi ekspor. Hal ini terutama disumbang oleh Industri Logam Besi dan Baja yang menguasai lebih dari 80% total produksi yang

diekspor. Khusus untuk Industri Logam Bukan Besi dan Baja, terjadi pergeseran orientasi pasar. Hingga 2003, industri ini masih cenderung mengekspor hasil produksinya, namun sejak 2004 output yang dijual ke pasar domestik cenderung meningkat.

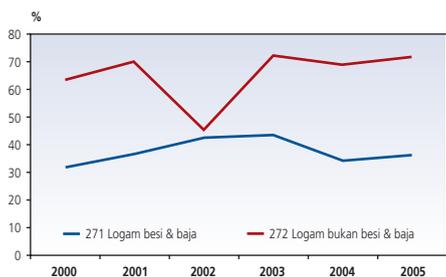
Dari sisi aspek biaya produksi, biaya material per output (UMC) di Industri Logam menunjukkan kecenderungan meningkat, namun tampak mulai menurun memasuki tahun 2006. Meskipun demikian, penurunan tersebut sulit dikaitkan dengan perbaikan tingkat efisiensi mengingat pada saat yang sama kinerja Industri Logam Dasar secara keseluruhan mengalami penurunan cukup drastis. Industri Logam secara umum memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku dan bahan penolong

Tabel 3.9 Rasio Konsentrasi Industri Logam Dasar (KKI 5 Digit)

KKI 5	Industri	2001	2006*
27203	Ekstrusi Logam Bukan Besi	0.92	0.99
27204	Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	0.94	0.98
27102	Penggilingan Baja	0.78	0.96
27101	Besi dan Baja Dasar	0.86	0.89
27202	Penggilingan Logam Bukan Besi	0.62	0.75
27103	Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	0.61	0.69
27201	Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	0.82	0.65



Grafik 3.33 Biaya Material per Output Industri Logam (KKI 3 digit)

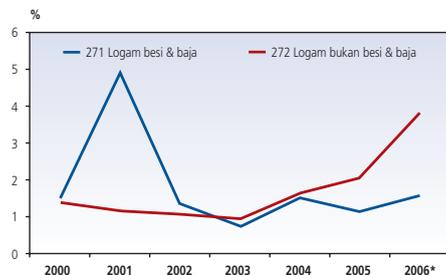


Grafik 3.34 Persentase Penggunaan Bahan Baku Impor Industri Logam (KKI 3 digit)

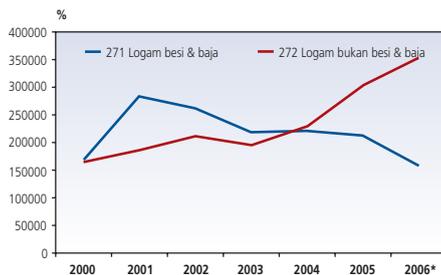
yang berasal dari impor. Hal ini khususnya terdapat pada kelompok Industri Logam Bukan Besi dan Baja, yang orientasi pasarnya mulai bergeser ke pasar domestik.

Dari aspek biaya tenaga kerja, ULC baik pada Industri Logam Besi dan Baja maupun pada Industri Logam Bukan Besi dan Baja terlihat dalam kecenderungan meningkat, yang diduga terkait dengan perkembangan meningkatnya upah buruh manufaktur. Peningkatan biaya tenaga kerja ini mampu dibarengi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja di kelompok Industri Logam Besi dan Baja, namun sayangnya belum mampu diikuti pada kelompok Industri Logam Bukan Besi dan Baja.

PCM pada Industri Logam menunjukkan perkembangan yang berlawanan arah, dimana



Grafik 3.35 Biaya Tenaga Kerja Per Output Industri Logam Dasar (KKI 3 digit)

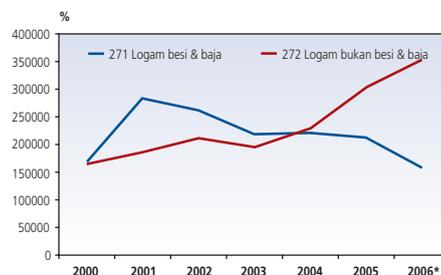


Grafik 3.36 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Logam Dasar (KKI 3 digit)

PCM untuk kelompok Industri Logam Bukan Besi dan Baja cenderung stabil, sementara untuk kelompok Industri Logam Besi dan Baja nampak mengalami penurunan yang cukup cepat sejak 2003. Penurunan nilai PCM pada Industri Logam Besi dan Baja diduga terkait dengan meningkatnya pengeluaran bahan baku di industri tersebut. Meskipun demikian, angka rata-rata PCM untuk Industri Logam secara keseluruhan berada di sekitar angka rata-rata PCM untuk delapan industri manufaktur yaitu sekitar 30%.

3.3.6. Industri Mesin Listrik

Tingkat konsentrasi pasar dalam Industri Mesin Listrik lainnya dan Perlengkapannya tergolong tinggi. Hal terlihat dari rasio konsentrasi (CR4) 8 dari 9 jenis industri yang di atas 75%. Rasio



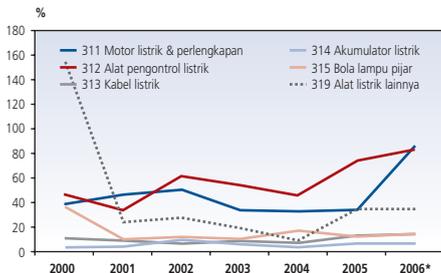
Grafik 3.37 Price-Cosst Margin Industri Logam (KKI 3 digit)

Tabel 3.10 Rasio Konsentrasi Industri Mesin Listrik (KKI 5 Digit)

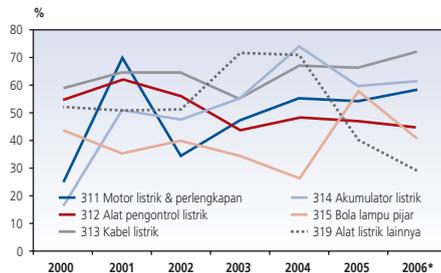
KKI 5	Industri	2001	2006*
31202	Peralatan Pengontrol Arus Listrik	1,00	1,00
31102	Mesin Pembangkit Listrik	0,99	0,99
31300	Kabel Listrik dan Telepon	0,11	0,98
31900	Peralatan Listrik yang Tidak Termasuk dalam Golongan Manapun	0,68	0,94
31501	Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet	0,88	0,93
31401	Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)	0,91	0,88
31201	Panel Listrik dan Switch Gear	0,63	0,87
31402	Akumulator Listrik		
	(Batu Baterai Sekunder)	0,77	0,81
31103	Pengubah Tegangan	0,54	0,71

konsentrasi ini juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada 2001. Perubahan yang cukup mencolok terlihat pada Industri Kabel listrik dan Telepon.

Dari sisi liberalisasi perdagangan, secara umum peran kelompok Industri Mesin Listrik pada pasar internasional cenderung meningkat, kecuali Industri Kabel Listrik dan Alat Listrik Lainnya. Peningkatan eksposur di perdagangan internasional tersebut terutama didorong oleh kinerja ekspor di industri-industri terkait. Sementara itu, penurunan yang terjadi di Industri Kabel Listrik dan Alat Listrik Lainnya lebih dikarenakan adanya peningkatan output yang lebih besar ketimbang



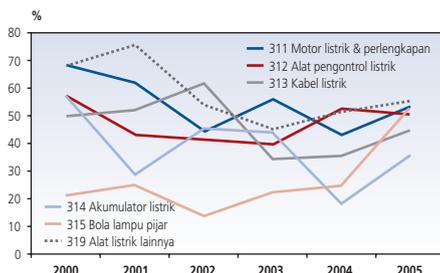
Grafik 3.38 Tingkat *Openness* Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya (KKI 3 digit)



Grafik 3.39 Biaya Material per Output Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya (KKI 3 digit)

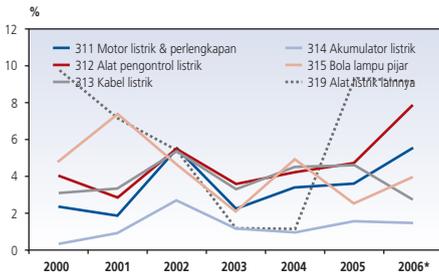
peningkatan di ekspor dan impornya. Berdasarkan orientasi pasarnya, kelompok Industri Mesin Listrik dapat dikatakan merupakan industri yang berorientasi pada pasar ekspor. Hal ini disumbang oleh lima dari enam industri, yakni Industri Motor Listrik dan Perlengkapan, Industri Alat Pengontrol Listrik, Industri Akumulator Listrik, Industri Bola Lampu Pijar, dan Industri Alat Listrik Lainnya yang menguasai pangsa pasar lebih dari 80% dari total output kelompok Industri Listrik. Khusus Industri Kabel Listrik, orientasi produksinya cenderung pada pasar domestik.

Dari sisi biaya produksi, rasio biaya bahan baku per output (UMC) untuk Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya memiliki pergerakan yang bervariasi. Kecuali Industri Alat Listrik Lainnya,



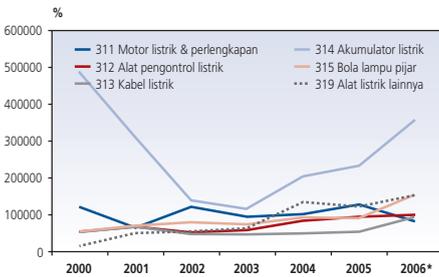
Grafik 3.40 Persentase Penggunaan Bahan Baku Impor Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya (KKI 3 digit)

Bab 3: Organisasi Industri Dan Perilaku Pembentukan Harga Produsen di Industri Manufaktur Indonesia



Grafik 3.41 Biaya Tenaga Kerja per Output di Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perengkapannya (KKI 3 digit)

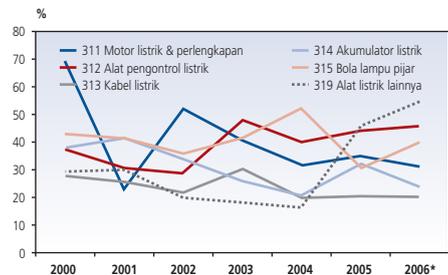
semua industri dalam kelompok industri ini secara umum memiliki tren yang meningkat. Sementara itu, seiring dengan meningkatnya rasio UMC, persentase penggunaan bahan baku impor secara umum memiliki tren yang menurun, kecuali Industri Bola Lampu Pijar. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi pada kelompok industri ini bersumber dari sisi eksternal. Sedangkan pada Industri Bola Lampu Pijar terjadi sebaliknya, yaitu efisiensi mengalami penurunan seiring dengan peningkatan impor bahan baku. Untuk Industri Alat Listrik Lainnya, rasio UMC yang menurun sejalan dengan tren penurunan dalam penggunaan bahan baku impor mengindikasikan bahwa efisiensi ini bersumber dari penggunaan bahan baku domestik.



Grafik 3.42 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perengkapannya (KKI 3 digit)

Dari segi tenaga kerja, biaya tenaga kerja per output (ULC) untuk Industri Mesin Listrik secara umum nampak dalam tren peningkatan, khususnya sejak 2004, kecuali pada Industri Kabel Listrik. Hal ini sejalan dengan perkembangan meningkatnya upah buruh manufaktur. Meskipun demikian, peningkatan pengeluaran untuk tenaga kerja ini pada saat yang sama juga diiringi dengan peningkatan produktivitas di hampir semua kelompok industri.

Price-Cost Margin (PCM) pada Industri Mesin Listrik secara umum dapat dikatakan cukup stabil, yakni masih di sekitar angka rata-rata keseluruhan industri yang berkisar di angka 30%. PCM tertinggi untuk industri ini terdapat pada kelompok Industri Mesin dan Perlengkapan serta Alat Pengontrol Listrik yang berada sedikit di atas angka rata-rata PCM industri manufaktur. Kedua kelompok industri ini juga sekaligus merupakan kelompok industri yang memiliki tingkat konsentrasi tertinggi di Industri Mesin Listrik. Hal ini menguatkan dugaan bahwa tingginya tingkat konsentrasi pasar akan mendorong para pelaku industri untuk menetapkan margin yang lebih tinggi pula. Sementara itu, peningkatan PCM yang cukup pesat terlihat terjadi di Industri Alat Listrik Lainnya pada 2005 yang diduga terkait erat dengan turunnya



Grafik 3.43 Price-Cost Margin Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perengkapannya

output di kelompok industri ini yang dibarengi dengan penurunan penggunaan bahan baku yang cukup tajam.

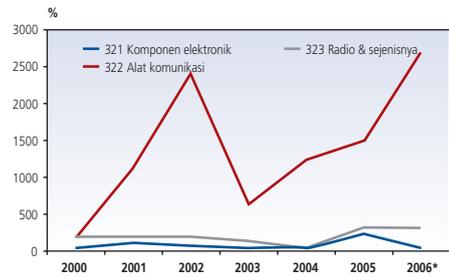
3.3.7 Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Telekomunikasi

Pada Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Telekomunikasi, tingkat konsentrasi pasar yang didekati dengan nilai CR4 menunjukkan bahwa semua industri memiliki rasio konsentrasi di atas 75%. Kondisi ini jauh berbeda dengan pada 2001 dimana hanya ada satu industri yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi. Hal ini diperkirakan akan memicu terjadinya peningkatan *mark-up ratio* oleh para pelaku industri.

Dalam hal keterbukaan perdagangan, peran industri ini terhadap perdagangan internasional cukup besar dengan perkembangan yang stabil, khususnya yang berasal dari kelompok Industri Komponen Elektronik dan Industri Radio dan Sejenisnya. Tingginya tingkat ekspor di kedua kelompok industri ini, yang outputnya mendominasi pangsa pasar di industri ini secara keseluruhan, membuat Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Telekomunikasi ini secara umum dapat digolongkan sebagai industri yang berorientasi ekspor. Sementara itu, Industri Alat Komunikasi lebih berorientasi pada pasar domestik, meskipun tingkat *openness* di industri ini sejak 2004 juga menunjukkan peningkatan pesat sejalan dengan

Tabel 3.11 Rasio Konsentrasi Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Telekomunikasi (KKI 5 Digit)

KKI 5	Industri	2001	2006*
32200	Alat Komunikasi	0,92	0,99
32300	Radio, TV, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya	0,67	0,94
32100	Tabung dan Katub Elektronik dan Komponen Elektronik	0,50	0,79

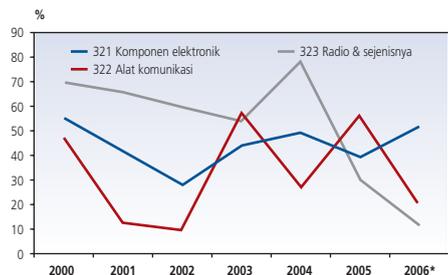


Grafik 3.44 Tingkat Openness Industri Radio, Televisi dan Peralatan Telekomunikasi (KKI 3 digit)

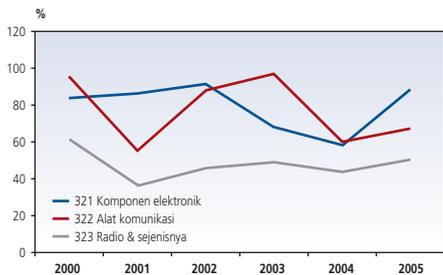
peningkatan ekspor dan impor cukup yang signifikan.

Dalam hal biaya produksi, *unit material cost* (UMC) untuk Industri Radio dan Sejenisnya mengalami penurunan, yang mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi di industri ini. Sebaliknya, tren UMC pada Industri Komponen Elektronik dan Alat Komunikasi cenderung meningkat secara perlahan, sementara persentase penggunaan bahan baku impor memiliki tren menurun. Ini diartikan bahwa efisiensi pada kedua industri ini berasal dari sisi eksternal.

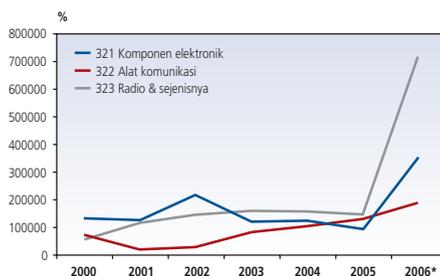
Dari sisi tenaga kerja, biaya tenaga kerja per output (*unit labor cost* - ULC) pada Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi secara umum cenderung mengalami peningkatan, khususnya dari periode 2003-2005, namun kemudian



Grafik 3.45 Biaya Material per Output Industri Radio, Televisi dan Peralatan Telekomunikasi (KKI 3 digit)



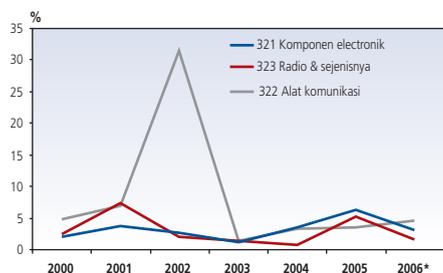
Grafik 3.46 Persentase Penggunaan Bahan Baku Impor Industri Radio, Televisi dan Peralatan Telekomunikasi (KKI 3 digit)



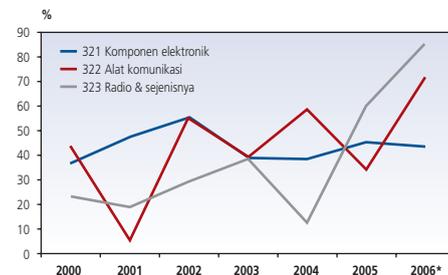
Grafik 3.48 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Radio, Televisi dan Peralatan Telekomunikasi (KKI 3 digit)

cenderung menurun sejalan dengan berkurangnya jumlah tenaga kerja di industri tersebut pada 2006. Sementara itu, tingkat produktivitas di industri ini meningkat pesat akibat adanya peningkatan nilai tambah yang besar, disumbang dari pertumbuhan nilai output yang lebih besar ketimbang pertumbuhan nilai inputnya.

Rata-rata *price-cost margin* (PCM) di industri ini secara umum lebih tinggi dibandingkan rata-rata PCM untuk keseluruhan industri manufaktur. Kondisi ini diduga terkait dengan tingginya *entry barrier* yang dipicu oleh besarnya modal yang diperlukan untuk menjadi pelaku usaha di industri ini. Hal inilah yang menjadi motivasi para pelaku usaha untuk mengambil *mark up ratio* yang tinggi sebagai kompensasi dari biaya yang tinggi pula.



Grafik 3.47 Biaya Tenaga Kerja per Output di Industri Radio, Televisi dan Peralatan Telekomunikasi (KKI 3 digit)



Grafik 3.49 Price-Cost Margin Industri Radio, Televisi dan Alat Komunikasi

3.3.8 Industri Kendaraan Bermotor

Rasio konsentrasi pada Industri Kendaraan Bermotor tergolong tinggi. Pada 2001 hanya Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang memiliki tingkat konsentrasi yang cukup tinggi, namun pada 2006 tingkat konsentrasi di Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih mengalami peningkatan pula. Diduga hal ini disebabkan oleh adanya pembelian beberapa perusahaan ATPM oleh perusahaan tertentu.

Eksposur Industri Kendaraan Bermotor terhadap perdagangan internasional relatif stabil, kecuali di Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang sempat mengalami lonjakan ekspor dan impor yang tinggi pada tahun

Tabel 3.12 Rasio Konsentrasi Industri Kendaraan Bermotor (KKI 5 Digit)

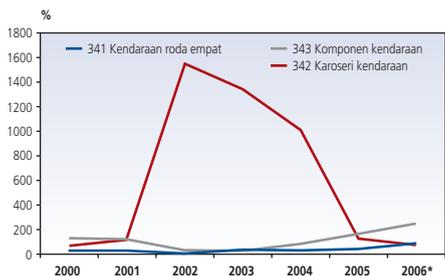
KKI 5	Industri	2001	2006*
34100	Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	0,78	0,99
34200	Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	0,49	0,77
34300	Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	0,43	0,37

2002-2004. Jika dilihat dari besarnya output yang diekspor, orientasi pasar Industri Kendaraan Bermotor ini masih dapat dikatakan berimbang antara yang ke pasar domestik dan ekspor. Untuk kelompok Industri Komponen Kendaraan Bermotor dan Karoseri Kendaraan Bermotor, orientasi pasarnya masih sebagian besar tertuju ke pasar domestik. Sementara itu, kinerja ekspor untuk kelompok Kendaraan Bermotor Roda Empat

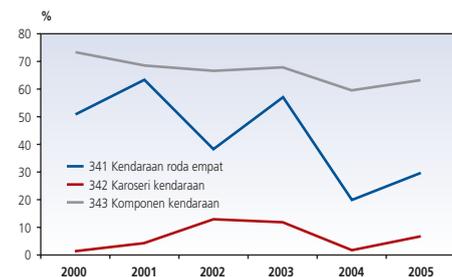
atau Lebih baru tampak menguat memasuki tahun 2004 hingga kini.

Dari sisi biaya produksi, rasio biaya material per output (UMC) pada kelompok Industri Kendaraan Bermotor dapat dikatakan cukup stabil, kecuali Industri Kendaraan Roda Empat yang mengalami peningkatan efisiensi. Kondisi peningkatan efisiensi ini sejalan dengan kecenderungan menurunnya penggunaan bahan baku impor. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi pada Industri Kendaraan Roda Empat bersumber dari sisi domestik.

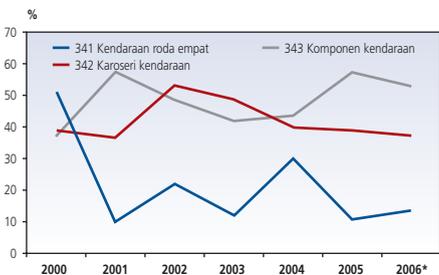
Dari sisi aspek biaya tenaga kerja, *unit labor cost* (ULC) pada Industri Kendaraan Bermotor secara umum berada dalam tren meningkat, yang didorong oleh peningkatan pengeluaran untuk tenaga kerja. Namun di sisi lain, peningkatan ULC ini belum dibarengi dengan peningkatan produktivitas tenaga



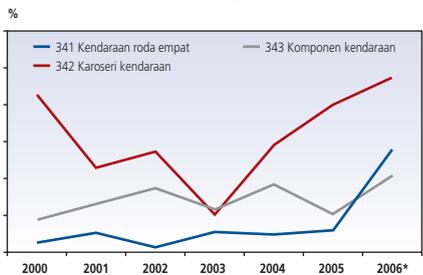
Grafik 3.50 Tingkat *Openness* Industri Kendaraan Bermotor (KKI 3 digit)



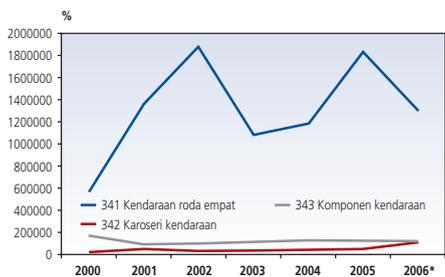
Grafik 3.52 Persentase Penggunaan Bahan Baku Impor Industri Kendaraan Bermotor (KKI 3 digit)



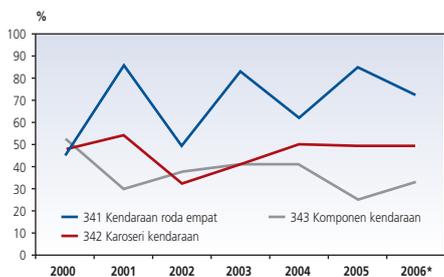
Grafik 3.51 Biaya Material per Output Industri Kendaraan Bermotor (KKI 3 digit)



Grafik 3.53 Biaya Tenaga Kerja per Output di Industri Kendaraan Bermotor (KKI 3 digit)



Grafik 3.54 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Kendaraan Bermotor (KKI 3 digit)



Grafik 3.55 Price-Cost Margin Industri Kendaraan Bermotor

kerja pada Industri Kendaraan Bermotor.

Price-cost margin (PCM) pada Industri Kendaraan Bermotor merupakan yang tertinggi diantara delapan industri manufaktur utama, dengan angka rata-rata PCM mencapai 50%. Angka PCM tertinggi terdapat pada kelompok Industri Kendaraan Roda Empat. Tingginya tingkat PCM ini diduga terkait dengan tingginya tingkat konsentrasi pada industri ini. Selain itu, perkembangan *mark-up ratio* di industri ini juga terlihat berada dalam tren peningkatan.

3.4. Pengujian Model dan Analisis Hasil Estimasi

Analisis deskriptif terhadap beberapa kelompok industri tersebut di atas perlu didukung oleh analisis dengan pendekatan kuantitatif agar dapat memberikan kesimpulan yang lebih

konklusif. Dalam penelitian ini, perilaku produsen dalam pembentukan harga akan dicoba dijelaskan dengan menggunakan pendekatan *structure-conduct-performance* (SCP). *Price-cost margin* sebagai proksi dari perilaku pembentukan harga produsen di suatu industri akan coba dijelaskan dengan beberapa variabel yang dianggap mempengaruhi struktur pasar, diantaranya tingkat konsentrasi, tingkat efisiensi, keterbukaan dengan perdagangan internasional, biaya tenaga kerja per ouput, serta tingkat penetrasi impor dalam industri tersebut. Selain itu, untuk menjelaskan perilaku harga produsen di suatu industri terkait dengan siklus bisnis dalam industri tersebut, maka variabel siklikal (*cyclical*) juga turut dimasukkan sebagai salah faktor yang turut mempengaruhi *price-cost margin*. Dari hasil pengujian akan dapat diketahui apakah perilaku pembentukan harga produsen bersifat *pro-cyclical* atau *counter-cyclical*. Perilaku harga yang bersifat *pro-cyclical* menunjukkan bahwa ketika suatu industri berada dalam kondisi ekspansi, maka produsen akan meningkatkan *mark-up ratio*. Sebaliknya apabila perilaku harga bersifat *counter-cyclical*, maka bila industri tersebut berada dalam kondisi ekspansi, produsen justru akan menurunkan *mark-up ratio*. Dalam proses terjadinya inflasi, perilaku harga yang bersifat *pro-cyclical*, diduga merupakan salah satu sumber terjadinya inflasi. Secara konseptual teoretis, bagaimana selayaknya perilaku harga *mark-up* dalam siklus bisnis sampai saat ini belum dapat dipastikan. Meskipun demikian, telah cukup banyak penelitian yang dilakukan untuk mengkaji hal ini. Penelitian Hall (1988) terhadap industri di AS menunjukkan perilaku harga produsen yang bersifat *pro-cyclical*. Selain itu, penelitian yang dilakukan Small (1997) terhadap industri

manufaktur dan jasa di Inggris juga menunjukkan hal serupa. Namun, penelitian yang cukup komprehensif dari Martins et al. (1996) terhadap industri di 14 negara OECD menemukan perilaku harga produsen yang bersifat *counter-cyclical*.

3.4.1. Hasil Analisis Pengujian Ekonometrik¹⁴

Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode data panel yang merupakan kombinasi antara data *time-series* dan *cross-section*. Metode ini digunakan sebagai solusi dalam keterbatasan jumlah data agar dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih baik. Pengujian ekonometrik dilakukan terhadap delapan sektor industri berdasarkan KKI 3 digit, yaitu 1) Industri Makanan dan Minuman, 2) Tekstil, 3) Kimia, 4) Karet, 5) Logam Dasar, 6) Mesin Listrik, 7) Radio, Televisi, dan Peralatan Telekomunikasi, dan 8) Kendaraan Bermotor. Industri-industri tersebut dipilih berdasarkan nilai outputnya yang cukup besar terhadap total output industri (sekitar 63% dari total output industri manufaktur).

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, **tingkat konsentrasi pasar (CR4) secara umum mempengaruhi hampir sebagian besar industri yang diuji, kecuali Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Telekomunikasi.** Untuk Industri Tekstil, Kimia, dan Mesin Listrik dan Kendaraan Bermotor Roda Empat, tanda dari koefisien konsentrasi pasar sesuai dengan hipotesis yaitu positif. Hal ini menunjukkan bahwa di industri-industri tersebut peningkatan konsentrasi di pasar akan memperkecil kompetisi yang pada akhirnya akan mendorong produsen

untuk menetapkan harga yang semakin menjauhi biaya marginalnya. Yang menarik, untuk Industri Makanan dan Minuman, Karet serta Logam Dasar, variabel konsentrasi pasar ditemukan signifikan namun bertanda negatif, sehingga bertentangan dengan hipotesis. Dengan kata lain, untuk ketiga jenis industri ini, tingkat konsentrasi yang tinggi di pasar justru membuat produsen menjalankan strategi harga seperti dalam pasar yang tingkat persaingannya tinggi. Penjelasan untuk hal ini kemungkinan adalah tingkat konsentrasi yang tinggi menyebabkan produsen dapat menjalankan strategi untuk mencegah masuknya kompetitor baru dengan cara menetapkan margin keuntungan yang tidak terlalu tinggi. Hal ini didukung oleh penghitungan Nilai *Minimum Efficiency Scale* (MES) untuk industri-industri tersebut yang rata-rata lebih besar dari 10%. Menurut Comanor dan Wilson (1967) dalam Alistair (2004), MES yang lebih besar dari 10% menggambarkan hambatan masuk yang tinggi pada suatu industri.

Tingkat efisiensi material (*unit material cost - UMC*) di semua jenis industri adalah signifikan dengan tanda negatif, yang berarti sesuai dengan hipotesis. Selain itu, besarnya pengeluaran untuk tenaga kerja (*unit labor cost - ULC*) juga secara signifikan mempengaruhi perilaku pembentukan harga produsen, kecuali di Industri Logam Dasar dan Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Telekomunikasi. Tanda dari parameter hasil uji semuanya negatif, yang berarti sesuai dengan hipotesis. Dengan demikian, semakin efisien industri tersebut, semakin besar kontribusinya pada penurunan biaya yang pada gilirannya memberi ruang untuk menaikkan margin keuntungan. Selain itu, margin keuntungan dari produsen akan semakin menipis seiring dengan semakin tingginya pengeluaran untuk tenaga kerja.

14 Uraian secara lebih lengkap dapat dilihat pada Bab 5 Topikal Isu : "Perilaku Produsen Terhadap Pembentukan Harga di Tingkat Konsumen pada Industri manufaktur Indonesia: Pendekatan dengan Analisis *Structure-Conduct-Performance*".

Tabel 3.13 Hasil Estimasi

	Industri Makanan dan Minuman	Industri Tekstil	Industri Kimia	Industri Karet	Industri Logam Dasar	Industri Mesin Listrik	Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Telekomunikasi	Industri Kendaraan Bermotor
CR 4	-0.215 (-2.79)**	0.127 (4.83)***	0.233 (7.52)***	-0.105 (-2.59)**	-0.271 (10.28)***	0.105 (2.81)***	0.099 (1.22)	0.16 (1.74)*
ULC	-1.396 (-10.04)***	-0.883 (-3.86)***	-0.833 (-7.53)***	-0.837 (-7.48)***	0.61 (0.94)	-0.972 (-3.21)***	0.095 (0.15)	-1.079 (-10.65)***
UMC	-0.969 (-13.18)***	-0.956 (-10.9)***	-0.861 (-27.75)***	-1.234 (-26.59)***	-0.866 (-5.11)***	-0.848 (-12.11)***	-0.995 (-7.88)***	-1.09 (-10.7)***
IPR	-	-	-0.006 (-2.86)**	-	0.229 (2.09)*	0.02 (0.96)	-	-0.008 (-0.36)
IPR*TYPE	-	-0.025 (-2.61)**	-	-	-	-	-	-
CR4*OPEN	0.111 (1.45)	-	-	-	-	0.004 (1.83)*	-	-
CR4*IPR	-	-	-	-	-	-0.037 (-1.07)	-	-
CYCL	0.108 (1.509)	-0.065 (-3.2)***	0.0356 (2.83)**	0.0415 (3.13)**	0.081 (-1.54)	-	0.288 (1.92)*	-0.051 (-1.97)*
CYCL*TYPE	-0.116 (-1.75)*	0.063 (3.06)***	-0.0359 (-2.41)**	-	-	0.047 (1.82)*	-0.262 (-1.81)*	-
Adj. R2	0.978	0.914	0.992	0.997	0.947	0.933	0.853	0.998
DW-stat	2.466	2.108	2.107	3.035	2.29	2.31	1.932	2.254

(*) tingkat signifikansi 10%

(**) tingkat signifikansi 5%

(***) tingkat signifikansi 1%

Angka dalam kurung merupakan t-stat

Dampak keterbukaan pada perdagangan internasional, yang diukur dengan menggunakan tingkat keterbukaan (*OPEN*) dan rasio penetrasi impor (*IPR*) terhadap PCM di berbagai industri menunjukkan hasil yang bervariasi. Untuk Industri Karet, dampak perdagangan internasional cukup berpengaruh dalam pembentukan harga di tingkat produsen. Untuk Industri Logam Dasar, parameter untuk Industri Mesin Listrik keterbukaan bersifat signifikan namun memiliki tanda positif, sehingga tidak sesuai dengan hipotesis. Untuk industri mesin listrik, parameter untuk tingkat keterbukaan merupakan interaksi antara *openness* dengan struktur pasar di industri tersebut. Uji yang dilakukan menghasilkan tanda yang signifikan, yang menunjukkan bahwa pengaruh keterbukaan perdagangan akan lebih kuat di industri yang tingkat konsentrasinya lebih tinggi. Namun karena

tanda yang diperoleh adalah positif, maka serupa dengan Industri Logam Dasar, keterbukaan perdagangan di Industri Mesin Listrik dapat dikatakan belum berhasil mengarahkan produsen untuk menjalankan strategi harga yang semakin kompetitif. Sementara itu, hasil uji untuk Industri Kimia dan Kendaraan Bermotor menunjukkan bahwa secara umum keterbukaan perdagangan telah menghasilkan parameter yang signifikan dengan tanda negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa meningkatnya keterbukaan telah membawa penurunan *price-cost margin* di industri tersebut.

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, perilaku harga produsen secara umum bersifat *counter-cyclical*, khususnya untuk industri yang memiliki pangsa pasar yang besar. Berbagai hasil kajian telah menunjukkan bahwa perilaku harga produsen

merupakan salah satu faktor penyebab inflasi. Berdasarkan hal ini, upaya untuk mengkaji perilaku pembentukan harga produsen terkait dengan siklus bisnis menjadi penting untuk dilakukan. Dalam kondisi ekspansi bisnis, perilaku harga produsen yang bersifat *pro-cyclical* patut diduga merupakan salah satu sumber terjadinya inflasi. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, perilaku harga produsen secara umum bersifat *counter-cyclical*, khususnya untuk industri yang memiliki pangsa pasar yang besar. Hal ini terjadi di Industri Makanan dan Minuman, Kimia, dan Kendaraan Bermotor. Sementara itu, perilaku pembentukan harga produsen di Industri Tekstil secara umum bersifat *counter-cyclical*. Fenomena ini sangat menarik, mengingat industri dengan pangsa besar sebenarnya lebih memiliki ruang untuk menaikkan *mark-up cost*. Beberapa hal yang diduga mendasari hal ini diantaranya adalah adanya semacam kesepakatan (*tacit collusion*) diantara para pelaku usaha besar untuk menekan harga dalam upaya mencegah masuknya kompetitor baru. Hal ini didukung oleh penghitungan nilai *Minimum Efficiency Scale* (MES) pada industri manufaktur di Indonesia yang rata-rata lebih besar dari 10%. Selain itu, kondisi daya beli masyarakat serta elastisitas permintaan terhadap harga dari suatu produk dapat juga menjadi pertimbangan. Sementara itu, untuk Industri Karet, Motor Listrik, Radio, Televisi, dan Peralatan Telekomunikasi, perilaku harga produsen lebih bersifat *pro-cyclical*. Untuk Industri Logam Dasar, perilaku pembentukan harga oleh produsen nampaknya tidak terkait dengan situasi siklus bisnis. Hal ini kemungkinan

besar disebabkan karena sebagian besar output dari Industri Logam Dasar ditujukan untuk ekspor, sehingga orientasi produsen dalam pembentukan harga lebih ke kondisi eksternal ketimbang domestik.

3.5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis deskriptif dan kuantitatif yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Struktur industri di Indonesia secara umum diwarnai dengan tingkat konsentrasi yang tinggi serta *entry barrier* yang tinggi pula.
- Dengan karakteristik di atas, dorongan bagi produsen untuk memperbesar *mark-up* menjadi lebih besar, ditambah lagi dengan karakteristik beberapa pelaku industri yang bersifat *pro-cyclical*.
- Namun, hasil analisis dan pengujian menunjukkan bahwa tidak semua industri yang memiliki rasio konsentrasi dan *entry barrier* tinggi memiliki *mark-up* yang tinggi, contohnya adalah pada Industri Makanan Minuman dan Tekstil.
- Beberapa dugaan untuk menjelaskan hal di atas diantaranya adalah bahwa rasio konsentrasi yang tinggi memungkinkan pelaku usaha untuk menciptakan semacam *entry barrier* yang tinggi dengan menekan *price-cost margin*. Selain itu, kondisi permintaan di pasar serta elastisitas permintaan terhadap harga dari suatu produk juga menjadi pertimbangan.

Bab 4: Prospek Ekonomi Jangka Menengah

4.1 Asumsi Perekonomian Global 2008-2013

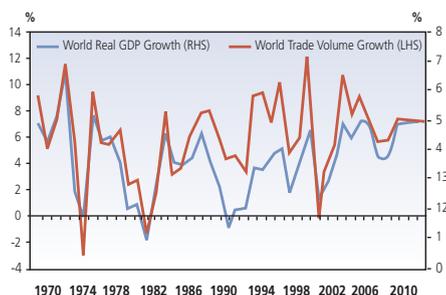
a. Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Perkembangan perekonomian dunia sampai dengan 2009 diperkirakan masih belum begitu baik. Hal ini tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2008 dan 2009 yang diperkirakan akan menjadi 3,9% dan 3.7%.¹ Harga komoditas yang masih tinggi dan tidak stabil serta perkiraan berlanjutnya turbulensi di pasar menjadi faktor yang menyebabkan dikoreksinya angka perkiraan pertumbuhan tersebut. Sementara, pertumbuhan di negara-negara maju mengalami perlambatan, pertumbuhan di negara-negara berkembang masih tetap tinggi, terutama disumbang oleh Cina, India, dan Rusia. Diperkirakan dalam jangka menengah (2010-2013) pertumbuhan ekonomi dunia akan tumbuh rata-rata 4,75%, lebih tinggi daripada tren jangka panjangnya. Sejalan dengan korelasi positif antara volume perdagangan dunia dan pertumbuhan ekonomi dunia (Grafik 4.1), volume perdagangan dunia pada 2008 diperkirakan akan sedikit melambat menjadi 6,1%. Namun dalam jangka menengah, seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia, volume perdagangan dunia diperkirakan tumbuh rata-rata 6,95% dan diperkirakan akan memberikan efek yang positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

b. Harga Komoditas Dunia

Harga minyak mentah dunia terus merangkak naik dan senantiasa mencetak rekor

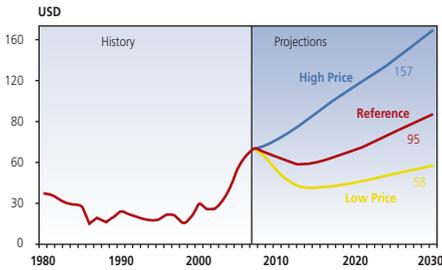
¹ Angka proyeksi IMF, disampaikan sebagai catatan pertemuan Deputy Menteri Keuangan dari negara-negara kelompok G-20, tanggal 30 Agustus di Rio de Janeiro.



Sumber : IMF, World Economic Outlook, April 2008

Grafik 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Volume Perdagangan Dunia

baru dari waktu ke waktu. Bahkan pada awal Juli 2008, harga minyak mentah dunia sempat menembus USD145 per barrel. Tingginya harga minyak ini disebabkan oleh tingginya permintaan dunia, rendahnya *spare* kapasitas produksi, dan terjadinya gangguan geopolitik di beberapa negara pengekspor minyak seperti Irak, Venezuela, dan Nigeria. Tingginya harga komoditas di satu sisi masih mendukung kinerja ekspor negara-negara penghasil sumber daya alam, namun memberi tekanan pada *trade balance* negara pengimpor minyak. Diperkirakan dalam jangka menengah harga minyak masih tetap tinggi. EIA dalam publikasi *Short-Term Energy Outlook* edisi Agustus 2008 memperkirakan secara rata-rata harga minyak sepanjang 2008 di sekitar USD119 per barrel. Tingginya harga minyak dunia saat ini (pada kisaran USD120 - USD140 per barrel) diperkirakan bersifat temporer. Ke depan, harga minyak diperkirakan berangsur-angsur akan turun meskipun masih tetap tinggi. Masih tumbuhnya ekonomi Amerika Serikat dapat memicu menguatnya dollar AS sehingga berpotensi



Sumber : International Energi Outlook dari IEA

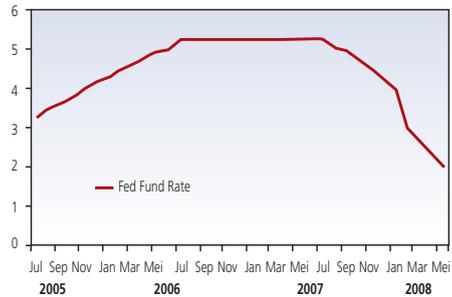
Grafik 4.2 Perkembangan dan Proyeksi Harga Minyak Dunia

mengurangi tekanan terhadap kenaikan harga komoditas. Selain itu, sejalan dengan kenaikan investasi migas, peningkatan penggunaan *biofuel* dan upaya diversifikasi energi yang banyak dilakukan oleh negara-negara pengimpor BBM, harga minyak diperkirakan akan stabil pada harga keseimbangan sekitar USD110 per barrel hingga tahun 2013.

Harga pangan dunia mengalami kenaikan signifikan pada paruh pertama 2008. Harga beras meningkat akibat buruknya distribusi dan gangguan cuaca di beberapa negara sumber produksi bahan pangan. Harga komoditas jagung dan gandum juga meningkat akibat adanya konversi bahan bakar fosil ke bahan bakar nabati (*biofuel*). Hingga akhir 2008, diperkirakan harga komoditas primer nonmigas secara umum masih tinggi dan berangsur-angsur akan turun seiring adanya perbaikan kapasitas produksi (*supply side*) mulai tahun 2009. Namun, proyeksi harga komoditas primer nonmigas ini sangat ditentukan oleh perkembangan permintaan dunia.

c. Suku Bunga Internasional

Hingga semester pertama 2008, harga komoditas baik migas maupun nonmigas masih tinggi sehingga memberi tekanan pada kenaikan inflasi. Target inflasi hampir sebagian besar negara



Grafik 4.3 Perkembangan Fed Fund Rate

akan terlampaui. Tekanan inflasi diperkirakan akan tetap tinggi sejalan dengan persistennya harga komoditas pada tingkat yang tinggi. Sebagai respons terhadap tingginya tekanan inflasi, secara umum bank sentral di Asia, kecuali Jepang, menempuh kebijakan moneter ketat. Sedangkan untuk BOJ dan ECB, potensi inflasi domestik yang masih tinggi menyebabkan tingkat suku bunga tetap dipertahankan, yaitu masing-masing 0,5% dan 4%. Sementara itu, di tengah risiko meningkatnya inflasi, The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga *Fed Fund Rate* sebesar 2% pada tahun 2008 guna menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Namun dengan semakin baiknya kondisi perekonomian AS, diperkirakan suku bunga *Fed Fund rate* akan naik secara gradual ke posisi 3% pada tahun 2013. The Fed juga menekankan stabilitas pasar keuangan sebagai salah satu keberhasilan mekanisme transmisi kebijakan moneter.

d. Aliran FDI Global

Aliran modal FDI global diperkirakan akan terus meningkat sampai tahun 2011. Setelah diperkirakan akan mengalami koreksi pada 2008, pertumbuhan aliran FDI global baik di negara maju maupun negara berkembang diperkirakan akan kembali meningkat sampai tahun 2011 (Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Proyeksi FDI

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
World FDI Inflows	618.1	563.4	730.2	971.7	1335.1	1474.7	1406.4	1470.3	1536.8	1604.0
% change, year on year	-27.4	-8.8	29.6	33.1	37.4	10.5	-4.6	4.5	4.5	4.4
% of GDP	1.9	1.5	1.8	2.2	2.8	2.8	2.5	2.5	2.4	2.4
FDI inflows to developed countries	421.1	354.6	379.5	546.8	824.4	940.2	879.0	925.5	972.6	1017.3
% change, year on year	-25.2	-15.8	7.0	44.1	50.7	14.0	-6.5	5.3	5.1	4.6
% of GDP	1.7	1.3	1.2	1.7	2.4	2.6	2.3	2.3	2.3	2.4
% of world total	68.1	62.9	52.0	56.3	61.7	63.8	62.5	62.9	63.3	63.4
FDI inflows to emerging markets	197.0	208.9	350.7	424.9	510.7	534.6	527.4	544.8	564.2	586.7
% change, year on year	-31.5	6.0	67.9	21.1	20.2	4.7	-1.3	3.3	3.6	4.0
% of GDP	2.5	2.4	3.4	3.5	3.6	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4
% of world total	31.9	37.1	48.0	43.7	38.3	36.2	37.5	37.1	36.7	36.6
World stock of inward FDI	7.185	8.615	9.981	10.455	12.216	13.622	14.955	16.347	17.796	19.307
% change, year on year	11,4	19,9	15,9	4,7	16	11,5	9,8	9,3	8,9	8,5
% of GDP	22,1	23,6	24,3	23,6	25,6	25,9	26,5	27,4	28,3	29,0
Developed country stock of inward FDI	5.151	6.246	7.189	7.265	8.510	9.441	10.306	11.216	12.171	13.169
% change, year on year	20,7	21,2	15,1	1,1	17,1	10,9	9,2	8,8	8,5	8,2
% of GDP	20,6	22,2	23,0	22,3	24,9	25,6	26,4	27,8	29,2	30,4
% of world total	71,7	72,5	72,0	69,5	69,7	69,3	68,9	68,6	68,4	68,2
Emerging markets stock of inward FDI	2.034	2.369	2.792	3.189	3.706	4.181	4.649	5.130	5.626	6.139
% change, year on year	-6,8	16,5	17,9	14,2	16,2	12,8	11,2	10,4	9,7	9,1
% of GDP	26,2	27,1	27,2	26,3	26,3	25,7	25,6	25,7	25,6	25,3
% of world total	28,3	27,5	28,0	30,5	30,3	30,7	31,1	31,4	31,6	31,8

Source: National Statistics, IMF, OECD, UNCTAD, The Economist Intelligent Unit

4.2 Asumsi Perekonomian Indonesia 2008-2013

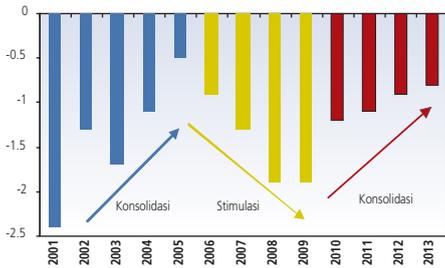
Prospek perekonomian Indonesia selama lima tahun ke depan akan didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi makro melalui reformasi struktural serta efek positif dari sisi eksternal berupa membaiknya permintaan dunia. Tantangan terbesar yang akan terus dihadapi adalah dari sektor eksternal yang berasal dari tingginya harga minyak dan harga komoditas pangan dunia.

a. Kondisi Keuangan Pemerintah

Kebijakan fiskal ke depan akan tetap diarahkan untuk konsolidasi fiskal dengan tetap mempertahankan adanya stimulus bagi perekonomian domestik. Dalam rangka tetap menjaga konsolidasi fiskal tersebut, defisit ini

diperkirakan berangsur-angsur akan berkurang (Grafik 4.4).

Defisit fiskal pada tahun 2009 direncanakan sebesar 1,9% terhadap PDB atau menurun sebesar 0,2% dari target defisit pada APBN-P 2008 sebesar 2,1%. Penurunan tersebut seiring dengan upaya untuk meningkatkan penerimaan negara, upaya penurunan belanja subsidi terutama melalui pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dan listrik, serta upaya untuk membagi beban yang dihadapi antara Pemerintah pusat dan daerah melalui reformulasi dana perimbangan yang lebih adil. Pemerintah diperkirakan tetap optimis dengan kondisi perekonomian Indonesia pada 2009, tercermin dari penetapan target pendapatan negara dalam APBN dipatok pada Rp 1.022,6



Grafik 4.4 Perkembangan Kebijakan Fiskal

Tiliun atau 14,3% lebih tinggi dari target pada APBN-P 2008 yang hanya Rp 895 Triliun.

Dalam kondisi kinerja perekonomian global yang masih melambat, kebijakan fiskal mempunyai peran lebih strategis dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Berdasarkan arah, kebijakan fiskal dimaksudkan untuk mencapai tiga

prioritas utama yaitu peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan, percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan penguatan daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi tanpa mengabaikan upaya dalam peningkatan antikorupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Kerangka APBN Jangka Menengah berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2009 mengungkapkan bahwa berdasarkan asumsi yang ditetapkan, antara lain dapat ditingkatkannya pertumbuhan ekonomi, pulihnya perekonomian dunia, semakin kondusifnya iklim usaha dalam negeri dengan didukung komitmen pemerintah untuk terus menstimulus perekonomian, maka diperkirakan kondisi defisit APBN dalam beberapa tahun ke depan akan sedikit mengalami penurunan

Tabel 4.2 Kerangka Asumsi Makro Jangka Menengah

Indikator Ekonomi Makro	APBN-P 2008	RAPBN 2009	Proyeksi 2010	Proyeksi 2011	Proyeksi 2012
1. Pertumbuhan ekonomi (%)	6,4	6,2	6,5 - 6,7	6,7 - 6,9	6,9 - 7,1
2. Inflasi (%)	6,5	6,5	5,5 - 6,0	5,0 - 5,5	5,0 - 5,5
3. Nilai Tukar (Rp/US\$)	9.100	9.100	9.200 - 9.300	9.200 - 9.300	9.200 - 9.300
4. Suku Bunga SBI 3 bulan (%)	7,50	8,50	7,00 - 7,50	7,00 - 7,50	7,00 - 7,50
5. Harga Minyak ICP (US\$/barell)	95,0	130,0	110,0 - 120,0	110,0 - 120,0	110,0 - 120,0
6. Lifting Minyak (juta barell/hari)	0,927	0,950	0,950	0,950	1,001

Sumber : Departemen Keuangan

Tabel 4.3 Kerangka APBN Jangka Menengah (persen terhadap PDB)

Uraian	APBN-P 2008	RAPBN 2009	Proyeksi 2010	Proyeksi 2011	Proyeksi 2012
A. Pendapatan Negara & Hibah	20,0	21,2	19,1 - 19,6	18,8 - 19,2	19,0 - 19,3
B. Belanja Negara	22,1	22,7	20,3 - 20,8	19,9 - 20,3	19,9 - 20,2
a. Belanja Pemerintah Pusat	15,5	16,4	14,4 - 14,9	14,1 - 14,5	14,0 - 14,3
b. Transfer ke Daerah	6,5	6,3	5,9 - 5,9	5,8 - 5,8	5,9 - 5,9
C. Keseimbangan Primer	0,0	0,6	0,6 - 0,7	0,6 - 0,6	0,7 - 0,7
D. Surplus / (Defisit)	(2,1)	(1,5)	(1,2) - (1,2)	(1,1) - (1,1)	(0,9) - (0,9)
E. Pembiayaan	2,1	1,5	1,2 - 1,2	1,1 - 1,1	0,9 - 0,9

Sumber : Departemen Keuangan

secara bertahap ke arah tingkat di bawah 1% PDB pada tahun 2012.

Untuk mencapai defisit pada tingkat tersebut, penerimaan pajak diharapkan dapat terus tumbuh mendekati 20% per tahun dan dioptimalkan sehingga dapat mencapai rasio perpajakan terhadap PDB sekitar 15% pada 2012. Perkiraan peningkatan penerimaan perpajakan akan sangat dipengaruhi oleh beberapa kebijakan, seperti implementasi amandemen UU perpajakan yang telah dan sedang dilakukan, dimana dalam jangka pendek akan berdampak hilangnya sejumlah potensi penerimaan perpajakan, namun dalam jangka menengah dan panjang akan memperkuat basis pajak dan kembali mempercepat kenaikan penerimaan ke depan.

b. Suku Bunga Domestik

Bergejolaknya pasar keuangan, tetap tingginya harga komoditas baik migas maupun nonmigas serta melambatnya perekonomian dunia menyebabkan semakin kompleksnya pengelolaan kebijakan moneter di Indonesia. Tekanan yang cukup berat terhadap perekonomian Indonesia menyebabkan meningkatnya tekanan inflasi pada tahun 2008 sehingga diperkirakan melampaui target yang ditetapkan. Bank Indonesia akan tetap konsisten menerapkan *Inflation Targeting Framework* (ITF) dalam rangka mencapai inflasi yang rendah dan stabil, yang terintegrasi dalam serangkaian kebijakan makro ekonomi dan sektoral. Dalam hal ini, penetapan BI rate senantiasa konsisten dengan pencapaian target inflasi, namun dengan tidak menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Dengan mempertimbangkan proses momentum pertumbuhan ekonomi yang masih berjalan, adanya persistensi inflasi dan permanen

inflasi dan kebijakan moneter yang belum sepenuhnya kredibel (*imperfect credibility*) Bank Indonesia telah menetapkan BI rate secara gradual dan terukur guna menghindari *output loss* dan *sacrifice ratio* yang besar.

c. Aliran Masuk FDI

Aliran masuk FDI ke Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, sementara upaya Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter diperkirakan akan memberikan ruang lebih luas bagi upaya Pemerintah dalam menggerakkan sektor riil.² Di samping itu, Pemerintah juga terus melakukan perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, reformasi sektor keuangan dan pemberdayaan UMKM. Berbagai upaya ini diperkirakan akan menciptakan kondisi kondusif bagi masuknya FDI ke Indonesia. Hasil survei UNCTAD dan *Economist Intelligence Unit* (EIU) dari *The Economists* menyatakan bahwa aliran masuk FDI ke Indonesia diperkirakan masih positif. Prediksi ini terutama didasarkan pada besarnya pasar domestik dan potensi perkembangannya yang dinilai cukup tinggi untuk mengimbangi risiko yang ada.

2 Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan. Melalui Menko Perekonomian, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2008 mengenai Fokus Program Ekonomi 2008-2009 yang memuat 8 bidang yaitu kebijakan perbaikan iklim investasi, kebijakan ekonomi makro dan keuangan, kebijakan ketahanan energi, dan kebijakan sumber daya alam, lingkungan dan pertanian. Empat bidang lainnya adalah kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kebijakan pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN, kebijakan menyangkut infrastruktur, dan kebijakan menyangkut ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Di sisi lain, **Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD masih memasukkan Indonesia sebagai negara nomor 7 paling parah** dalam menghambat calon-calon investor asing (peringkat ke-38 dari 44 negara). Sebenarnya Indonesia dinilai sudah mulai berhasil dalam menyederhanakan standar penyeleksian calon penanam modal, sistem notifikasi, dan prosedur perizinan usaha. Namun Indonesia masih menerapkan pembatasan kepemilikan usaha di berbagai sektor.

Namun demikian, **Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menyatakan posisi Indonesia sebagai negara tujuan investasi bagi pemodal Jepang mulai meningkat** dari peringkat ke-9 pada 2006 menjadi peringkat ke-8 pada 2007. Survei global AT Kearney juga menempatkan Indonesia di peringkat ke-21 dalam *Foreign Direct Investment (FDI) Confidence Index 2007*. Padahal, dalam satu dekade sebelumnya Indonesia tak pernah masuk dalam peringkat 25 besar negara yang paling menarik bagi investasi asing.

d. Reformasi Struktural dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Guna Perbaikan Iklim Investasi

Reformasi struktural dan peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan akan sukses seiring dengan adanya sinergi yang semakin baik antara pemerintah dan bank sentral dalam menciptakan stabilitas ekonomi makro dan iklim yang kondusif bagi investasi. Perbaikan iklim investasi meliputi: 1) Kelembagaan, Penyederhanaan Perizinan Usaha dan Pendaftaran Tanah; 2) Kelancaran Arus Barang dan Kepabeanaan; dan 3) Perpajakan.

Dengan adanya sejumlah kebijakan perbaikan iklim investasi, diperkirakan akan

menciptakan kondisi kondusif bagi masuknya FDI ke Indonesia serta tumbuhnya ekspor. Masuknya FDI ini berimplikasi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi (*total factor productivity*-TFP) proses produksi, sebagai dampak alih teknologi dan manajemen melalui proses *learning by doing*. Peningkatan TFP ini merupakan faktor kunci dalam peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang.³ Selain itu, peningkatan TFP ini diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing dan persaingan pasar yang sehat sehingga terbentuk struktur pasar yang sehat sehingga pada gilirannya dapat menekan harga jual dan inflasi.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur diharapkan akan memiliki dampak yang positif terutama pada perbaikan iklim investasi dan daya saing. Distribusi akan cenderung lebih efisien sejalan dengan membaiknya percepatan pembangunan infrastruktur tersebut sehingga diharapkan ke depan dampaknya terhadap inflasi akan cenderung menurun. Sementara itu, dengan percepatan pembangunan infrastruktur, Reformasi Sektor Keuangan, dan Pemberdayaan UMKM serta didukung oleh pokok-pokok kebijakan di bidang perekonomian tahun 2008-2009, seperti kelancaran arus barang dan kepabeanaan, serta perpajakan, akan meningkatkan daya saing. Berbagai asumsi eksternal dan domestik di atas dijadikan dasar dalam penyusunan proyeksi ekonomi Indonesia 2008-2013 (Tabel 4.4).

3 Dalam World Development Report (2005) dinyatakan bahwa berdasarkan hasil studi dari tahun 1960-2000, faktor dominan (45%-90%) yang menyebabkan perbedaan pertumbuhan antar negara berasal dari perbedaan dalam TFP, bukan dari perbedaan dalam akumulasi kapital maupun tenaga kerja.

Tabel 4.4 Asumsi Dasar Eksternal dan Domestik

Asumsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)	4,9	3,9	3,7	4,3	4,7	4,9	5,1
Volume Perdagangan Dunia (%)	6,8	5,9	5,7	6,2	6,7	7,3	7,6
Harga Minyak (USD/barel)	70	110	110	115	113	112	110
Pertumbuhan Harga Komoditas Nonmigas (%)	14,0	30,0	3,0	1,5	-1,5	-3,4	-6
Fed Fund Rate (%)	5,02	2,35	2,50	2,75	3,00	3,00	3,00
Defisit Keuangan Pemerintah (% PDB)	-1,3	-1,9	-1,9	-1,2	-1,1	-0,9	-0,8
Net FDI (% PDB)	1,0	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7

4.3 Proyeksi Perekonomian Indonesia 2008-2013

Secara garis besar, **proyeksi ekonomi Indonesia 2008-2013 sangat ditentukan oleh tingkat keberhasilan Pemerintah dan Bank Sentral dalam menjaga stabilitas makro serta keberhasilan dalam implementasi reformasi struktural dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta didukung oleh efek positif dari sisi eksternal dalam menghadapi tantangan** seperti terlihat pada Diagram 4.1. Dalam jangka pendek, berlanjutnya ketidakpastian di pasar keuangan dan perekonomian global yaitu meningkatnya tekanan inflasi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ditentukan oleh keberhasilan kebijakan ekonomi makro (*policy mix* kebijakan fiskal dan moneter) untuk mengendalikan stabilitas makro tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam jangka menengah-panjang lima tahun ke depan, pergerakan perekonomian Indonesia akan lebih ditentukan oleh faktor-faktor yang menggerakkan perekonomian dalam jangka panjang, seperti modal fisik, *human capital* dan produktivitas/efisiensi.

Dari sisi produksi, implementasi reformasi struktural diasumsikan berjalan baik sehingga produktivitas tenaga kerja, penguasaan teknologi, dan modal fisik akan cenderung meningkat serta distribusi akan menjadi lebih efektif. Keempat faktor

ini akan bersifat jangka panjang dalam mendorong *Total Factor Productivity* (TFP) sehingga perusahaan mampu menghasilkan output yang lebih tinggi. Selain itu, berbagai faktor tersebut akan meningkatkan efisiensi perusahaan untuk melakukan proses produksi yang menyebabkan *marginal cost* akan cenderung menurun dan akan menekan tambahan biaya akibat distribusi yang semakin efektif. Kondisi tersebut akan menyebabkan menurunnya ongkos produksi dan harga jual sehingga inflasi dalam jangka panjang terdorong turun. Namun di sisi lain, dari sisi eksternal, kecenderungan tingginya harga komoditas minyak dan pangan dunia akan menyebabkan *marginal cost* meningkat karena adanya tambahan biaya untuk melakukan impor bahan baku. Namun demikian, penurunan *marginal cost* akibat adanya efisiensi diperkirakan masih lebih besar dari pada kenaikan *marginal cost* akibat tekanan dari sisi eksternal tersebut sehingga dalam jangka panjang diperkirakan inflasi akan cenderung turun menuju targetnya menjadi 2,5%-4,5% di tahun 2013.

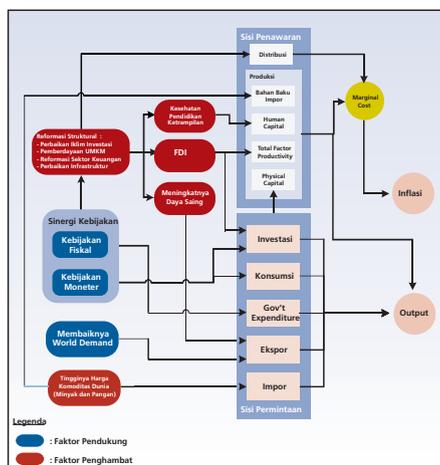


Diagram 4.1 Kebijakan Ekonomi Makro dan Kinerja Ekonomi Indonesia

Penurunan inflasi tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk secara konsisten menerapkan *Inflation Targeting Framework (ITF)* yang terintegrasi dalam serangkaian kebijakan makro ekonomi dan sektoral. Dalam hal ini, penetapan BI Rate senantiasa konsisten dengan pencapaian target inflasi, namun dengan tidak menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Dengan mempertimbangkan proses momentum pertumbuhan ekonomi yang masih berjalan, adanya persistensi inflasi dan permanen inflasi serta kebijakan moneter yang belum sepenuhnya kredibel (*imperfect credibility*) Bank Indonesia diperkirakan akan meningkatkan BI rate secara gradual dan terukur dalam jangka pendek (1-2 tahun) guna menghindari *output loss* dan *sacrifice ratio* yang besar. Sejalan dengan menurunnya inflasi dalam jangka menengah 2010-2013, Bank Indonesia diperkirakan akan mulai menurunkan tingkat BI Rate secara gradual.

Sinergi antara komitmen Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi makro selain memberi dampak positif terhadap sisi penawaran, juga memberi dampak positif terhadap sisi permintaan. Dengan adanya sinergi tersebut, baik Kebijakan Fiskal maupun Kebijakan Moneter akan lebih efektif dalam mempengaruhi sisi *demand* melalui konsumsi, investasi maupun pengeluaran pemerintah secara langsung. Inflasi yang rendah menyebabkan daya beli riil masyarakat meningkat, sehingga konsumsi masyarakat diperkirakan akan tetap tumbuh lebih dari 5%, bahkan mencapai sekitar 5,7-6,1% pada 2013 dan masih memegang peranan penting dalam perekonomian. Sementara itu, dengan perkiraan menurunnya inflasi dalam jangka menengah-panjang akibat semakin meningkatnya

kredibilitas Bank Indonesia dan rendahnya ekspektasi inflasi pelaku pasar yang berimplikasi pada rendahnya tingkat bunga riil, maka investasi diperkirakan meningkat sekitar 12,5-13,9% pada tahun 2013. Dengan adanya dorongan dari sisi konsumsi dan investasi tersebut diperkirakan perekonomian akan tumbuh tinggi sehingga mendorong pendapatan pemerintah (pajak dan penerimaan bukan pajak) yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang tumbuh sekitar 5,9-6,3% pada tahun 2013 dengan asumsi pemerintah tetap memberikan stimulus fiskal dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskalnya.

Sementara itu, daya saing yang meningkat serta membaiknya permintaan dunia berdampak pada tetap tingginya kinerja ekspor. Ekspor akan diprediksi tumbuh pada 12,2-12,6% pada tahun 2013. Di sisi lain, impor diprediksi juga tumbuh tinggi 15,8-16,2% pada tahun 2013 sebagai akibat kuatnya permintaan domestik. Kondisi di atas menyebabkan surplus neraca transaksi berjalan akan menurun. Namun demikian, dengan liberalisasi perdagangan yang ditujukan untuk mendorong daya saing ekspor dan strategi industri yang mendorong *backward linkage* dan *forward linkage* untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor diharapkan dapat menurunkan tekanan neraca pembayaran. Ke depan langkah-langkah ini diperkirakan mampu membawa neraca pembayaran dalam kondisi mantap sehingga nilai tukar akan cenderung stabil pada level Rp 9000/USD pada tahun 2013.

Pada akhirnya, stabilitas ekonomi makro yang terus terjaga yang didukung oleh implementasi reformasi struktural serta efek positif dari sisi eksternal akan memberikan kemajuan signifikan, baik dari sisi *supply* dan *demand*. Hal

Tabel 4.5 Proyeksi Ekonomi Indonesia 2008-2013

Proyeksi	2007	2008*	2009*	2010*	2011*	2012*	2013*
Inflasi (%)	6,6	11,5 - 12,5	6,5 - 7,5	4,5 - 6,5	3,5 - 5,5	3,0 - 5,0	2,5 - 4,5
Pertumbuhan PDB (%)	6,3	6,1 - 6,5	6,2 - 6,7	6,0 - 6,8	6,2 - 6,9	6,5 - 7,0	6,7 - 7,2
- Konsumsi Masyarakat (%)	5,0	5,1 - 5,6	5,2 - 5,9	5,2 - 5,6	5,4 - 5,8	5,6 - 6,0	5,7 - 6,1
- Konsumsi Pemerintah (%)	3,9	5,8 - 6,3	12,5 - 13,5	5,3 - 5,7	5,5 - 5,9	5,7 - 6,1	5,9 - 6,3
- Investasi (%)	9,2	12,7 - 13,2	13,6 - 14,6	10,5 - 12,0	11,0 - 12,5	12,0 - 13,5	12,5 - 13,9
- Ekspor Barang & Jasa (%)	8,0	14,6 - 15,1	9,1 - 10,1	10,7 - 11,3	11,3 - 11,7	11,7 - 12,3	12,2 - 12,6
- Impor Barang & Jasa (%)	8,9	16,3 - 16,8	16,4 - 17,4	13,7 - 14,1	14,3 - 14,7	15,1 - 15,5	15,8 - 16,2

Ket. : * Proyeksi Bank Indonesia

ini akan berkontribusi pada tetap tingginya lintasan pertumbuhan ekonomi sehingga pada tahun 2013 ekonomi diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,7-7,2%. Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tinggi tersebut akan mampu menyerap tambahan tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran yang ada. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang dibarengi dengan inflasi yang terus menurun akan berdampak pada peningkatan pendapatan riil dan pengurangan tingkat kemiskinan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.4 Implikasi Kebijakan

Agar target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat tercapai, komitmen dan kerja keras semua pihak mutlak diperlukan. Berikut sejumlah kebijakan yang mungkin dilakukan dalam mendukung tercapainya kondisi paling optimal.

4.4.1 Kebijakan Moneter dan Fiskal

Kebijakan moneter akan dilakukan secara berhati-hati dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian dunia dan domestik. Dengan penguatan strategi ITF serta menyadari pentingnya ekspektasi pelaku pasar keuangan, maka formulasi kebijakan moneter dengan tujuan inflasi rendah dan stabilitas ekonomi makro juga akan mempertimbangkan stabilitas pasar keuangan, baik global maupun domestik, serta terhadap konstelasi

perekonomian eksternal terkini. Sebagai contoh, prediksi turunnya permintaan dunia yang dapat berpengaruh terhadap ekspor dan nilai tukar, serta berlanjutnya dampak bergejolaknya pasar keuangan global, sebaiknya dijadikan masukan yang lebih penting saat kebijakan moneter diformulasikan. Selain itu, guna mengarahkan ekspektasi inflasi ke target inflasi maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kredibilitas otoritas moneter.

Kebijakan fiskal yang diprediksi masih bersifat stimulus di tingkat pusat, sebaiknya disertai dengan kebijakan fiskal di daerah yang sejalan dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Upaya-upaya di sisi fiskal yang bersifat stimulus sebaiknya diarahkan untuk memperbaiki kondisi infrastruktur, mendorong industri yang menjadi daya saing daerah berdaya serap tenaga kerja tinggi, mempertahankan daya beli masyarakat serta mengentaskan kemiskinan.

Koordinasi fiskal dan moneter perlu diperkuat agar resultan yang dihasilkan semakin bersifat komplementer (saling mendukung), tidak bersifat substitusi (saling mengaburkan). Stimulasi fiskal yang bermaksud memberikan efek ekspansif bagi perekonomian seyogyanya tidak disertai dengan pengetatan moneter yang berdampak sebaliknya. Sementara, penurunan tingkat bunga acuan oleh otoritas moneter sebaiknya juga direspons dengan kebijakan fiskal yang tidak semakin ketat.

4.4.2 Kebijakan Struktural

Untuk mendorong sektor riil agar bergerak lebih cepat, pembangunan infrastruktur menempati posisi kunci. Di satu sisi, infrastruktur yang baik akan menjamin kelancaran arus barang modal dan input antara guna terciptanya proses produksi yang lancar dan fleksibel dalam merespons permintaan pasar. Di sisi lain, infrastruktur yang handal juga menjamin kelancaran distribusi barang komoditas maupun hasil industri, yang berarti meningkatkan sisi penawaran agregat perekonomian. Pada gilirannya, kondisi ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan inflasi.

Di samping itu, perbaikan institusi pemerintahan yang terkait fungsi-fungsi ekonomi terutama dari sisi *supply*, perlu diberi prioritas yang tinggi. Hal ini mencakup perbaikan-perbaikan yang terkait investasi (baik perizinan, keamanan dan kepastian usaha), *human capital development* (keterampilan, pendidikan dan kesehatan), efisiensi dan produktivitas produksi, serta distribusi barang dan jasa. Institusi yang berkualitas lebih baik akan menurunkan *overall cost* dari ekonomi yang bermuara pada meningkatnya volume serta daya saing produk. Keduanya berimplikasi positif pada pertumbuhan, stabilitas harga serta fundamental ekonomi lainnya secara keseluruhan.

Langkah-langkah di atas perlu didukung oleh liberalisasi perdagangan, baik multilateral, regional maupun bilateral untuk mendorong tingkat persaingan di pasar domestik. Liberalisasi perdagangan yang berjalan baik juga akan menurunkan distorsi pasar sehingga struktur pasar akan lebih sehat dan baik. Selain itu, dampak liberalisasi perdagangan juga akan meningkatkan produktivitas melalui spesialisasi tenaga kerja dan

equalisasi faktor harga sehingga akan meningkatkan output dan menurunkan ongkos produksi.

Di sisi industri, perlu disusun suatu skema *grand industry* Indonesia, yang akan digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan industri ke depan. Adapun arah kebijakan industri ke depan diharapkan dapat difokuskan pada industri yang menghasilkan produk unggulan yang memiliki *competitive advantage* Indonesia. Langkah ini akan meningkatkan *forward linkage* dan *backward linkage* industri yang akan mendorong sinergi antar industri dan daya tahan ekonomi serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Selain itu, Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga perlu terus memantau tingkat persaingan usaha sehingga dapat menjaga iklim usaha yang kondusif dengan menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha.

4.4.3 Peran KBI dalam mendorong Sektor Riil dan Menekan Inflasi Daerah

Berdasarkan hasil kajian Bank Indonesia, saat ini masih terdapat sejumlah tantangan berat yang harus dihadapi di daerah, terutama masih rendah dan tingkat pertumbuhan sektor riil di daerah yang berbeda-beda, serta masih tinggi dan bervariasi inflasi daerah. Bank Indonesia telah dan akan terus mengambil langkah-langkah yang secara langsung terkait dengan pemberdayaan sektor riil tanpa keluar dari tugas utamanya sebagai penjaga stabilitas. Pertama, dalam bentuk peningkatan peran Bank Indonesia sebagai pemberi saran kebijakan daerah (*advisory function*). Kedua, sebagai fasilitator pengembangan perekonomian rakyat di daerah (*catalyst function*).

Terkait dengan *advisory function*, sejak 2007 Bank Indonesia telah menggulirkan program kerja jangka menengah berupa Reorientasi Kantor Bank Indonesia (KBI) di daerah. Langkah tersebut dilakukan agar Bank Indonesia dapat menjadi lebih proaktif dalam pemantauan perkembangan ekonomi dan sosial di seluruh Nusantara dalam bentuk yang sesuai dengan perkembangan Indonesia, serta dalam menjalin kemitraan strategis dengan Pemerintah Daerah.

Sementara itu terkait dengan *catalyst function*, Bank Indonesia telah menggulirkan proyek percontohan klaster UMKM dan Tim Fasilitas Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (TFPPED) sebagai upaya untuk mengembangkan sektor UMKM dan perekonomian daerah melalui bantuan teknis (*technical assistance*) Bank Indonesia. Tim ini dibentuk untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi daerah melalui peningkatan fungsi intermediasi perbankan. Hal ini dilakukan melalui implementasi hasil-hasil kajian dan penelitian, program-program baik di pusat maupun daerah guna meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta pengendalian inflasi. Sebagai bagian dari program revitalisasi dan reorientasi KBI, tim ini akan menyatu dengan tugas-tugas Kantor Bank Indonesia. Keanggotaan tim terdiri dari unsur pimpinan Pemda, Bank Indonesia (pusat maupun daerah), perbankan, asosiasi dan instansi atau lembaga terkait lainnya. Sebagai proyek percontohan, TFPPED dibentuk di delapan Kantor Bank Indonesia di daerah yaitu Bandung, Medan, Manado, Cirebon, Pontianak, Jambi, Kupang dan Purwokerto.

Peran sebagai fasilitator (*catalyst*) juga dimainkan Bank Indonesia dengan digulirkannya Data Informasi Bisnis Indonesia (DIBI). DIBI

merupakan sebuah upaya untuk mengurangi kesenjangan informasi (*asymmetric information*), antara perbankan dan sektor riil yang ditengarai sebagai salah satu dari berbagai penyebab masih belum optimalnya fungsi intermediasi perbankan saat ini. Rancangan arsitektur informasi yang dibangun dalam DIBI diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi kalangan perbankan dan para pelaku ekonomi UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Bagi pelaku ekonomi UMKM, DIBI diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat melahirkan ide mengenai peluang usaha baru, maupun untuk kebutuhan ekspansi usaha. Sedangkan bagi perbankan, DIBI diharapkan dapat mendorong kreativitas dalam penyaluran kredit. Sesuai dengan tujuannya, pengembangan DIBI ke depan akan diarahkan pada fasilitas penyajian data dan informasi yang lebih bernuansa bisnis mikro.

Program reorientasi KBI yang telah digulirkan akan diperkuat implementasinya melalui program-program kerja berikut. Pertama, perbaikan cakupan dan kualitas data statistik perekonomian daerah yang dimiliki KBI koordinator dan melakukan integrasi pelaporan statistik perekonomian daerah dalam rangka menjalankan *advisory function*. Dalam kaitan ini, keseluruhan informasi akan dikompilasi dalam Data Informasi Bisnis Indonesia (DIBI) yang dapat diakses oleh seluruh elemen bangsa yang memerlukannya.

Kedua, pengembangan riset-riset strategis ekonomi daerah terkait peluang dan potensi di sektor riil, kesiapan menuju MEA 2015, pencapaian *Millenium Development Goals*, dampak perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan hidup pada perekonomian dan kualitas hidup masyarakat, jaringan produksi dan distribusi,

struktur-perilaku-kinerja (*structure-conduct-performance*) kegiatan produksi dan distribusi, dan pengembangan modal sosial dan kultural. **Ketiga, peningkatan peran fasilitasi/mediasi seluruh KBI** terkait intermediasi perbankan ke kelompok usaha mikro-kecil-menengah dengan memanfaatkan DIBI dan informasi yang dimiliki oleh Biro Informasi Kredit. **Keempat, analisis yang menyeluruh terhadap sumber inflasi daerah**, pengembangan system deteksi dini inflasi daerah, dan pembentukan **Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)**. **Kelima, perbaikan kualitas dan pemanfaatan**

perpustakaan di seluruh KBI dengan menjadikan perpustakaan sebagai *learning center* dalam upaya membantu peningkatan kualitas SDM yang erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan literasi. Langkah ini adalah langkah yang relatif murah namun efektif di dalam meningkatkan fungsi perpustakaan KBI sebagai *learning center*, yang akan menyediakan berbagai sumber-sumber rujukan tidak saja bagi masyarakat luas tentang berbagai aspek ilmu pengetahuan, tapi juga menyediakan rujukan bagi para *entrepreneur* atau calon *entrepreneur* di daerah.

Bab 5: Topikal Isu

5.1. Perilaku Produsen Terhadap Pembentukan Harga di Tingkat Konsumen pada Industri Manufaktur Indonesia: Pendekatan dengan Analisis *Structure-Conduct-Performance*

Dipersiapkan oleh Hidayah Dhini Ari, Oki Hermansyah, dan Myrnawati Savitri

5.1.1. Pendahuluan

Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, tingkat inflasi rata-rata Indonesia berada di sekitar 9.2%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelum krisis, dengan tingkat inflasi rata-rata pada periode 1990-1997 di sekitar 8.8%. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan yang lebih mendasar dalam fenomena inflasi di Indonesia, antara lain produktivitas, efisiensi, dsitribusi, termasuk di dalamnya permasalahan yang terkait dengan organisasi industri dan struktur pasarnya.

Terkait dengan hal tersebut, dirasa penting untuk mengkaji bagaimana fenomena inflasi ini dikaitkan dengan kinerja sektor industri. Hubungan ini perlu dikaji untuk melihat bagaimana sesungguhnya perilaku produsen dalam mempengaruhi pembentukan harga di konsumen. Seperti diketahui, harga yang terbentuk di tingkat produsen dipengaruhi oleh peran produsen tersebut dalam struktur pasar. Jika struktur pasar merupakan persaingan ketat, maka produsen akan menjual barangnya di tingkat harga yang kompetitif, demikian pula sebaliknya.

Demikian kompleksnya pembentukan harga yang sesungguhnya dari tingkat produsen melalui distributor hingga ke tingkat konsumen akhir, maka kajian pembentukan harga ini difokuskan hanya pada tingkat produsen. Industri yang dikaji

merupakan industri manufaktur dengan dasar pertimbangan besarnya bobot barang industri manufaktur dalam IHK, yakni sekitar 70%.

5.1.2. Pengujian Model dan Analisis Hasil Estimasi

Perilaku produsen dalam pembentukan harga akan dicoba dijelaskan dengan menggunakan pendekatan *structure-conduct-performance* (SCP). *Price-cost margin* sebagai proksi dari perilaku pembentukan harga produsen di suatu industri akan coba dijelaskan dengan beberapa variabel yang dianggap mempengaruhi struktur pasar, diantaranya tingkat konsentrasi, tingkat efisiensi, keterbukaan dengan perdagangan internasional, biaya tenaga kerja per ouput, serta tingkat penetrasi impor dalam industri tersebut. Selain itu, untuk menjelaskan perilaku harga produsen di suatu industri terkait dengan siklus bisnis dalam industri tersebut, maka variabel siklikal (*cyclical*) juga turut dimasukkan sebagai salah satu faktor yang turut mempengaruhi *price-cost margin*. Dari hasil pengujian akan dapat diketahui apakah perilaku pembentukan harga produsen bersifat *pro-cyclical* atau *counter-cyclical*. Perilaku harga yang bersifat *pro-cyclical* menunjukkan bahwa pada saat suatu industri berada dalam kondisi ekspansi, maka produsen akan meningkatkan *mark-up ratio*. Sebaliknya apabila perilaku harga bersifat *counter-cyclical*, maka bila industri tersebut berada dalam

kondisi ekspansi, produsen justru akan menurunkan *mark-up ratio*. Dalam proses terjadinya inflasi, perilaku harga yang bersifat *pro-cyclical*, diduga merupakan salah satu sumber terjadinya inflasi. Secara konseptual teoretis, bagaimana selayaknya perilaku harga *mark-up* dalam siklus bisnis sampai saat ini belum dapat dipastikan. Meskipun demikian, telah cukup banyak penelitian yang dilakukan untuk mengkaji hal ini. Penelitian Hall (1988) terhadap industri di AS menunjukkan perilaku harga produsen yang bersifat *pro-cyclical*. Selain itu, penelitian yang dilakukan Small (1997) terhadap industri manufaktur dan jasa di Inggris juga menunjukkan hal serupa. Namun, penelitian yang cukup komprehensif yang dilakukan Martins et al. (1996) terhadap industri di 14 negara OECD menemukan perilaku harga produsen yang bersifat *counter-cyclical*.

5.1.3. Perolehan Data

Sebagian besar data diperoleh dari terbitan Data Statistik Industri Besar dan Sedang dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data memuat berbagai indikator organisasi industri dan struktur pasar yang diklasifikasikan ke dalam kode KKI 2 dan 3 digit, seperti jumlah perusahaan, nilai tambah, upah pekerja, nilai produksi, serta input dan output. Sementara data ekspor dan impor Indonesia diperoleh dari Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter. Data *price-cost margin*, rasio konsentrasi pasar, biaya tenaga kerja per output, biaya material per output dihitung dari data dalam publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang BPS tersebut.

5.1.4. Struktur Model

Studi ini mengadaptasi model yang digunakan oleh Yang dan Hwang (2001), Metin-Ozcan et al. (2000) serta Culha dan Yalçın (2000,

2005) dengan beberapa modifikasi. Ketiga model tersebut memiliki bentuk yang hampir serupa, sehingga dapat saling melengkapi. Data sampel yang digunakan dalam pengujian ini adalah Data Statistik Industri Besar dan Sedang dari tahun 2000-2006 (data 2006 masih bersifat sementara). Setelah mempertimbangkan ketersediaan data, maka model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$PCM = f(CR4, ULC, UMC, OPEN, IPR, CR4*OPEN, CR4*IPR, IPR*TYPE, CYCL, CYCL*TYPE)$$

Variabel PCM_{it} menotasikan *price-cost margin* industri i pada tahun t . Variabel PCM merupakan selisih antara harga dan biaya marginal yang dihitung dari nilai tambah dikurangi biaya tenaga kerja dibagi output, atau secara matematis dapat ditulis

$$PCM = \frac{p \cdot MC}{p} \approx \frac{(Q \cdot IC) - LC}{Q} = \frac{VA - LC}{Q}$$

dimana

VA : nilai tambah bersih

Q : nilai output

IC : biaya antara (seluruh biaya di luar biaya tenaga kerja, depresiasi, dan pajak tidak langsung)

LC : biaya tenaga kerja

Penggunaan variabel harga barang di pasar domestik (p_{it}) sebagai variabel endogen tidak dimungkinkan karena tidak tersedianya harga barang domestik untuk setiap barang industri KKI 3 digit.

Variabel $OPEN$ dan IPR masing-masing merupakan rasio tingkat keterbukaan perdagangan internasional dan rasio penetrasi impor. Secara tidak langsung kedua variabel tersebut mengindikasikan liberalisasi perdagangan. Tingkat keterbukaan sektor industri ($OPEN$) diukur dengan impor (M) dan ekspor (X) per output sektoral, atau dapat ditulis

$$OPEN = \frac{(X+M)}{Q}$$

Sementara itu, *IPR* merupakan pangsa impor terhadap total penjualan di pasar domestik. Di negara berkembang, *IPR* dapat dianggap sebagai ukuran dari liberalisasi impor karena *average tariff* dan *tariff revenue ratio* selalu berubah dalam *actual tariff rate*. Kedua variabel di atas diharapkan dapat menangkap efek liberalisasi perdagangan secara umum di setiap barang industri KKI 3 digit.

Variabel *CR4* merupakan rasio konsentrasi yang menunjukkan adanya tingkat konsentrasi pasar empat perusahaan dengan output terbesar sebagai ukuran kompetisi domestik dan penguasaan pasar (*market power*). Variabel *CR4* digunakan untuk melihat apakah sektor yang makin terkonsentrasi akan meningkatkan *price-cost margin*.

Variabel *CR4*OPEN* dan *CR4*IPR* merupakan variabel yang menunjukkan interaksi antara indikator struktur pasar dan liberalisasi perdagangan untuk melihat efek kompetisi impor terhadap *price-cost margin* pada industri yang lebih terkonsentrasi. Sedangkan variabel *ULC* dan *UMC* merupakan rasio antara biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku per nilai output.

Variabel *CYCL* merupakan variabel yang mengukur adanya siklus bisnis pada nilai output suatu industri, diperoleh dari rasio antara data aktual output sektoral terhadap tren-nya (persentase deviasi dari tren).¹ Variabel *CYCL* yang bertanda negatif menunjukkan adanya perilaku harga produsen yang bersifat *counter-cyclical*, yakni ketika nilai output sektor terkait berada di

atas tren jangka panjangnya, maka ada kecenderungan bagi perusahaan dalam menurunkan *price-cost margin*. Sebaliknya jika bernilai positif, berarti perilaku harga produsen bersifat *pro-cyclical*.

Sementara itu, terdapat pula variabel *dummy TYPE* yang terdiri dari angka 1 dan 0, masing-masing merepresentasikan industri yang memiliki pangsa pasar yang besar dan kecil. Dalam hal ini, pangsa pasar besar diwakili oleh gabungan industri di suatu sektor industri yang memiliki pangsa di atas 95% tetapi tidak mencapai 100%. Sedangkan variabel *CYCL*TYPE* merupakan variabel yang menunjukkan adanya interaksi antara siklus nilai output dan sektor industri yang memiliki pangsa pasar yang besar (*market share*) terhadap *price-cost margin*. Variabel *IPR*TYPE* digunakan untuk menjelaskan hubungan mengenai bagaimana *price-cost margin* dipengaruhi oleh tingkat penetrasi industri suatu industri dengan penguasaan pangsa yang besar.

Pada penelitian ini, terdapat beberapa hipotesis yang akan dikaji kebenarannya. Variabel rasio konsentrasi (*CR4*) diharapkan bernilai positif karena dengan tingkat konsentrasi yang besar, maka tingkat kompetisi semakin kecil dan mendorong perusahaan menetapkan harga di atas biaya marginalnya. Sementara variabel *ULC* dan *UMC* diharapkan bernilai negatif karena peningkatan efisiensi dapat memberikan kontribusi pada penurunan biaya yang selanjutnya dapat meningkatkan margin keuntungan. Variabel *OPEN* dan *IPR* dihipotesiskan bernilai negatif yang menunjukkan bahwa perdagangan internasional yang semakin terbuka atau semakin besarnya proporsi barang impor terhadap total pasokan di pasar domestik dapat memaksa produsen mengorbankan sebagian margin keuntungannya

1 Tren dari output dihitung dengan menggunakan Hodrick-Prescott filter pada nilai output sektor terkait. Karena data tahunan, faktor bobot yang digunakan adalah 100 (Martins et al. (1996)).

untuk bertahan menghadapi persaingan dari kompetitor asing.

Variabel $CR4*OPEN$ dan $CR4*IPR$ dihipotesiskan bernilai negatif dan lebih signifikan dibandingkan variabel $OPEN$ dan IPR . Hal ini menggambarkan pengaruh kompetisi barang impor terhadap perilaku penetapan harga dan margin keuntungan terjadi lebih kuat pada industri yang lebih terkonsentrasi.

Terakhir, variabel $IPR*TYPE$ diharapkan bernilai positif dan lebih signifikan dari IPR yang memiliki arti bahwa tingkat penetrasi impor untuk industri dengan pangsa pasar yang besar mempengaruhi tingkat *price-cost margin*.

5.1.5. Pengujian Ekonometrik

Pengujian hipotesis menggunakan analisis data panel yang merupakan kombinasi antara data *time-series* dan *cross-section*. Metode ini digunakan sebagai solusi dalam keterbatasan jumlah data agar dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih baik. Peningkatan jumlah observasi berimplikasi pada peningkatan derajat kebebasan. Beberapa kegunaan pemakaian metode data panel antara lain:

1. Mampu mengontrol heterogenitas individu. Dengan metode ini, estimasi yang dilakukan dapat secara eksplisit memasukkan unsur heterogenitas individu.
2. Dengan mengkombinasikan data *time-series* dan *cross-section*, data panel dapat memberikan data yang informatif, mengurangi kolinearitas antarvariabel, meningkatkan derajat kebebasan dan lebih efisien.
3. Karena berkaitan dengan observasi *cross-section* yang berulang, maka data panel lebih baik dalam mempelajari perubahan dinamis.

Adapun model dasar dari data panel dapat ditulis

seperti berikut:

$$y_{it} = x_{it} \beta + \lambda_i + \alpha_t + \varepsilon_{it}$$

dimana $i=1,2,\dots,N$ menunjukkan unit *cross-section* (dalam kajian ini merupakan sektor industri berdasarkan KKI 3 digit), $i=1,2,\dots,T$ menunjukkan periode waktu, y_{it} dan x_{it} masing-masing merupakan variabel dependen dan vektor variabel penjelas non-stokastik untuk sektor i dan tahun t . Efek individu dinyatakan oleh α_i , sementara efek waktu dinyatakan oleh λ_t .

Untuk menentukan efek yang akan digunakan, *fixed effect* atau *random effect*, digunakan *Hausman test*. Uji ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : model *random effect*

H_1 : model *fixed effect*

Sebagai dasar penolakan H_0 , digunakan statistik *Hausman* dan membandingkannya dengan *Chi square*. Jika nilai χ^2 -statistik lebih besar dari χ^2 -tabel, maka cukup bukti untuk menolak H_0 .

Nilai statistik Hausman menunjukkan angka 29,161, lebih besar dari nilai *Chi-square* yakni sebesar 22,46. Oleh karena itu, hipotesis untuk menggunakan *random effect* ditolak, sehingga disimpulkan bahwa penggunaan *fixed effect* lebih tepat dalam kajian ini. Penggunaan *fixed effect* dapat dengan mudah ditentukan pula dari nilai probabilitas *Chi-square*, dalam hal ini diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0001 yang berarti tolak H_0 .

5.1.6. Hasil Analisis Pengujian Ekonometrik

Pengujian ekonometrik dilakukan terhadap 8 (delapan) sektor industri berdasarkan KKI 3 digit, yaitu 1) Industri Makanan dan Minuman, 2) Tekstil, 3) Kimia, 4) Karet, 5) Logam Dasar, 6) Mesin Listrik, 7) Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta 8) Kendaraan Bermotor. Dipilihnya industri-industri tersebut berdasarkan nilai outputnya yang cukup

besar terhadap total output industri (sekitar 63% dari total output industri).

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, tingkat konsentrasi pasar (*CR4*) secara umum mempengaruhi hampir sebagian besar industri yang diuji, kecuali Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Telekomunikasi. Untuk Industri Tekstil, Kimia, Mesin listrik dan Kendaraan Bermotor, tanda dari koefisien konsentrasi pasar sesuai dengan hipotesis yaitu positif. Hal ini menunjukkan bahwa di industri-industri tersebut peningkatan konsentrasi di pasar akan memperkecil kompetisi yang pada akhirnya akan mendorong produsen untuk menetapkan harga yang semakin menjauhi biaya marginalnya. Yang menarik, untuk Industri Makanan dan Minuman, Karet, serta Logam Dasar, variabel konsentrasi pasar ditemukan signifikan namun bertanda negatif, sehingga bertentangan

dengan hipotesis. Dengan kata lain, untuk ketiga jenis industri ini, tingkat konsentrasi yang tinggi di pasar justru membuat produsen menjalankan strategi harga seperti dalam pasar yang tingkat persaingannya tinggi.

Penjelasan untuk hal ini diantaranya adalah konsentrasi yang tinggi menyebabkan produsen dapat menjalankan strategi untuk mencegah masuknya kompetitor baru dengan cara menekan margin keuntungan. Hal ini didukung oleh penghitungan Nilai *Minimum Efficiency Scale (MES)*² untuk industri-industri tersebut yang rata-rata lebih besar dari 10%. Menurut Comanor dan Wilson (1967) dalam Alistair (2004), *MES* yang lebih besar dari 10% menggambarkan hambatan

2 MES dihitung sebagai : Output perusahaan terbesar / Output Total Industri tersebut

Tabel 5.1 Hasil Estimasi

	Industri Makanan dan Minuman	Industri Tekstil	Industri Kimia	Industri Karet	Industri Logam Dasar	Industri Mesin Listrik	Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Telekomunikasi	Industri Kendaraan Bermotor
CR 4	-0.215 (-2.79)**	0.127 (4.83)***	0.233 (7.52)***	-0.105 (-2.59)**	-0.271 (10.28)***	0.105 (2.81)***	0.099 (1.22)	0.16 (1.74)*
ULC	-1.396 (-10.04)***	-0.883 (-3.86)***	-0.833 (-7.53)***	-0.837 (-7.48)***	0.61 (0.94)	-0.972 (-3.21)***	0.095 (0.15)	-1.079 (-10.65)***
UMC	-0.969 (-13.18)***	-0.956 (-10.9)***	-0.861 (-27.75)***	-1.234 (-26.59)***	-0.866 (-5.11)***	-0.848 (-12.11)***	-0.995 (-7.88)***	-1.09 (-10.7)***
IPR	-	-	-0.006 (-2.86)**	-	0.229 (2.09)*	0.02 (0.96)	-	-0.008 (-0.36)
IPR*TYPE	-	-0.025 (-2.61)**	-	-	-	-	-	-
CR4*OPEN	0.111 (1.45)	-	-	-	-	0.004 (1.83)*	-	-
CR4*IPR	-	-	-	-	-	-0.037 (-1.07)	-	-
CYCL	0.108 (1.509)	-0.065 (-3.2)***	0.0356 (2.83)**	0.0415 (3.13)**	0.081 (-1.54)	-	0.288 (1.92)*	-0.051 (-1.97)*
CYCL*TYPE	-0.116 (-1.75)*	0.063 (3.06)***	-0.0359 (-2.41)**	-	-	0.047 (1.82)*	-0.262 (-1.81)*	-
Adj. R2	0.978	0.914	0.992	0.997	0.947	0.933	0.853	0.998
DW-stat	2.466	2.108	2.107	3.035	2.29	2.31	1.932	2.254

(*) tingkat signifikansi 10%
 (**) tingkat signifikansi 5%
 (***) tingkat signifikansi 1%
 Angka dalam kurung merupakan t-stat

Tabel 5.2 Nilai *Minimum Efficiency Scale (MES)* Industri Manufaktur Indonesia

KKI	INDUSTRI	2001	2006
151	Makanan olahan	0,08	0,11
152	Susu	0,13	0,28
153	Pengolahan padi	0,10	0,13
154	Makanan lainnya	0,03	0,06
155	Minuman	0,13	0,15
171	Benang dan kain	0,04	0,92
172	Permadani	0,17	0,39
174	Kapuk	0,15	0,08
241	Bahan kimia industri	0,10	0,31
242	Bahan kimia lainnya	0,16	0,35
243	Serat buatan	0,25	0,39
251	Karet	0,12	0,05
252	Barang dari plastik	0,04	0,28
271	Logam besi & baja	0,41	0,58
272	Logam bukan besi & baja	0,34	0,28
273	Pengecoran logam	0,19	0,98
311	Motor listrik & perlengkapan	0,60	0,33
312	Alat pengontrol listrik	0,28	0,97
313	Kabel listrik	0,13	0,96
314	Akumulatur listrik	0,24	0,23
315	Bola lampu pijar	0,25	0,24
319	Alat listrik lainnya	0,21	0,38
321	Komponen elektronik	0,16	0,61
322	Alat komunikasi	0,79	0,78
323	Radio & sejenisnya	0,25	0,63
341	Kendaraan roda empat	0,45	0,36
342	Karoseri kendaraan	0,26	0,60
343	Komponen kendaraan	0,21	0,13

Sumber : BPS, diolah

masuk yang tinggi pada suatu industri (Tabel 5.2). Hal ini sejalan dengan perkembangan PCM pada Industri Makanan dan Minuman yang cenderung stabil dan relatif tidak terlalu tinggi (kecuali industri minuman). Sementara itu, untuk Karet dan Logam Dasar, margin keuntungan dalam industri ini tergolong yang paling tinggi dibandingkan industri lainnya, sehingga pelaku usaha mungkin lebih berhati-hati untuk menaikkan margin keuntungan lebih jauh terkait dengan kondisi daya beli masyarakat, dan sebagainya.

Tingkat efisiensi material (*UMC*) di semua jenis industri adalah signifikan dengan tanda negatif, yang berarti sesuai dengan hipotesis. Dengan demikian, semakin efisien industri tersebut, semakin besar kontribusinya pada penurunan biaya

yang pada gilirannya memberi ruang bagi kenaikan margin keuntungan. Sementara itu, besarnya pengeluaran untuk tenaga kerja (*ULC*) merupakan faktor yang juga mempengaruhi perilaku pembentukan harga produsen, kecuali di industri Logam Dasar dan Radio, Televisi, dan Peralatan Telekomunikasi. Tanda dari parameter hasil uji semuanya negatif, yang berarti sesuai dengan hipotesis. Makin tinggi pengeluaran untuk tenaga kerja, maka margin keuntungan dari produsen akan semakin menipis.

Dampak eksposur dengan perdagangan internasional, yang diukur dengan menggunakan tingkat keterbukaan (*OPEN*) dan rasio penetrasi impor (*IPR*) terhadap *PCM* di berbagai industri menunjukkan hasil yang bervariasi. Untuk industri karet, dampak perdagangan internasional cukup berpengaruh dalam pembentukan harga di tingkat produsen. Berdasarkan pada pendekatan *import discipline hypothesis* (Culha dan Yahin, 2005) keterbukaan perdagangan diharapkan akan menghilangkan eksese profit, khususnya untuk industri yang memiliki tingkat penguasaan pasar yang tinggi. Untuk Industri Logam Dasar, parameter untuk keterbukaan bersifat signifikan namun memiliki tanda positif, sehingga tidak sesuai dengan hipotesis. Kemungkinan yang terjadi adalah sebagian besar dari importir maupun produsen dari produk-produk logam merupakan perusahaan yang sama, sehingga meningkatnya penetrasi impor untuk industri ini dapat dikatakan belum berhasil menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif. Untuk Industri Mesin Listrik, parameter untuk tingkat keterbukaan merupakan interaksi antara *openness* dengan struktur pasar di industri tersebut. Uji yang dilakukan menghasilkan tanda yang signifikan, yang menunjukkan bahwa pengaruh keterbukaan perdagangan akan lebih

kuat di industri yang tingkat konsentrasinya lebih tinggi. Namun karena tanda yang diperoleh adalah positif, maka serupa dengan Industri Logam Dasar, keterbukaan perdagangan di Industri Mesin Listrik dapat dikatakan belum berhasil mengarahkan produsen untuk menjalankan strategi harga yang semakin kompetitif. Sementara itu, hasil uji untuk Industri Kimia dan Kendaraan Bermotor menunjukkan bahwa secara umum keterbukaan perdagangan telah menghasilkan parameter yang signifikan dengan tanda negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa meningkatnya keterbukaan telah membawa penurunan *price-cost margin* di industri tersebut.

Berbagai hasil kajian telah menunjukkan bahwa perilaku harga produsen merupakan salah satu faktor penyebab inflasi. Berdasarkan hal ini, upaya untuk mengkaji perilaku pembentukan harga produsen terkait dengan siklus bisnis menjadi penting untuk dilakukan. Dalam kondisi ekspansi bisnis, perilaku harga produsen yang bersifat *pro-cyclical* patut diduga merupakan salah satu sumber terjadinya inflasi. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, perilaku harga produsen secara umum bersifat *counter-cyclical*, khususnya untuk industri yang memiliki pangsa pasar yang besar. Hal ini terjadi di Industri Makanan dan Minuman, Kimia, dan Kendaraan Bermotor.

Sementara itu, perilaku pembentukan harga produsen di industri tekstil secara umum bersifat *counter-cyclical*. Fenomena ini sangat menarik, mengingat industri dengan pangsa besar sebenarnya lebih memiliki ruang untuk menaikkan *mark-up cost*. Beberapa hal yang diduga mendasari hal ini diantaranya adalah adanya semacam kesepahaman (*tacit collusion*) di antara para pelaku usaha besar untuk menekan harga dalam upaya untuk mencegah masuknya kompetitor baru. Hal ini didukung oleh penghitungan nilai *Minimum Efficiency Scale (MES)* pada industri manufaktur di Indonesia yang rata-rata lebih besar dari 10% (Tabel 5.2). Selain itu, kondisi daya beli masyarakat serta elastisitas permintaan terhadap harga dari suatu produk dapat juga menjadi pertimbangan. Sementara itu, untuk Industri karet, Mesin Listrik, serta Radio, Televisi, dan Peralatan Telekomunikasi, perilaku harga produsen lebih bersifat *pro-cyclical*. Untuk Industri Logam Dasar, perilaku pembentukan harga oleh produsen nampaknya tidak terkait dengan situasi siklus bisnis. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena sebagian besar output dari Industri Logam Dasar ditujukan untuk ekspor, sehingga orientasi produsen dalam pembentukan harga lebih ke kondisi eksternal ketimbang domestik.

5.2. Peran Distribusi Dalam Pembentukan Harga Komoditas Pangan

Dipersiapkan oleh Nugroho J. Prastowo, Tri Yanuarti, Yoni Depari

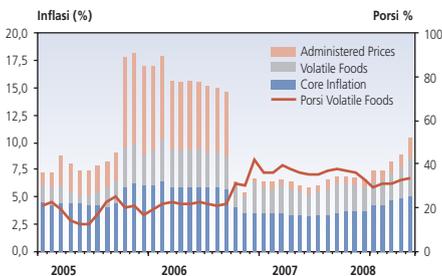
5.2.1. Latar Belakang

Data empiris menunjukkan bahwa sumbangan perubahan harga kelompok komoditas pangan (*volatile foods*) terhadap inflasi di Indonesia sangat signifikan dan menduduki urutan kedua setelah inflasi inti (*core inflation*). Secara rata-rata sejak tahun 2005, porsi sumbangan inflasi inti mencapai 49,5%, sementara porsi sumbangan *volatile foods* sebesar 27,2% dan *administered prices* sebesar 23,4%. Grafik 5.1 memperlihatkan terdapat kecenderungan peningkatan porsi sumbangan inflasi dari kelompok *volatile foods*. Hal lain yang cukup menarik adalah fakta yang menunjukkan perubahan harga kelompok *volatile foods* yang sangat bergejolak, sehingga inflasinya juga sangat berfluktuasi (Grafik 5.2).

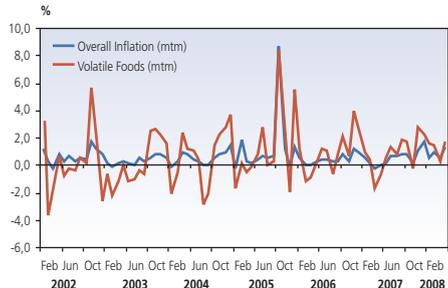
Jelas bahwa *volatile foods* mempunyai peran yang sangat penting dalam pengendalian inflasi. Untuk itu bagi Bank Indonesia, terutama pasca-penerapan *inflation targeting framework (ITF)*, pengendalian harga *volatile foods* menjadi salah satu fokus perhatian dan dapat menjadi kunci

keberhasilan pencapaian target inflasi. Hal ini diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh Furlong dan Ingenito (1996) yang meyakini bahwa harga komoditas dapat dijadikan sebagai *leading indicators* inflasi. Alasannya adalah, pertama, harga komoditas mampu merespon secara cepat *shock* yang terjadi dalam perekonomian secara umum, seperti peningkatan permintaan (*aggregate demand shock*). Kedua, harga komoditas juga mampu merespon terhadap *non-economic shocks* seperti banjir, tanah longsor dan bencana alam lainnya yang menghambat jalur distribusi. Faktor lain yang membuat komoditas pangan menjadi isu penting adalah besarnya dampak gejolak harga komoditas pangan terhadap kondisi makro ekonomi, bahkan dapat menimbulkan instabilitas sosial politik (Dawe, 2001).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan harga komoditas pangan, antara lain jumlah penawaran dan permintaan, struktur pasar, dan distribusi. Pengaruh penawaran dan permintaan terhadap pembentukan harga



Grafik 5.1. Perkembangan Inflasi dan Sumbangan *Volatile Foods*



Grafik 5.2. Perkembangan Inflasi Keseluruhan dan *Volatile Foods* (mtrn)

merupakan hal yang paling lumrah. Peningkatan permintaan akan meningkatkan harga, sebaliknya peningkatan penawaran akan menurunkan harga. Namun melihat karakteristik permintaan konsumsi komoditas pangan yang stabil karena sebagian besar menjadi kebutuhan pokok, maka gejolak harga komoditas pangan tersebut disinyalir lebih dipengaruhi oleh sisi penawaran. Sinyalemen ini cukup beralasan karena produksi komoditas pangan, khususnya pertanian, sangat terkait dengan siklus panen dan faktor cuaca/musim.

Struktur pasar mempengaruhi kemampuan produsen atau pedagang dalam pembentukan harga. Produsen/pedagang tidak mempunyai kekuatan untuk membentuk/ mempengaruhi harga pada pasar persaingan sempurna (kompetitif), semua pelaku pasar bertindak sebagai *price taker*. Namun kemampuan untuk mempengaruhi harga tersebut muncul ketika struktur pasarnya tidak sempurna, bahkan produsen/pedagang dapat bertindak sebagai pembentuk harga (*price maker*) jika struktur

pasarnya monopoli. Berbagi studi empiris menunjukkan bahwa struktur pasar komoditas pangan tidak sempurna sehingga pedagang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah efisiensi distribusi atau biasa disebut juga dengan istilah 'tata niaga' yaitu mekanisme penyampaian komoditas dari produsen kepada konsumen. Efisiensi kegiatan distribusi komoditas sangat dipengaruhi oleh panjang mata rantai jalur distribusi dan besarnya margin keuntungan yang ditetapkan oleh setiap mata rantai tersebut. Semakin pendek mata rantai distribusi dan semakin kecil margin keuntungan yang ditetapkan, maka kegiatan distribusi tersebut semakin efisien. Selain itu, efisiensi kegiatan distribusi komoditas juga dipengaruhi oleh kondisi sektor transportasi. Gangguan terhadap sektor transportasi yang berakibat pada meningkatnya biaya dan jangka waktu penyampaian akan berdampak negatif terhadap efisiensi distribusi. Gangguan tersebut

Tabel 5.3. Sumbangan Inflasi¹ dari Kelompok *Volatile Foods*

No	Kode & Nama Komoditi	2005		2006		2007	
		Bobot	Sumbangan	Bobot	Sumbangan	Bobot	Sumbangan
1	10101 Beras	5.81%	1.430	6.59%	1.746	7.22%	0.589
2	11004 Minyak Goreng	1.41%	0.061	1.27%	0.078	1.56%	0.538
3	10209 Daging Ayam Ras	1.48%	0.019	1.40%	0.161	1.42%	0.220
4	20206 Gula Pasir	1.43%	0.301	1.38%	0.094	1.36%	0.010
5	10216 Daging Sapi	0.99%	0.158	1.00%	0.088	1.01%	0.069
6	10515 Telur Ayam Ras	0.82%	0.064	0.75%	0.034	0.80%	0.163
7	10929 Cabe Merah	0.69%	1.219	0.57%	0.577	0.69%	-0.139
8	10819 Pisang	0.61%	0.048	0.61%	0.091	0.67%	0.093
9	10381 Tongkol	0.60%	0.226	0.66%	0.029	0.67%	0.110
10	10903 Bawang Merah	0.57%	0.160	0.57%	-0.079	0.52%	0.826
	Inflasi Tahun Berjalan	100%	17.114	100%	6.598	100%	6.587

Sumber: BPS (diolah)

1 Bobot merupakan rata-rata bobot bulanan yang diperoleh dari proporsi nilai konsumsi komoditas terhadap total nilai konsumsi pada bulan berjalan. Sementara sumbangan merupakan akumulasi sumbangan bulanan selama satu tahun, dimana sumbangan bulanan = bobot x perubahan harga (inflasi) dari komoditas tersebut.

dapat berupa kelangkaan armada, kerusakan infrastruktur jalan, gangguan alam seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu efisiensi kegiatan distribusi komoditas perlu didukung oleh efisiensi sektor transportasi.

Tulisan ini secara khusus mencoba menelaah peran atau pengaruh dari faktor distribusi tersebut dalam pembentukan harga komoditas pangan, khususnya kelompok *volatile foods*. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder untuk mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan harga dan analisis data survei untuk menambah informasi sekaligus mengkonfirmasi hasil estimasi. Analisis dilakukan terhadap lima komoditas pangan utama yang mempunyai sumbangan signifikan terhadap inflasi. Dengan memperhatikan besarnya bobot dan sumbangan masing-masing komoditas terhadap inflasi, keterwakilan dari jenis/kelompok makanan, dan kemudahan dalam pelaksanaan survei maka lima sampel komoditas yang akan dianalisis adalah komoditas beras, minyak goreng, gula pasir, daging sapi dan cabe merah (Tabel 1).

5.2.2. Pembentukan Harga Komoditas

5.2.2.1. Persamaan dan Hasil Estimasi

Identifikasi pengaruh distribusi terhadap harga komoditas di tingkat pedagang pengecer didasarkan pada *theory of derived demand*, di mana permintaan konsumen terhadap suatu produk di tingkat pedagang pengecer terbentuk dari *derived demand* produk di tingkat produsen/petani.² Dengan mengacu pada pendekatan Sexton dan Zhang (1996), model empiris yang dibangun akan menggambarkan penentuan harga

suatu komoditas dalam jangka pendek yang dipengaruhi oleh harga di tingkat petani/produsen ditambah biaya pemasaran/distribusi komoditas dari petani/produsen sampai ke tingkat pedagang pengecer. Secara sederhana model empiris tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$P_t = f(P_{t-1}, P_{it}, P_{mt}, P_{st}, Q_t, X_t, D_t, Z_t) \dots \dots \dots (1)$$

di mana, P_t merupakan harga komoditas di tingkat konsumen (eceran), P_{it} adalah harga bahan baku/harga input, P_{mt} adalah harga impor atau harga komoditas di pasar internasional, P_{st} merupakan harga komoditas substitusi, Q_t merupakan volume/ jumlah produksi dan X_t sebagai faktor-faktor dari sisi permintaan, seperti jumlah permintaan atau faktor permintaan musiman. Sementara itu, D_t menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi, seperti biaya distribusi atau gangguan distribusi, dan Z_t merepresentasikan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pembentukan harga komoditas.

Persamaan (1) dapat diaplikasikan secara terpisah untuk tiap komoditas, di mana pemilihan variabel yang masuk ke dalam model persamaan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing komoditas. Estimasi dilakukan dengan menggunakan data *time series* bulanan dengan periodisasi yang bervariasi untuk tiap komoditas sesuai dengan ketersediaan data. Untuk kepentingan estimasi, pada umumnya data ditransformasikan ke dalam bentuk *logaritma natural (ln)*, kecuali untuk variabel *dummy*.

Hasil Estimasi Harga Beras:

$$\begin{aligned} PEB_t = & 0,918 + 0,763 PEB_{t-1} + 0,100 HPP_t + \\ & (3,26) \quad (15,20) \quad (2,17) \\ & 0,032 PBINT_t - 0,039 STOK_t + 0,045 PBBM_t - \\ & (1,93) \quad (-3,19) \quad (2,60) \\ & 0,008 DPANEN_t + 0,031 DDIS_t \dots \dots \dots (2) \end{aligned}$$

2 Lihat Friedman (1967), Gordon dan Hazledine (1996), Sexton dan Zhang (1996), dan Ward (1981)

(-1,55) (4,94)
 Adj-R² = 0,991 DW-stat = 1,898
 F-stat = 1043,89

Data yang digunakan untuk estimasi pembentukan harga eceran beras (*PEB_t*) sebanyak 87 observasi dari Januari 2001 – Maret 2008. Hasil estimasi pada persamaan (2) menunjukkan bahwa pembentukan harga eceran beras secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat harga periode sebelumnya (*PEB_{t-1}*), harga pembelian pemerintah (*HPP_t*), harga beras di pasar internasional yang diprosikan dengan *Thai rice 5% broken* (*PBINT_t*), jumlah stok beras yang dikelola oleh Bulog (*STOK_t*), biaya distribusi/pengangkutan yang diprosikan dengan harga bahan bakar minyak (*PBBM_t*), dan hambatan distribusi yang umumnya disebabkan oleh cuaca, banjir maupun tanah longsor (*DDIS_t*). Sementara variabel *dummy* musim panen (*DPANEN_t*) secara statistik tidak signifikan mempengaruhi pembentukan harga eceran beras. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa manajemen stok yang dilakukan oleh Bulog mampu meredam gejolak harga yang disebabkan oleh fluktuasi pasokan beras yang disebabkan oleh siklus panen.³ Namun posisi stok beras Bulog justru berpengaruh terhadap pembentukan harga eceran beras. Penurunan stok beras Bulog dapat memicu aksi spekulasi di kalangan pedagang beras sehingga harga akan cenderung meningkat.

Hasil Estimasi Harga Minyak Goreng:

$$PMG_t = 1,039 + 0.808 PMG_{t-1} + 0,085 PCPO_{t-1} +$$

(3,80) (19,69) (4,00)

3 Beras merupakan satu-satunya komoditas yang masih berada di bawah kendali Bulog sesuai dengan Kepres No. 19 tahun 1998, sementara untuk komoditas kebutuhan pokok lainnya diserahkan kepada pasar.

0,033 QMG_{t-1} + 0,001 PBBM_t - 0,259 DBULOG_t -
 (2,03) (0,07) (-5,10)
 0,002 DDIS_t + 0,018 DEXP_t..... (3)
 (-0,30) (1,10)
 Adj-R₂ = 0,997 DW-stat = 1,423
 F-stat = 9592,43

Hasil estimasi yang dilakukan dengan menggunakan data periode Januari 1993-Desember 2007 menunjukkan bahwa pembentukan harga eceran minyak goreng (*PMG_t*) dipengaruhi oleh tingkat harga periode sebelumnya (*PMG_{t-1}*), harga *crude palm oil* di pasar internasional (*PCPO_{t-1}*), jumlah produksi CPO dalam negeri sebagai proksi dari produksi minyak goreng domestik (*QMG_{t-1}*), dan peran Bulog sebagai stabilisator harga minyak goreng sebelum tahun 1998 (*DBULOG_t*). Penggunaan *lag* pada variabel PCPO dan QMG didasarkan pada kenyataan bahwa proses produksi dan pemasaran minyak goreng kepada konsumen tidak terjadi secara simultan.

Sementara tiga variabel lainnya secara statistik tidak signifikan mempengaruhi pembentukan harga minyak goreng, yakni variabel biaya distribusi/ pengangkutan yang diprosikan dengan harga bahan bakar minyak (*PBBM_t*), hambatan distribusi (*DDIS_t*), dan kebijakan pungutan ekspor yang diterapkan sejak Juni 2007 (*DEXP_t*). Karakteristik minyak goreng yang tahan lama, telah terstrukturnya jalur dan manajemen distribusi minyak goreng yang pernah dibina oleh Bulog menjadi faktor pendorong rendahnya pengaruh faktor biaya dan hambatan distribusi pada harga. Sementara kebijakan pungutan ekspor tidak mampu mengurangi keinginan pengusaha untuk mengeksport CPO karena tingginya harga CPO di pasar internasional.

Hasil Estimasi Harga Gula Pasir:

$$\begin{aligned}
 PG_t = & 0,510 + 0,899 PG_{t-1} + 0,075 PINT_{t-1} + \\
 & (3,62) \quad (36,27) \quad (5,03) \\
 & 0,001 QG_{t-1} - 0,005 PBBM_t + 0,005 DDIS_t - \\
 & (0,32) \quad (-0,32) \quad (0,66) \\
 & 0,126 DBULOG_t + 0,042 DIMP_t \dots\dots\dots (4) \\
 & (-6,38) \quad (3,09) \\
 \text{Adj. } R^2 = & 0,995 \quad \text{DW-stat} = 1,414 \\
 \text{F-stat} = & 5120,16
 \end{aligned}$$

Hasil estimasi dengan menggunakan data bulanan periode Januari 1993- Desember 2007 menunjukkan bahwa pembentukan harga eceran gula pasir (PG_t) secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat harga pada periode sebelumnya (PG_{t-1}), harga gula di pasar internasional dengan lag satu periode ($PINT_{t-1}$), peran pemerintah dalam pengendalian harga melalui Bulog sebelum tahun 1998 ($DBULOG_t$), dan kebijakan pembatasan impor gula yang diterapkan sejak September 2002 ($DIMP_t$). Kuantitas produksi gula pasir domestik (QG_{t-1}) secara statistik tidak signifikan mempengaruhi pembentukan harga karena besarnya pengaruh impor gula. Demikian halnya dengan variabel distribusi, baik biaya distribusi/ pengangkutan yang diprosikan dengan harga bahan bakar minyak ($PBBM_t$) dan hambatan distribusi ($DDIS_t$), juga tidak berpengaruh terhadap pembentukan harga gula. Hal ini sejalan dengan karakteristik komoditas gula yang dapat disimpan dalam waktu yang lama dan telah tertatanya jalur distribusi gula pasir.

Hasil Estimasi Harga Daging Sapi:

$$\begin{aligned}
 PDS_t = & 0,615 + 0,900 PDS_{t-1} + 0,022 PINT_{t-1} + \\
 & (2,10) \quad (26,46) \quad (1,79) \\
 & 0,032 PBBM_t + 0,041 DHIF_t - 0,012 DHQ_t + \\
 & (2,48) \quad (6,31) \quad (-1,94) \\
 & 0,003 DDIS_t \dots\dots\dots (5) \\
 & (0,55)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Adj. } R^2 = & 0,992 \quad \text{DW-stat} = 2,046 \\
 \text{F-stat} = & 1670,8
 \end{aligned}$$

Data yang digunakan untuk estimasi sebanyak 96 observasi dari bulan Januari 2000 sampai dengan Desember 2007. Dari hasil estimasi pada persamaan (5) dapat disimpulkan bahwa pembentukan harga eceran daging sapi (PDS_t) secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat harga periode sebelumnya (PDS_{t-1}), biaya distribusi atau transportasi yang diprosikan dengan harga bahan bakar minyak ($PBBM_t$), dan variabel dummy bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri ($DHIF_t$). Harga daging sapi di pasar internasional diprosikan dengan *Australian beef* ($PINT_{t-1}$) dan dummy Hari Raya Qurban yang menambah pasokan daging bagi masyarakat hanya signifikan pada level 10%, namun arah koefisien yang dihasilkan sesuai dengan hipotesis. Rendahnya pengaruh harga internasional terhadap harga daging sapi dalam negeri karena porsi daging impor (*frozen meat*) sangat sedikit, impor lebih banyak dilakukan dalam bentuk sapi hidup. Sementara variabel hambatan distribusi karena cuaca, banjir, maupun tanah longsor tidak signifikan karena daging yang distribusi di suatu wilayah umumnya dipotong di rumah potong hewan (RPH) setempat, sesuai dengan selera masyarakat yang lebih menyukai daging sapi segar (*fresh meat*).

Hasil Estimasi Harga Cabe Merah:

$$\begin{aligned}
 PCM_t = & 2,892 + 0,559 PCM_{t-1} - 0,129 Q'CM_t + \\
 & (3,13) \quad (5,19) \quad (-1,26) \\
 & 0,169 PBBM_t + 0,193 DDIS_t \dots\dots\dots (6) \\
 & (2,61) \quad (2,81) \\
 \text{Adj. } R^2 = & 0,63 \quad \text{DW-stat} = 1,85 \\
 \text{F-stat} = & 21,07
 \end{aligned}$$

Estimasi pembentukan harga cabe merah cukup sulit karena fluktuasinya yang sangat tinggi

dan keterbatasan ketersediaan data. Hasil estimasi dengan menggunakan data periode Januari 2003 – Desember 2007 pada persamaan (6) menunjukkan bahwa pembentukan harga cabe merah (PCM_t) secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat harga cabe merah pada periode sebelumnya (PCM_{t-1}), dan variabel distribusi yang meliputi biaya distribusi/ pengangkutan yang diprosikan dengan harga bahan bakar minyak ($PBBM_t$) dan hambatan distribusi karena faktor cuaca buruk, banjir atau tanah longsor ($DDIS_t$). *Gap* antara *supply demand* cabe merah ($Q'CM_t$) secara statistik tidak signifikan, harga cabe merah lebih dipengaruhi oleh distribusi karena sifatnya yang mudah rusak/busuk (*perishable*). Kecepatan distribusi menjadi salah satu kunci dalam pembentukan harga cabe merah. Keterlambatan distribusi dapat menurunkan kualitas cabe merah sangat berpengaruh terhadap harganya.

5.2.2.2. Faktor Distribusi dan Harga Komoditas

Dalam pembentukan harga, secara empiris memang tidak pernah terlepas dari pengaruh harga pada periode sebelumnya. Penggunaan *lag* harga tersebut juga dapat digunakan untuk melihat tingkat resistensi harga ataupun besarnya volatilitas harga yang mungkin ditimbulkan. Semakin tinggi koefisien pada variabel *lag* harga menunjukkan bahwa harga komoditas tersebut semakin resisten atau semakin rendah gejala harganya. Dengan demikian dari estimasi pembentukan harga lima

komoditas di atas, dapat disimpulkan bahwa harga daging sapi adalah yang paling resisten untuk turun terlihat dari nilai koefisien variabel *lag* harga yang mencapai 0,900 diikuti oleh harga gula pasir (0,899), harga minyak goreng (0,808), harga beras (0,763), dan cabe merah (0,559).

Tingkat resistensi harga tersebut terkait erat dengan sifat dari masing-masing komoditas. Komoditas yang *perisable* akan semakin *volatile* karena sangat rentan terhadap *supply shocks*, baik yang berasal dari produksi maupun distribusi, terlihat pada harga komoditas cabe merah. Jarak antara sentra produksi dan konsumen serta panjang rantai distribusi juga berpengaruh terhadap resistensi harga karena dampak biaya pengangkutan dan hambatan distribusi terhadap harga lebih signifikan. Analisis ini terkonfirmasi dari hasil estimasi yang dirangkum pada Tabel 5.4. Pengaruh biaya pengangkutan dan hambatan distribusi secara signifikan berpengaruh terhadap komoditas cabe merah dan beras, namun tidak berpengaruh terhadap minyak goreng dan gula pasir. Hal ini disinyalir karena produksi minyak goreng dan gula pasir dilakukan oleh industri yang cenderung lebih efisien dari komoditas yang lainnya, dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama, dan telah memiliki jalur distribusi yang lebih permanen dengan jumlah mata rantai yang lebih pendek.

5.2.3. Hasil Survei Komoditas

Hasil estimasi ekonometris di atas tidak dapat menangkap rantai distribusi dan besar margin keuntungan yang ditetapkan oleh masing-masing mata rantai distribusi. Untuk itu dilakukan survei terhadap 474 responden di 14 kota yang tersebar di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah

Tabel 5.4 Elastisitas Harga Komoditas terhadap Faktor Distribusi

Variable Distribusi	Beras	Minyak Goreng	Gula Pasir	Daging Sapi	Cabe Merah
Harga BBM	0,045**	0,001	-0,005	0,032**	0,169***
Gangguan Distribusi	0,031***	-0,002	0,005	0,003	0,193***

dan Jawa Timur.⁴ Survei dilakukan terhadap 3 komoditas (beras, daging sapi dan cabe merah) dan meliputi berbagai level distribusi mulai dari petani, pedagang pengepul, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Sementara untuk informasi komoditas minyak goreng dan gula pasir memanfaatkan hasil penelitian yang pernah dilakukan.

5.2.3.1. Jalur Distribusi

Dari hasil identifikasi jalur distribusi menunjukkan bahwa komoditas pertanian (beras dan cabe merah) mempunyai mata rantai distribusi yang lebih panjang karena melibatkan pedagang pengepul/tengkulak. Jalur distribusi utama komoditas pertanian umumnya meliputi: petani, pedagang pengepul/tengkulak, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen. Sebagian besar responden petani (84% untuk beras dan 73% untuk cabe merah) lebih suka menjual hasil produksinya kepada pedagang pengepul/tengkulak setempat dengan alasan kemudahan penjualan karena pengepul mengambil di tempat sehingga petani tidak perlu mengeluarkan biaya angkut, dibayar secara tunai, sudah berlangganan dan harganya kompetitif.

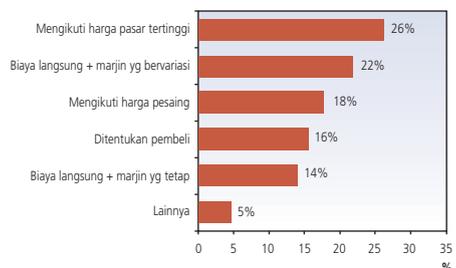
Sementara jalur distribusi daging sapi dari rumah pemotongan hewan (RPH) langsung kepada pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen. Bahkan sebagian besar pedagang besar daging sapi dapat langsung menjual kepada konsumen sehingga rantai distribusinya lebih pendek dan fleksibel. Untuk jalur distribusi minyak goreng dan gula pasir cukup seragam dari perusahaan/pabrik pengolah minyak goreng atau

gula pasir kepada pedagang besar (grosir), pedagang pengecer dan konsumen. Jalur distribusi komoditas minyak goreng dan gula pasir terlihat lebih mapan dan efisien karena dibina oleh perusahaan yang berkepentingan dalam memasarkan produknya.

5.2.3.2. Pembentukan Harga dan Margin Keuntungan

Dalam hal metode penentuan harga, sebanyak 26% responden pedagang memilih untuk mengikuti harga tertinggi di pasar, 22% pedagang menambahkan margin keuntungan yang bervariasi atas biaya langsung perolehan barang, dan 18% pedagang mengikuti harga pedagang pesaingnya (Grafik 5.3). Masing-masing metode penentuan harga tersebut berpengaruh terhadap keuntungan pedagang. Dari metode penentuan harga yang dominan digunakan oleh pedagang terlihat bahwa pedagang mempunyai fleksibilitas dan kemampuan dalam mempengaruhi harga karena struktur pasar komoditas yang tidak kompetitif.

Secara persentase terhadap harga jualnya, pedagang cabe merah memperoleh margin keuntungan terbesar yang melebihi 5% untuk setiap jenis pedagang. Besarnya margin keuntungan yang ditetapkan oleh pedagang cabe



Grafik 5.3 Metode Pembentukan Harga di Tingkat Pedagang

4 155 responden untuk komoditas beras, 160 responden untuk komoditas daging sapi, dan 159 responden untuk komoditas cabe merah.

Tabel 5.5 Rata-rata Margin Keuntungan Pedagang (dalam rupiah)

Jenis Pedagang	Beras	Daging Sapi	Cabe Merah	Gula Pasir
Pedagang Penggepul	108	-	809	-
Pedagang Besar	154	2.943	841	240
Pedagang Pengcecer	254	1.848	1.044	400
Kisaran Harga per Kg	5.500	50.000	16.000	6.500
Pedagang Penggepul	2.0%	-	5.1%	-
Pedagang Besar	2.8%	5.9%	5.3%	3.7%
Pedagang Pengcecer	4.6%	3.7%	6.5%	6.2%

merah terkait dengan tingginya risiko penurunan kualitas dan penurunan harga cabe mengingat sifatnya yang *perishable*. Sementara berdasarkan jenis pedagang, margin keuntungan terbesar dinikmati oleh kelompok pedagang pengecer (kecuali untuk daging sapi). Penetapan margin keuntungan yang cukup tinggi oleh pedagang pengecer didasarkan pada alasan omset penjualan yang relatif kecil sementara biaya kebutuhan pokok meningkat. Alasan yang sama juga disampaikan oleh petani ketika menaikkan harga jual produknya yang mencapai 48% dari responden. Alasan lain adalah untuk modal tanam musim berikutnya (26%) seiring dengan peningkatan harga benih, pupuk, dan insektisida.

5.2.3.3. Biaya dan Hambatan Distribusi

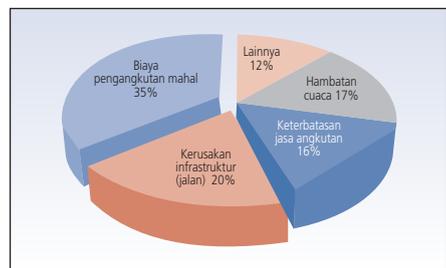
Besaran biaya pengangkutan komoditas dari produsen/petani kepada konsumen berbeda-beda, tergantung pada jarak antara produsen dan konsumen, serta sifat dari komoditas tersebut. Semakin jauh jaraknya akan semakin tinggi biayanya, begitu pula jika sifat komoditasnya memakan tempat (*bulky*) seperti cabe merah karena pemampatan untuk penghematan tempat dapat menurunkan kualitas dan harga cabe merah. Sentra produksi cabe merah memang tidak sebanyak sentra produksi beras, sehingga jaraknya relatif lebih jauh. Sangat wajar jika biaya

Tabel 5.6 Biaya Pengangkutan dan Dampak Kenaikan Harga BBM

Biaya Retribusi	Beras	Daging Sapi	Cabe Merah
Sebelum kenaikan BBM	135	190	603
Sesudah kenaikan BBM	179	244	784
Perubahan biaya (Rp)	44	54	181
Perubahan biaya (%)	33%	28%	30%
Kisaran harga per Kg	5.500	50.000	16.000
% perubahan thd harga	0.8%	0.1%	1.1%

pengangkutan cabe merah lebih mahal dibanding biaya pengangkutan daging sapi yang bersifat lokal dari RPH setempat ke pasar tradisional. Rincian rata-rata biaya pengangkutan komoditas beras, daging sapi dan cabe merah di Pulau Jawa terangkum dalam Tabel 5.6.

Peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) secara langsung berpengaruh terhadap biaya distribusi komoditas. Dengan mengambil kasus peningkatan harga BBM pada bulan Mei 2008, terlihat bahwa biaya distribusi komoditas meningkat dalam proporsi yang relatif seragam. Peningkatan biaya angkut beras sebesar Rp44/kg (33%), daging sapi Rp55/kg (28%), dan cabe merah Rp181/kg (30%). Bila dibandingkan dengan harga jualnya maka peningkatan biaya angkut tersebut relatif kecil. Misalnya untuk komoditas beras yang hanya sebesar 0,8% dari harga jual



Grafik 5.4 Hambatan Distribusi Yang Dialami oleh Pedagang

beras, namun kenaikan harga eceran beras yang terjadi jauh lebih tinggi sekitar 2,5%. *Second round effect* peningkatan harga BBM terhadap harga komoditas yang sangat tinggi terjadi karena setiap level distribusi menaikkan harga jual komoditas untuk menutupi peningkatan kebutuhan pokok dan modal usaha berikutnya.

Dalam melakukan distribusi komoditas pada setiap rantai distribusi, hanya sebesar 20% responden pedagang yang mengalami hambatan distribusi. Hambatan terbesar dalam kegiatan distribusi adalah mahalnya biaya pengangkutan (35%), dan hal ini sangat dirasakan oleh pedagang pasca peningkatan harga BBM (Grafik 5.4). Jenis hambatan selanjutnya adalah kerusakan infrastruktur/jalan (20%), hambatan cuaca buruk seperti hujan deras dan gelombang tinggi yang memperpanjang waktu tempuh (17%), dan keterbatasan jumlah armada angkutan (16%).

5.2.4. Kesimpulan

Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari uraian dan analisis di atas adalah sebagai berikut:

1. Komoditas *volatile foods* mempunyai peranan yang penting karena sumbangannya yang cukup signifikan dalam pembentukan inflasi. Gejala harga kelompok *volatile foods* cenderung meningkat pada periode setelah krisis seiring dengan berkurangnya peran pemerintah dalam pengendalian harga komoditas.
2. Tekanan gejolak harga kelompok *volatile foods* lebih dipicu oleh *supply shocks*, mengingat permintaan komoditas tersebut yang umumnya merupakan kebutuhan pokok cenderung stabil. Sumber *supply shock* tersebut umumnya terkait dengan

kelangkaan pasokan karena siklus produksi, gangguan cuaca/musim, gangguan hama, dan gangguan distribusi (seperti jalur distribusi, margin keuntungan, biaya dan hambatan transportasi).

3. Hasil estimasi pembentukan harga lima komoditas utama penyumbang inflasi kelompok *volatile foods* mengindikasikan bahwa (i) semakin cepat rusak/busuk (*perishable*) suatu komoditas tingkat fluktuasi harganya semakin tinggi tercermin dari koefisien *lag variable* harga komoditas yang semakin rendah; (ii) manajemen stok atas suatu komoditas (seperti yang dilakukan Bulog dalam komoditas beras) dapat mengurangi tekanan gejolak harga; (iii) pola produksi yang tidak dipengaruhi oleh faktor musiman dan pola distribusi yang bersifat lokal (seperti komoditas daging sapi) mengurangi fluktuasi harga; (iv) harga komoditas yang porsi ekspor-impornya cukup tinggi terkait erat dengan perkembangan harga di pasar internasional.
4. Temuan menarik lainnya menunjukkan bahwa biaya transportasi yang diprosikan dengan harga BBM berpengaruh signifikan terhadap produk yang lebih *perishable* dan memakan tempat (*bulky*) dalam pengangkutan seperti cabe merah. Namun biaya transportasi tidak berpengaruh terhadap komoditas yang diproduksi dan didistribusikan oleh industri/perusahaan seperti gula pasir dan minyak goreng. Sementara itu gangguan distribusi yang disebabkan oleh banjir, longsor, dan gelombang tinggi hanya berpengaruh terhadap harga beras dan cabe merah.

5. Jalur distribusi utama komoditas pertanian cenderung lebih panjang dengan melibatkan pedagang pengumpul/tengkulak, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Sementara jalur distribusi untuk komoditas yang diproduksi dan didistribusikan oleh industri/perusahaan lebih pendek, terstruktur dan efisien. Dari masing-masing rantai distribusi tersebut, umumnya pedagang pengecer memperoleh margin keuntungan terbesar, diikuti pedagang besar dan pedagang pengumpul.
6. Hanya sebagian kecil responden pedagang

yang menemui hambatan dalam melakukan distribusi komoditas. Jenis hambatan yang paling sering dihadapi adalah biaya pengangkutan yang mahal (35%), kerusakan infrastruktur (20%), hambatan cuaca/musim (17%), dan keterbatasan armada angkutan (16%). Peningkatan biaya pengangkutan tersebut dipicu oleh kenaikan harga BBM. Dampak langsung kenaikan harga BBM terhadap biaya pengangkutan relatif rendah, namun *second round effect* terhadap harga jual komoditas sangat tinggi sehingga mendorong lonjakan inflasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Pustaka

- Astiyah, S., A.R. Hutabarat, dan D.V.B. Sianipar, 2004, Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Perilaku Pembentukan Harga Produk Industri melalui *Structure-Conduct-Performance Model*, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia.
- Badan Pusat Statistik, 2008, Statistik Industri Besar Sedang, beberapa edisi.
- _____, beberapa tahun, Survei Tenaga Kerja Nasional.
- _____, 2008, Tabel Input Output Indonesia 2005.
- Bain, J.S., 1941, The Profit Rate as Measure of Monopoly Power, QJE.
- Bank Indonesia, 2006, Outlook Ekonomi Indonesia 2006-2010, edisi Juli 2006, Bank Indonesia.
- _____, 2007, Evaluasi Perkembangan Ekonomi, Perbankan & Sistem Pembayaran Jawa Timur Triwulan III-2007.
- _____, 2007, Analisis Keterkaitan Sistem Distribusi Gula dengan Laju Inflasi. Penelitian *Indepth Study* Subsektor Perdagangan, Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter.
- _____, 2007, Analisis Tata Niaga dan Struktur Pasar CPO dan Minyak Goreng. Penelitian *Indepth Study* Subsektor Perdagangan, Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter.
- _____, 2007, Outlook Ekonomi Indonesia 2007-2011, edisi Januari 2007, Bank Indonesia.
- _____, 2007, Outlook Ekonomi Indonesia 2007-2011 "Inflasi, Kemiskinan dan Penawaran Agregat di Perekonomian Indonesia", edisi Juli 2007, Bank Indonesia.
- _____, 2008, Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012 "Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional", edisi Januari 2008, Bank Indonesia.
- Borensztein, E., Khan, M.S., Reinhart, C.M., dan Wickham, P., 1994, The Behavior of Non-Oil Commodity Prices. *Occasional Paper No. 112*, Internation Monetary Fund, Washington D.C.
- Carlton, D.M. dan J.W. Perloff, 2000, Introduction to Industrial Organization, MIT Press.
- Chambers, M.J. dan Bailey, R.E., 1996, A Theory of Commodity Price Fluctuations. *The Journal of Political Economy*, Vol. 104, No. 5, hal. 924-957.
- Cody, B.J. dan Mills, L.O., 1991, The Role of Commodity Prices in Formulating Monetary Policy. *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 73, No. 2, hal. 358-365.
- Comanor, W.S., dan T.A. Wilson, 1967, Advertising Market Structure and Performance, Review 49, pp. 203-255.
- Cuihong, Yang, 2000, *Study on Multiplier Effect of China Township and Village Enterprises on National*

- Economy*, Institute of Systems Science. Chinese Academy of Sciences. Paper submitted to the 13th International Conference on Input-Output Technique, August 21-25, 2000, Macerata, Italy.
- Culha, A., dan Cihan Y., 2005, The Determinants of the Price-Cost Margins of the Manufacturing Firms in Turkey, *METU Studies in Development*, 32 (December), 303-331.
- Darsono, dkk., 2001, *Survei Mekanisme Pembentukan Harga*. Bank Indonesia.
- Dawe, D., 2001, How Far Down the Path to Free Trade? The Importance of Rice Price Stabilization in Developing Asia. *Food Policy*, Vol. 26, hal. 163-175.
- Deaton, A. dan Laroque, G. (1992). On the Behavior of Commodity Prices. *Review of Economic Studies*, No. 59, hal. 1-23.
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2006 – 2026.
- Departemen Keuangan, 2008, Keputusan Menteri Keuangan No.1/2008.
- _____, 2008, Nota Keuangan dan RAPBN 2009.
- _____, 2008, Dokumen Tambahan Nota Keuangan dan RAPBN 2009.
- Economist Intelligence Unit, 2007, World Investment Prospects to 2011, Dominican Republic Export and Investment Center (CEI-RD).
- Energy International Agency, 2007, International Energy Outlook, August 2008.
- _____, 2007, Short-Term Energy Outlook.
- Ermina, M., 2007, Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia: Antara Potensi dan Peluang. *Economic Review* No. 209.
- Firdaus, M., dkk., 2008, Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Industri Manufaktur di Indonesia, WP Series No. 04/A/III/2008. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Furlong, F. dan Ingenito, R., 1996, Commodity Prices and Inflation. *Federal Reserve Bank of San Francisco (FRBSF) Economic Review* No. 2, hal. 27-47.
- Gordon dan Hazledine, 1996, Modelling Farm-retail Price Linkage for Eight Agricultural Commodities. Tehnical Report No. 1/98. Agriculture and Agro-food Canada Policy Branch. Economic and Policy Analysis Directorate.
- Hall, R.E., 1988, The Relation Between Price and Marginal Cost in U.S. Industry, *Journal of Political Economy*, Vol. 96, No. 5, pp. 921-947.
- International Country Risk Guide, berbagai tahun, PRS Group, Inc., NY, USA.
- International Institute for Management Development, berbagai edisi, The World Competitiveness Scoreboard.

- International Monetary Fund, 2008, World Economic Outlook, Housing and the Business Cycle, April 2008.
- _____, 2008, World Economic Outlook Update, Global Slowdown and Rising Inflation, July 2008.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2008, Instruksi Presiden No. 5/2008.
- Lembaga Riset Perkebunan Indonesia, 2007, Stabilisasi Harga Minyak Goreng.
- Mahmud, Z., 2008, bahan tayangan Focus Group Discussion Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2013, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia.
- Majardi., F., 2002, *Administered Price dan Pola Penetapan Harga BBM. Occasional Paper No. OP/02/09.* Bank Indonesia.
- Majardi, Darsono, Hartawan, Arief, 2002, Small Scale Macro Model-EXTENDED. Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia.
- Martins, J.O., dkk, 1996, Mark-up Pricing, Market Structure, and the Business Cycle. OECD Economic Studies, no. 27, 1996/II, pp. 71-105.
- Mason, E.S., 1939, Price and Production Policies of Large-Scale Enterprise, American Economic Review, Vol. 29, pp. 61-74.
- Miller, Ronald E. dan Blair, Peter D., 1985, *Input Output Analysis. Foundation and Extensions.* Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Pengkajian Energi Universitas Indonesia (PEUI), Indonesia Energy Outlook & Statistik 2006.
- PLN, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2006-2015.
- _____, 2006, Annual Report 2006.
- _____, 2007, Development Policy in Power Generation, Transmission, and Distribution Facility, Presentation Nanning-China, November.
- Prasetyani, M., dan Ermina M., 2004, Potensi dan Prospek Bisnis Kelapa Sawit. Bank Negara Indonesia.
- Regional Investment, 2005, Peta Komoditi Utama Sektor Primer dan Pengkajian Peluang Pasar serta Peluang Investasinya di Indonesia.
- Sexton, J.R., dan Zhang, M., 1996, Model of Price Determination for Fresh Produce with Application to California Iceberg Lettuce. *American Journal of Agricultural Economics*, No. 78, November 1996.
- Small, I., 1997, The Cyclicity of Mark-Ups and Profit Margins: Some Evidence for Manufacturing and Services. BoE Working Papers No. 72.
- Tirole, Jean, 1988, The Theory of Industrial Organization, The MIT Press, London, England.
- Tomek, William G., 2000, Commodity Prices Revisited. *Staff Paper 2000-05*, Department of Applied Economics and Management, Cornell University, New York.

- Transparency International, 2007, Corruption Perception Index 2007, ency.org" www.transparency.org.
- Tryfino, 2007, Permasalahan dan Prospek Listrik Nasional, Economic Review, Maret.
- United Nations, Statistics Division, Commodity Trade Statistics Database, www.comtrade.un.org/db/.
- _____, 2007, Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, World Investment Report, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
- _____, 2007, World Investment Prospect Survey 2007-2009, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
- _____, 2007, Human Development Report 2007-2008, United Nations Development Programme (UNDP).
- Wahyono, T., dan Heru I., 2006, Faktor-faktor Sosial Ekonomi yang Berpengaruh pada Konsumsi Minyak Goreng Sawit di Rumah Tangga di Kawasan Perkotaan. Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Jurnal Vol. 14, No. 1, April 2006.
- Ward, E.C., 1981, Short-period Pricing Model for Fed Cattle and Impacts of Wholesale Carcass Beef and Live Cattle Futures Market Prices. *Southern Journal of Agricultural Economics*, July 1981.
- World Bank, 2008, Doing Business Survey, www.doingbusiness.org.